



DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP EFISIENSI EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Peneliti:

MG Westri Kekalih Susilowati

Agnes Arie Mientarry Christie

Paulina Rini Hastuti

Shandy Jannifer Matitaputty

**DIBIYAI OLEH:
BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DESEMBER 2021**

KATA PENGANTAR

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dan tujuan akhir dari pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kedudukan dan peran pemerintahan daerah dalam konfigurasi kehidupan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan semakin penting. Kondisi tersebut tercermin pada undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah, sebut saja antara lain Undang-undang nomor 5 tahun 1974, undang-undang nomor 22 tahun 1999, undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan seterusnya sampai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang telah diganti dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas undang-undang tersebut. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok Negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Dengan berbagai kewenangan yang telah dimilikinya diharapkan mampu menjadi titik-titik ungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat. Daerah diharapkan dapat menjadi basis baru pembangunan ekonomi. Daerah sangat diharapkan memiliki daya saing pada berbagai tataran, nasional, regional maupun global.

Telah lebih dari dua dekade, otonomi daerah diselenggarakan, dengan desentralisasi fiskal seutuhnya pada tahun 2014 yakni dengan diterbitkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014. Besarnya harapan atas peran pemerintah daerah dalam peningkatan kehidupan masyarakat, baik pada aspek politik, ekonomi maupun sosial budaya mengandung arti tersendiri bagi daerah sebagai daerah otonom. Dalam kondisi demikian, daerah, terutama Kabupaten/Kota mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menerima, harus menyesuaikan diri karena pengembangan daya saing perekonomian bertumpu di daerah. Desentralisasi fiskal yang berimplikasi pada penyerahan kewenang dalam hal pembiayaan dan pengalokasian anggaran, yang tentunya akan membawa implikasi yang beragam bagi perekonomian daerah.

Beberapa penelitian dan opini menunjukkan hal yang konsisten dengan tujuan desentralisasi fiskal, Namun, juga terdapat penelitian yang justru menunjukkan hal yang sebaliknya.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berdasarkan persepsi, atau sesuatu yang memang dirasakan oleh informan mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap efisiensi ekonomi dan kesejahteraan yang tercermin pada indikator kinerja perekonomian daerah dan hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah (HKPB)

Desember 2021

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Tujuan khusus.....	2
1.3. Urgensi penelitian.....	2
BAB II. STUDI PUSTAKA.....	6
2.1. Anggaran Belanja Merupakan Salah Satu Instrument Fiskal.....	6
2.2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.....	6
2.3. Public-Private Partnership (PPP).....	8
1. Negara, berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif.....	9
2. Swasta, mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.....	9
2.4. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).....	10
BAB III. METODE PENELITIAN.....	12
3.1. Jenis Penelitian.....	12
3.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....	13
3.4. Metode Analisis.....	14
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
4.1. Perkembangan dan Struktur Perekonomian.....	18
4.1. 1. Perkembangan dan struktur PerekonomianProvinsi Jawa Tengah.....	18
4.1.2. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten dengan Dominasi Sektor Pertanian: Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pati.....	27
4.1.3. Analisis Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten dengan Dominasi Sektor Perdagangan: Kota Semarang dan Kabupaten Surakarta.....	28
4.1.4. Analisis Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten dengan Dominasi Sektor Industri: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kudus.....	29
4.2. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan.....	30
4.2.1. Perkembangan Kemiskinan.....	30
4.2.2. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan.....	36
b. Ketimpangan Pendapatan antar Kelompok Pendapatan: Gini Index.....	37
4.3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.....	40
4.3.2. Indeks Pembangunan Manusia.....	48

4.4.	Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	50
4.5.	Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan (Pendapatan Perkapita).....	57
4.6.	Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Beberapa Indikator Kemandirian Daerah: Pendekatan AHP	60
4.6.1.	Persepsi Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Indikator Kinerja Perekonomian Daerah	60
4.7.	Diskusi.....	69
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		74
5.1.	Kesimpulan.....	74
5.2.	Rekomendasi	76
DAFTAR PUSTAKA		78

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Variabel dan Indikator Penelitian.....	13
Tabel 3.2 Pengambilan Data Primer dan Responden Sasaran.....	13
Tabel 4.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah atas dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005- 2010	19
Tabel 4.2. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah atas dasar Harga Berlaku Tahun 2005- 2010 (Juta Rupiah)	19
Tabel 4.3. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah atas dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2014- 2019 (Juta Rupiah)	20
Tabel 4.4. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah atas dasar Harga Berlaku Tahun 2014- 2019 (Juta Rupiah)	21
Tabel 4.5. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2010 Atas dasar harga konstan 2000.....	22
Tabel 4.7. Usia Harapan Hidup Saat Lahir Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009.....	41
Tabel 4.8a Usia Harapan Hidup Saat Lahir Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta Sebelum Berlakunya UU No.28 Tahun 2009.....	42
Tabel 4.8b. Usia Harapan Hidup Saat Lahir Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009.....	42
Tabel 4.9a. Angka Melek Huruf Propinsi Jawa Tengah	43
Sebelum Berlakunya UU No.28 Tahun 2009.....	43
Tabel 4.10a Angka Melek Huruf Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kt Surakarta.....	43
Sebelum Berlakunya UU No.28 Tahun 2009.....	43
Tabel 4.9b Harapan Lama Sekolah Propinsi Jawa Tengah.....	44
Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009	44
Tabel 4.10b Harapan Lama Sekolah Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kt Surakarta Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009.....	45
Tabel 4.11. Rata-rata Lama Sekolah Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009	45
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah.....	45
Tabel 4.12a Rata-rata Lama Sekolah Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta	46
Sebelum Berlakunya UU No.28 Tahun 2009.....	46
Tabel 4.12b. Rata-rata Lama Sekolah Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009.....	46

Tabel 4.13 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009.....	47
Tabel 4.14a Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta Sebelum Berlakunya UU No.28 Tahun 2009.....	47
Tabel 4.14b. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009.....	48
Tabel 4.15. Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009.....	49
Tabel 4.16a. Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta.....	49
Sebelum Berlakunya UU No.28 Tahun 2009.....	49
Tabel 4.16b. Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta.....	50
Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009	50
Tabel 4.17. Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten	51
Tabel 4.18 Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Tengah	52
Tabel 4.19 Rasio PAD terhadap Pendapatan dan Belanja	53
Tabel 4.20 Perhitungan Regresi PAD Terhadap IPC (model 1)	58
Tabel 4.21 Perhitungan Regresi PAD Terhadap KF (model 2)	59
Tabel 4.22 Perhitungan Regresi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kapasitas Fiskal Terhadap Kesejahteraan	59
Tabel 4.23. Matriks Perbandingan Berpasangan Keterdampakan Indikator HKPD.....	62
Tabel 4.24 Matriks Penentuan Bobot Keterdampakan Indikator HKPD	63
Tabel 4.25 Matriks Perbandingan Berpasangan Keterdampakan Indikator Disiplin Prioritas	63
Tabel 4.26 Matriks Penentuan Bobot Keterdampakan Indikator Disiplin Prioritas.....	64
Tabel 4.27 Matriks Perbandingan Berpasangan Keterdampakan Indikator Produktivitas	65
Tabel 4.28 Matriks Penentuan Bobot Keterdampakan Indikator Produktivitas.....	65
Tabe 4.29 Matriks Perbandingan Berpasangan Keterdampakan Indikator Kesejahteraan	66
Tabel 4.30. Matriks Penentuan Bobot Keterdampakan Indikator Kesejahteraan	66
Tabel 4.31. Matriks Perbandingan Berpasangan Keterdampakan Indikator Ekonomi	67
Tabel 4.32 Matriks Penentuan Bobot Keterdampakan Indikator Ekonomi	67
Tabel 4.33. Matriks Perbandingan Berpasangan Keterdampakan Indikator Iklim Investasi ..	68
Tabel 4.34. Matriks Penentuan Bobot Keterdampakan Indikator Iklim Investasi	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Hubungan Keuangan Pusat-Daerah	11
Gambar 2.2 Esensi Desentralisasi Fiskal	11
Gambar 4.1. Kontribusi PDRB Sektoral Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2005.....	25
Gambar 4.2. Kontribusi PDRB Sektoral Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2009.....	26
Gambar 4.5a Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Brebes Tahun 2005-2009.....	25
Gambar 4.5b Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Brebes Tahun 2014-2019.....	25
Gambar 4.5c Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Pati Tahun 2005-2009.....	25
Gambar 4.5d Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Pati Tahun 2014-2019.....	25
Gambar 4.6a. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2005 Kabupaten Brebes Tahun 2006-2009.....	25
Sumber: BPS Statistik Kabupaten Brebes, PDRB Brebes berbagai tahun, diolah.....	25
Gambar 4.6c Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2005 Kabupaten Pati Tahun 2006-2009.....	25
Gambar 4.6d Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Pati Tahun 2014-2019.....	25
Gambar 4.7a Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Brebes Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000.....	25
Gambar 4.7b. Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Brebes Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2009	26
Gambar 4.7c Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Pati Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2005	26
Gambar 4.7d Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Pati Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2009	26
Gambar 4.8a Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Brebes Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2015	27
Gambar 4.8b Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Brebes Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2019	27
Gambar 4.8c Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Pati Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2015	28
Gambar 4.8d. Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Pati Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2019	28
Gambar 4.9a Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kota Semarang Tahun 2005-2009	29

Gambar 4.9b Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kota Semarang Tahun 2014-2019	29
Gambar 4.9c Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Surakarta Tahun 2005-2009.....	29
Gambar 4.9d Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Surakarta Tahun 2014-2019.....	29
Gambar 4.10a Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2005 Kota Semarang Tahun 2006-2009.....	25
Gambar 4.10b Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2010 Kota Semarang Tahun 2014-2019.....	25
Gambar 4.10c Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2005 Kabupaten Surakarta Tahun 2006-2009.....	26
Gambar 4.10d Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 20210 Kabupaten Surakarta Tahun 2014-2019.....	26
Gambar 4.11a Kontribusi PDRB Sektoral Kota Semarang Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2005	25
Gambar 4.11b Kontribusi PDRB Sektoral Kota Semarang Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2009	25
Gambar 4.11c Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Surakarta Terhadap Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005	26
Gambar 4.11d Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Surakarta Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2009	26
Gambar 4.12a Kontribusi PDRB Sektoral Kota Semarang Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2015	27
Gambar 4.12b Kontribusi PDRB Sektoral Kota Semarang Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2019	27
Gambar 4.12c Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Surakarta Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2015	28
Gambar 4.12d Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Surakarta Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2019	28
Gambar 4.13a Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009.....	29
Gambar 4.13b Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus Tahun 2014- 2019.....	29
Gambar4.13c Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2009.....	29
Gambar 4.13d Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2019.....	29
Gambar 4.14a Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2005 Kabupaten Kudus Tahun 2006-2009.....	25
Gambar4.14b Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 20210 Kabupaten Kudus Tahun 2014-2019.....	25

Gambar 4.14c Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2005 Kabupaten Cilacap Tahun 2006-2009.....	26
Gambar 4.14d Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 20210 Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2019.....	26
Gambar 4.15a Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Kudus Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2005	27
Gambar 4.15b Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Kudus Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2009	27
Gambar 4.15c Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Cilacap Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2005	28
Gambar 4.15d Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Cilacap Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2009	28
Gambar 4.16a Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Kudus Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2015	29
Gambar 4.16b Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Kudus Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2019	29
Gambar 4.16c Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Cilacap Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2015	30
Gambar 4.16d Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Cilacap Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2019	30
Gambar 4.17. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.....	31
Gambar 4.18. Perkembangan Garis Kemiskinan Kab/Kota Cilacap, Surakarta, Pati, Kudus, Brebes, dan Kt Semarang	32
Gambar 4.20 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah	32
Gambar 4.21. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Cilacap, Kt Surakarta, Pati, Kudus, Brebes, dan Kt Semarang.....	33
Gambar 4.22. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah.....	33
Gambar 4.23. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Cilacap, Kt Surakarta, Pati, Kudus, Brebes, dan Kt Semarang (%)......	34
Gambar 4.24. Perkembangan Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah.....	35
Gambar 4.25.a. Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab/Kota Cilacap, Pati, Kudus, Brebes, Surakarta, dan Kt Semarang.....	36
Gambar 4.25.b. Keparahan Kemiskinan (P2) Kab/Kota Cilacap, Pati, Kudus, Brebes, Surakarta, dan Kt Semarang.....	36
Gambar 4.26. Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah	37
Gambar 4.27. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jawa tengah.....	38
Gambar 4.28. Perkembangan Indeks Gini Kab/Kota Cilacap, Kt Surakarta, Pati, Kudus, Brebes, dan Kt Semarang	38
Gambar 4.29. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Kriteria Bank Provinsi Jawa Tengah	39

Gambar 4.30. Perkembangan Ketimpangan Kriteria Bank Dunia Kab/Kota Cilacap, Kt Surakarta, Pati, Kudus, Brebes, dan Kt Semarang	40
Gambar 4.31 Rasio Pendapatan dan Retribusi Daerah thd PDRB	52
Gambar 4.32 Rasio Belanja terhadap Pendapatan daerah	54
Gambar 4.33 Belanja dan Belanja Modal Perkapita	55
Gambar 4.34. Rasio Belanja dan Belanja Modal terhadap PDRB	56
Gambar 4.35. Model 1 Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan	58
Gambar 4.36. Model 2 Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan	58
Gambar 4.37. Persepsi Narasumber mengenai Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Variabel Kinerja Perekonomian Daerah	61

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan dalam berbagai aspek baik dari tata kelembagaan pemerintahan, perencanaan perekonomian, serta perbaikan masalah sosial dan kesejahteraan. Sampai sekarang pelaksanaan otonomi daerah masih menjumpai beberapa tantangan. Bertitik tolak dari hal tersebut, penelitian ini akan mengaji secara mendalam mengenai dampak pelaksanaan otonomi daerah terhadap efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta faktor-faktor pendukung/penghambat pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mencoba melihat ada tidaknya perbedaan dampak pada daerah-daerah yang memiliki struktur ekonomi yang berbeda.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan identifikasi, eksplorasi serta evaluasi dampak otonomi daerah, dan tahap kedua akan diidentifikasi faktor yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah agar terjadi akselerasi pembangunan menuju efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kajian akan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer akan digali melalui kuesioner dan *focus group discussion* (FGD) terhadap *stakeholders*. Metode analisis tahun pertama adalah analisis deskriptif serta analisis manfaat-biaya. Pada tahap kedua akan dilakukan konfirmasi hasil temuan tahap pertama serta identifikasi faktor-faktor pendukung/penghambat pelaksanaan otonomi daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang akan digali melalui *indepth interview* dan FGD. Hasil identifikasi akan digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tahun 2001 merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan dalam berbagai aspek baik dari tata kelembagaan pemerintahan, perencanaan perekonomian, serta perbaikan masalah sosial dan kesejahteraan. Sampai sekarang pelaksanaan otonomi daerah masih menjumpai beberapa tantangan, baik dalam proses pelaksanaan di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya pemerintah untuk menyempurnakan pelaksanaan otonomi daerah adalah revisi atas UU No. 22 dan 25 tahun 1999. Pada akhir tahun 2004, pemerintah mengeluarkan UU No. 32 dan 33 tahun 2004, sebagai payung pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah sesungguhnya merupakan suatu bentuk kebijakan desentralisasi fiskal. Efek utama dari desentralisasi fiskal adalah peningkatan alokasi sumberdaya, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Bila salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadi peningkatan efisiensi ekonomi, maka evaluasi atas keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dilakukan secara seragam pada setiap provinsi maupun kabupaten/kota. Karakteristik ekonomi daerah, terutama sektor dominan dalam suatu daerah akan berpengaruh pada pola manajemen otonomi daerah. Secara umum, berdasarkan kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDRB), sektor perekonomian dapat dipisahkan menjadi tiga sektor yaitu (i) pertanian, (ii) industri pengolahan, dan (iii) jasa. Dominasi sektoral di tiap provinsi yang berbeda, sebenarnya menuntut pola manajemen otonomi daerah yang berbeda pula. Daerah-daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada komoditas *tradeables* cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun beberapa daerah yang memiliki ketergantungan pada sektor yang *non tradeables* seperti sektor jasa cenderung akan memiliki pertumbuhan yang rendah.

1.2. Tujuan khusus

Perbedaan struktur ekonomi akan berpengaruh terhadap pola kebijakan dan pengelolaan ekonomi daerah. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak otonomi daerah terhadap efisiensi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakter dan struktur ekonomi masing-masing daerah. Penelitian ini menjadi menarik karena daerah penelitian akan dibedakan berdasarkan sektor yang dominan yaitu (i) pertanian, (ii) industri pengolahan, dan (iii) jasa. Secara khusus tujuan penelitian tahap pertama adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan mengeksplorasi persepsi masyarakat mengenai dampak Desentralisasi Fiskal terhadap efisiensi ekonomi dan kesejahteraan/kondisi sosial masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan mengeksplorasi perkembangan keuangan daerah (PAD), dan indikator makro ekonomi lainnya selama pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Penelitian ini juga akan:

1. Melakukan pembobotan dan pembuatan peringkat untuk variabel-variabel kinerja ekonomi daerah menurut tingkat keterdampakannya oleh penyelenggaraan desentralisasi fiskal.
2. Mengidentifikasi sifat keterdampakan desentralisasi fiskal berdasarkan persepsi narasumber
3. Melakukan *focus group discussion* untuk mengkonfirmasi hasil temuan pada poin (1).
4. Menghasilkan rekomendasi arah kebijakan untuk mengakselerasi optimalisasi pencapaian tujuan desentralisasi fiskal

1.3. Urgensi penelitian

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya adalah pelimpahan sebagian urusan dan wewenang kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah ini bertujuan supaya daerah mampu meningkatkan inovasi pembangunan dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah ini juga berimplikasi pada penyerahan kewenang dalam hal pembiayaan dan pengalokasian anggaran, yang tentunya akan membawa implikasi yang beragam bagi perekonomian

daerah. Adanya perbedaan struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah akan membawa dampak pada perbedaan potensi penerimaan daerah dan perbedaan pengelolaan ekonomi daerah.

Karena perbedaan penerimaan dan belanja antar pemerintah daerah sejalan dengan sebaran PDRB perkapita dan struktur ekonomi (Majdi, 1997:3), maka dampak otonomi daerah ini pun akan berbeda-beda bagi antar regional. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa penerapan otonomi daerah tidak selalu membawa perbaikan distribusi pendapatan antar wilayah (Bahl dan Linn, 1994:2). Di negara sedang berkembang, penerapan otonomi daerah cenderung tidak memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan antar wilayah, bahkan dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi karena kesalahan pengelolaan ekonomi makro (Bahl dan Linn, 1992:393).

Ketimpangan kemajuan ekonomi antar wilayah dapat menjadi masalah utama dalam otonomi daerah yang menyebabkan suatu wilayah menjadi tertinggal secara struktural. Pusat pertumbuhan biasanya memiliki kesempatan untuk berkembang lebih baik dibandingkan daerah pinggiran. Kebijakan otonomi daerah sebenarnya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah agar mampu tumbuh dan berkembang. Kondisi ini dapat terjadi bila ditopang dengan kebijakan pengembangan kegiatan ekonomi yang produktif dan tepat sesuai dengan struktur ekonomi di setiap wilayah.

Dengan demikian dampak pelaksanaan otonomi daerah antar wilayah akan berbeda sesuai dengan struktur ekonomi, PDRB, dan pola pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Pemerintah daerah harus cukup jeli untuk melihat manfaat dari pelaksanaan otonomi daerah dan selalu melakukan evaluasi agar strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi sejalan dengan tujuan untuk melakukan efisiensi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, sejumlah variabel yang memiliki variasi nilai/intensitas yang menggambarkan atribut, digunakan untuk menentukan dampak dari pelaksanaan otonomi daerah terhadap efisiensi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kajian literatur sebelumnya maka variabel yang akan digunakan untuk mengevaluasi dampak dari pelaksanaan otonomi daerah dikelompokkan sebagai berikut

1. Tenaga kerja dan produktivitas
2. Infrastruktur fisik

3. Efisiensi ekonomi
4. Perbaikan kesejahteraan (ekonomi maupun sosial) masyarakat
5. Indikator makroekonomi lain dan Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Tujuan otonomi daerah secara garis besar adalah terwujudnya efisiensi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, sejauh ini belum banyak kajian terkait dengan capaian tujuan otonomi daerah, yang mengukur bagaimana sebenarnya dampak dari otonomi daerah terhadap efisiensi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat serta berbagai faktor yang mendukung serta menghambat pencapaian tujuan atau pelaksanaan otonomi daerah.
2. Penelitian ini menjadi lebih menarik dan penting, karena studi kasus akan dilakukan pada 3 Daerah yang dipilih berdasarkan struktur ekonomi yang berbeda. Perbedaan struktur ekonomi diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan kinerja antar wilayah. Melalui penelitian ini akan teridentifikasi hal-hal yang mendasar terkait pelaksanaan otonomi daerah, antara lain dampak, faktor-faktor pendukung/penghambat, dan faktor-faktor dominan.

Otonomi daerah mendorong adanya pemahaman yang lebih mendalam, karena kebijakan otonomi daerah masih dalam taraf awal. Hasil tersebut pada akhirnya dapat digunakan untuk:

1. Membantu daerah-daerah dalam melihat pelaksanaan desentralisasi fiskal dari sisi persepsi atau yang dirasakan oleh masyarakat dan ditinjau dari berbagai aspek
2. Referensi bagi pemerintah daerah untuk melakukan akselerasi pencapaian tujuan otonomi daerah sesuai dengan karakter daerah masing-masing, karena karakter yang berbeda membutuhkan manajemen yang berbeda.

3. Rekomendasi bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam perencanaan ekonomi dan pembuatan kebijakan.

BAB II. STUDI PUSTAKA

2.1. Anggaran Belanja Merupakan Salah Satu Instrument Fiskal.

Pembangunan ekonomi nasional maupun regional merupakan suatu proses yang mensyaratkan adanya peningkatan produksi riil atau pendapatan riil perkapita yang terjadi secara terus menerus (*steady growth*). Peningkatan produksi riil dapat dicapai melalui pertumbuhan produktivitas perkapita dengan mendayagunakan sumber-sumber ekonomi yang ada. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tersebut, maka pemerintah sebagai fasilitator pembangunan perlu memiliki berbagai kebijakan ekonomi yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan produktif.

Anggaran belanja merupakan salah satu instrumen fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal mempengaruhi mekanisme perekonomian melalui bekerjanya anggaran yang berfungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi (Musgrave dan Musgrave, 1989,:7-13). Banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa untuk memfasilitasi pembangunan di daerah, pemerintah sebaiknya memberi wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sendiri.

2.2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.

Ide desentralisasi fiskal sebenarnya telah muncul dalam UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sesuai dengan UUD 1945 pasal 18. Namun karena polarisasi kekuatan politik waktu itu, maka sistem sentralisasi fiskallah yang lebih kuat terjadi. Realisasi desentralisasi fiskal sebenarnya sudah dimulai sejak 25 April 1995, melalui uji coba otonomi daerah di 26 kabupaten di seluruh provinsi (kecuali DKI Jakarta). Namun secara konsisten otonomi daerah di Indonesia baru mulai dilaksanakan melalui UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. UU ini kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004. Otonomi daerah dalam konsep UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan UU".

Reformasi sistem politik yang diawali dengan jatuhnya rezim orde baru dengan sistem pemerintahan sentralistik yang digantikan dengan pemerintah desentralistik. Sistem desentralistik diharapkan lebih mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat di daerah, khususnya terkait dengan otonomi bagi daerah-daerah untuk mengelola dan mengatur sendiri pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan daerahnya dan peraturan perundang-undangan dengan menekankan prinsip bertanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas (Adisasmita, 2011). Maka dapat dikatakan bahwa tujuan desentralisasi fiskal adalah agar daerah menjadi lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan akan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi ekonomi daerah. Otonomi daerah juga dimaksudkan untuk mengembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah.

Otonomi daerah pada dasarnya sejalan dengan teori efisiensi daya saing ekonomi pasar. Neisbitt (1994) menyatakan suatu negara yang luas tidak akan mampu bersaing di pasar global secara optimal tanpa adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah penting untuk diselenggarakan karena pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh otoritas yang memiliki kontrol geografis minimal. Hal ini disebabkan karena (Litvack, Ahmad dan Bird, 1998:3):

1. Pemerintah lokal sangat mengerti kebutuhan masyarakat
2. Keputusan pemerintah daerah akan sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.
3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasinya.

Pada dasarnya otonomi daerah merupakan suatu bentuk kebijakan desentralisasi fiskal. Efek utama dari desentralisasi fiskal adalah peningkatan alokasi sumberdaya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Peningkatan efisiensi ekonomi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk (Loehr, 2001) :

1. Efisiensi produksi terhadap biaya produksi barang dan jasa. Terdapat tiga hal penting dalam mencapai efisiensi produksi yaitu (a) biaya penyediaan jasa lokal harus bersaing dengan biaya jasa standar, (b) perubahan struktural dan (c) kapabilitas daerah
2. Efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif menuntut keserasian antara pengeluaran pemerintah dengan kebutuhan/preferensi masyarakat. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan yaitu (a) pemda harus dapat mendeteksi permintaan masyarakat, (b) barang dan jasa yang disediakan oleh unit pemda seharusnya dibiayai oleh pajak/retribusi daerah dan (c) pembuat keputusan di pemda harus dapat diterima (accountabel) oleh konstituennya
3. Efisiensi fiskal. Terdapat tiga hal yang penting yaitu (a) pungutan pajak daerah harus memberikan imbalan jasa bagi masyarakat, (b) sistem finansial pemda harus mampu menciptakan stabilitas ekonomi makro. Efisiensi dapat terwujud dengan asumsi dasar bahwa pemerintah daerah dapat mengidentifikasi secara lebih tepat kebutuhan masyarakat dan memobilisasi penggunaan sumberdaya lokal sehingga memiliki dampak yang lebih spesifik (Loehr, 2001)

Pencapaian efisiensi ekonomi tersebut akan mengakibatkan daerah tersebut mampu berkompetisi di pasar global serta mencapai kemandirian ekonomi. Dengan demikian konsep otonomi daerah dapat dijadikan satu pijakan bagi daerah dalam memasuki era globalisasi karena pelaksanaan otonomi daerah akan menyebabkan daerah tersebut mampu:

1. Menciptakan kemandirian entitas publik lokal berdasar area geografi
2. Mewujudkan konsep *citizen self government* oleh warga di daerah sendiri
3. Menekan disparitas sosial ekonomi lewat penyebaran kegiatan ekonomi yang tidak hanya berpusat pada kota tertentu saja.

2.3. Public-Private Partnership (PPP).

Pencapaian efisiensi ekonomi yang sebagai akibat dari penerapan otonomi daerah diharapkan meningkatkan kemampuan daerah dalam berkompetisi di pasar global serta mencapai kemandirian ekonomi. Pertanyaan yang muncul dari keterkaitan antara otonomi daerah dengan globalisasi serta kemandirian tersebut adalah siapa yang akan menjadi pelaku dalam proses pembangunan tersebut? Bila pemberlakuan otonomi

daerah dalam era globalisasi menuntut suatu daerah kembali menata pembangunan ekonominya agar memiliki *core-competence* sehingga daerah tersebut akan mampu bertahan, berkembang dan bersaing dengan daerah lain maka diperlukan sinergi antar segenap pelaku ekonomi. Suatu konsep yang dapat digunakan adalah *Public-Private Partnership* (PPP).

Konsep PPP pertama kali muncul pada Juni 1998 di British Columbia. Konsep PPP merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam menyediakan jasa, fasilitas dan infrastruktur (www.marh.gov.bc.ca). Karakteristik dari PPP adalah kemitraan dimana terdapat *sharing* antara pemerintah dan swasta dalam bentuk investasi, resiko, tanggung jawab dan *reward*. Kemitraan tersebut tidak dibangun pada aturan dan pola tanggung jawab yang seragam, namun biasanya bervariasi antara poyek yang satu dengan yang lain. Konsep PPP dapat pula tidak hanya dipandang dari sisi *public* dan *private sector* saja. Menurut UNDP pelaku PPP dapat dikembangkan menjadi 3 unsur yaitu (Hardijanto, 2000):

1. Negara, berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif.
2. Swasta, mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.
3. Masyarakat, mewadahi interaksi sosial politik, memobilisasi kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sosial dan politik.

Konsep ini juga dikenal sebagai *triangle synergi* antara *government*, *business* dan *communities*.

Penggunaan PPP dalam pelaksanaan otonomi daerah tidaklah semudah konsepnya. Hal yang harus diingat adalah bahwa PPP sebenarnya bukan merupakan solusi *instant* dalam *mendeliver* seluruh jasa (www.marh.gov.bc.ca). Secara historis sinergi antara *public* dan *private sector* bukan hal yang mudah, karena adanya perbedaan “nilai” di antara keduanya. Konsep “*empowerment dan customer focus*” di swasta sulit diserap oleh sektor publik dan sebaliknya kepentingan swasta terhadap profit tidak selalu sejalan dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Penerapan PPP harus memperhitungkan *cost-benefit* yang muncul. Penggunaan PPP akan memberi keuntungan berupa penghematan biaya, pembagian resiko, peningkatan kualitas layanan atau pemeliharaan kualitas layanan, peningkatan pendapatan, implementasi yang lebih efisien dan adanya keuntungan ekonomis. Sedangkan resiko yang mungkin muncul adalah hilangnya kontrol dari pemda, naiknya biaya, resiko politis,

akuntabilitas yang buruk, pengurangan kualitas atau efisiensi layanan, bias dalam proses seleksi dan masalah tenaga kerja.

Walaupun pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan konsep PPP tidaklah mudah, bagaimanapun juga otonomi daerah dan globalisasi haruslah dihadapi. Untuk itu penerapan PPP yang dibarengi dengan konsep *core –competence* diharapkan dapat mereduksi resiko yang ada dan adanya perbedaan nilai yang muncul antara pihak pemerintah dan swasta.

2.4. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)

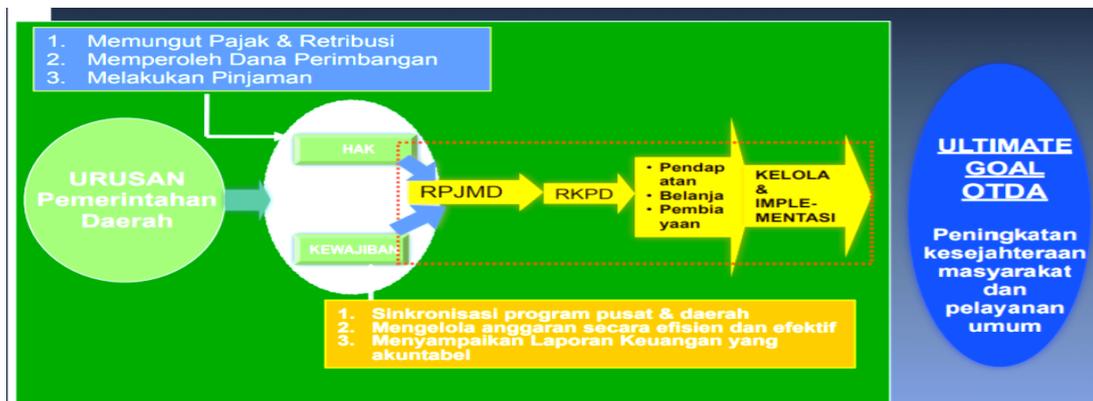
Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan makroekonomi yang sangat populer. Kebijakan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan aliran uang dalam perekonomian, yakni bagaimana aliran uang melalui sektor rumah tangga (pengeluaran Konsumsi/C), Pengeluaran melalui sektor bisnis (Investasi/I), pengeluaran melalui sektor pemerintah (Pengeluaran Pemerintah/G), dan pengeluaran melalui sektor luar negeri (X-M) diintervensi sedemikian rupa untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Salah satu instrumen yang sering digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan dengan cara pengelolaan APBN. Fungsi kebijakan fiskal meliputi fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Otonomi daerah sebagai implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam sistem pemerintasan sentralistik, Seakan-akan 'pemerintah daerah hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan, padahal kenyataannya pemerintah daerahlah yang mengetahui permasalahan di daerahnya sendiri. Pemberlakuan Desentralisasi fiskal berdampak pada pola hubungan keuangan pemerintah pusat daerah (HKPD) sebagai konsekuensi tuntutan kemandirian daerah, termasuk dalam hal keuangan.

Kerangka Hubungan Keuangan Pusat – Daerah



Gambar 2.1 Kerangka Hubungan Keuangan Pusat-Daerah



Gambar 2.2 Esensi Desentralisasi Fiskal

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian diskriptif dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Alat analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi stakeholder mengenai dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sementara itu untuk mendapatkan peringkat arah rekomendasi kebijakan akselesari otomoni daerah digunakan tehnik *Analytic Hierarchy Process (AHP)*.

Penelitian ini hendak melihat pelaksanaan desantralisasi fiskal terhadap efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta faktor-faktor pendukung/penghambat pelaksanaan desantralisasi fiskal di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, penelitian menggunakan 6 Kabupaten/kota sebagai sampel yang secara sektoral merepresentasikan kabupaten/kota dengan dominasi sektor pertanian, perdagangan dan jasa serta industri. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan dan dijabarkan dalam tahapan kegiatan penelitian.

3.2. Variable dan Definisi Operasional Variabel

Ada pun variabel dan indikator yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1) Variabel dan indikator Penelitian.

Variabel dan indikator penelitian ini dimodifikasi dari indikator kinerja kunci yang digunakan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan otonomi daerah (EKPOD) seperti pada lampiran PP Nomor 6 Tahun 2008. Modifikasi dalam hal ini diperlukan agar variabel dan indikator yang digunakan dapat dipersepsikan oleh responden. Adapun variabel dan indikator yang diajukan adalah sebagaimana disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Variabel dan Indikator Penelitian

No	Variabel	Indikator
1.	Indikator Makroekonomi lain dan APBD (diperoleh dari data sekunder)	PDRB
		PDRB perkapita
		Indeks Pembangunan manusia
		APBD dan unsur-unsurnya
2.	Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat – Daerah (HKPD)	angka kemiskinan
		Efektivitas
		Transparansi
		Akuntabilitas
3.	Disip;in Prioritas Renja	Kemandirian Daerah
		Ketepatan Alokasi Anggaran
		Ketepatan waktu/pencairan-penyerapan anggaran
4.	Efisiensi ekonomi/Produktivitas	Prioritas Rencana Kerja
		Sumberdaya Manusia (SDM)
5.	Kesejahteraan	Sumberdaya Lain (Input selain SDM)
		Infratraktur
		Fasilitas Sosial
6.	Perekonomian	Fasilitas Umum
		Pendapatan Masyarakat
		Ketimpangan antar Pendapatan
		Ketimpangan antar Wilayah
7.	Iklim Investasi	Harga barang dan Jasa
		Iklim Investasi Secara Umum
		Perijinan
		Pungutan Liar

3.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini data-data ekunder serta panduan kuesioner *The Analytic Hierarchy Process (AHP)*.

Tabel 3.2 Pengambilan Data Primer dan Responden Sasaran

No	Tingkat	Responden
	Tiap Kabupaten/Kota	• Bappeda
		• Bagian Perekonomian kabupaten/kota
		• Perbankan/lembaga keuangan
		• Asosiasi pengusaha/kadin
		• LSM bidang UMKM/industri lokal
1.	Provinsi	• Bappeda
		• Bagian Perekonomian Propinsi
		• Perbankan/lembaga keuangan
		• Asosiasi pengusaha/kadin
		• LSM bidang UMKM/industri lokal
		• Peneliti/dosen universitas lokal

Pendekatan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yakni dengan memilih responden yang dinilai kompeten sehingga mampu menyampaikan

gagasan terkait dengan topik yang diteliti dan lebih berorientasi pada tercapainya esensi tujuan penelitian. Metode yang digunakan untuk mengambil data primer adalah pendekatan kuesioner dan focus group discussion (FGD) terhadap stakeholders.

3.4. Metode Analisis

a. Analisis Deskriptif

Pendekatan analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah. Dalam metode ini digunakan berbagai pendekatan terkait dengan pengukuran kemandirian keuangan daerah. Data-data yang pengukuran kemandirian daerah berupa data sekunder antara lain APBD dengan berbagai pos, PDRB, dan Jumlah penduduk. Analisis deskriptif juga digunakan untuk menganalisis perkembangan agregat makro ekonomi terkait antara lain pertumbuhan dan struktur ekonomi, Indeks Gini, Indeks Williamson, Tingkat Kemiskinan, dan IPM. Data sekunder mencakup series data tahun 2005 – 2019. Periode tahun yang diamati tersebut pada dasarnya mencakup 2 masa sebelum dan setelah desentralisasi fiskal dengan asumsi bahwa implementasi desentralisasi fiskal dimulai dengan diterbitkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014.

b. Kapasitas Fiskal Daerah.

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

c. Rasio Kemandirian Daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Kemandirian (%)	Kategori
0 – 24	Rendah Sekali
25 – 49	Rendah
50 – 74	Sedang
75 - 100	Tinggi

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya.

e. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

f. Rasio Belanja Daerah Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah perkapita) menunjukkan seberapa besar belanja yang digunakan untuk menyejahterakan per penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilainya semakin baik. Rasio belanja modal perkapita menunjukkan seberapa besar belanja yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah per penduduk. Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja. Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.

g. Rasio Belanja Terhadap PDRB.

Rasio belanja Modal terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah (Mahmudi 2010: 165).

h. Analytical Hierarchi Process (AHP)

Metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah Analisis yang digunakan adalah *The Analytic Hierarchy Proccess (AHP)*. *The Analytic Hierarchy Proccess (AHP)*. *AHP* merupakan salah satu model untuk pengambilan keputusan yang dapat membantu kerangka berpikir manusia. Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarkhi fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Pada dasarnya *AHP* adalah metode yang memecah suatu masalah

yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu hirarkhi; memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesa ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Atau dengan kata lain, prinsip metode *AHP* adalah memberikan bobot tiap faktor, variabel, dan indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel, indikator satu dengan lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya. Dalam proses *AHP* ini dilakukan 3 tahap utama yaitu pembobotan, klasifikasi intensitas tiap indikator dan penentuan nilai intensitas tiap indikator dan peringkat sebagai berikut

1. Pembobotan terhadap faktor, variabel dan indikator, dilakukan oleh 20 orang stakeholders (responden) di tingkat propinsi dengan menggunakan kuesioner *AHP*. Hasil pembobotan 20 responden diperoleh dengan rata-rata geometris sehingga menghasilkan satu bobot yang sama.
2. Klasifikasi intensitas tiap indikator. Sebelum diolah dengan software expert choice, setiap indikator baik yang berasal dari data primer maupun sekunder diklasifikasikan untuk memperoleh intensitas masing-masing. Data-data primer yang diperoleh dari kuesioner persepsi responden (6 kabupaten) diolah dengan bantuan SPSS atau Exel sehingga diperoleh tabulasi yang menunjukkan intensitas tiap-tiap indikator berdasarkan pemeringkatan. Intensitas tersebut berupa skala likert 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan ukuran dari kondisi yang paling buruk (sangat menghambat) sampai kondisi yang paling baik (sangat mendukung). Indikator-indikator kuantitatif berupa data sekunder (existing statistics data), masing masing juga diklasifikasikan dengan menggunakan 'metode rata rata' dan 'metode distribusi' sehingga diperoleh intensitasnya ke dalam skala likert yang sama. Daftar intensitas indikator-indikator yang berasal hasil olahan data primer berupa persepsi pelaku usaha tersebut di atas, dijadikan bahan masukan bagi peneliti untuk memperoleh intensitas akhir setiap indikator. Keputusan akhir atas intensitas setiap indikator dari panelis inilah yang selanjutnya akan diolah dengan menggunakan perangkat lunak 'expert choice' untuk mendapatkan nilai intensitas tiap indikator dan peringkat.

3. Penentuan nilai intensitas tiap indikator dan peringkat. Intensitas masing masing indikator kemudian dimasukkan ke dalam data base perangkat lunak 'expert choice' berdasar hirarki dan bobot pemeringkatan yang telah ditentukan sebelumnya. Olahan perangkat lunak tersebut menghasilkan nilai masing masing indikator yang secara kumulatif membentuk urutan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai yang terendah.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan dan Struktur Perekonomian

4.1.1. Perkembangan dan struktur Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Analisis ini secara rinci akan melihat pertumbuhan PDRB baik secara keseluruhan maupun per sektor, kontribusi per sektor terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten/ kota yang mewakili karakteristik perekonomian. Beberapa kabupaten/ kota tersebut meliputi: Kota Cilacap dan Kabupaten Kudus sebagai cerminan karakteristik perekonomian yang didominasi Sektor Industri Pengolahan, Kota Semarang dan Kabupaten Kt Surakarta sebagai Kabupaten/ kota dengan dominasi perdagangan serta Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pati sebagai perwakilan kabupaten/kota dengan karakteristik pertanian.

Analisis dilakukan untuk melihat apakah terjadi perbedaan pada struktur maupun perkembangan PDRB sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah dan setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Analisis ini dilakukan dengan mengambil tahun 2005 hingga 2009 sebagai gambaran situasi sebelum Undang-Undang tersebut berlaku dan tahun 2013 hingga tahun 2019 sebagai gambaran kondisi ekonomi setelah berlakunya undang-undang tersebut. Tahun 2010 hingga 2013 tidak ikut dianalisis dengan pertimbangan tahun tersebut adalah tahun penyesuaian, sehingga daerah memiliki kewenangan penuh dimulai pada tahun 2014. Perbandingan kondisi sebelum dan setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 dimaksudkan untuk melihat dampak penerapan otonomi daerah terkait struktur dan kondisi pendapatan domestik regional bruto.

a. Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Tengah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan ekonomi suatu wilayah. PDRB dimaknai sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/ *region* tertentu dalam kurun waktu tertentu dalam hal ini adalah satu tahun. Perkembangan PRDB mencerminkan meningkatnya kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa. Tabel 1 menampilkan data PDRB Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun

2005- 2010 serta tahun 2014-2019 baik untuk PDRB berdasar harga konstan maupun harga berlaku.

Tabel 4.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah atas dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005- 2010

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2005	2006	2007(r)	2008	2009
Pertanian	29.924,64	31.002,20	31.862,70	32.880,71	34.101,15
Pertambangan dan Galian	1.454,23	1.678,30	1.782,89	1.851,19	1.952,87
Industri Pengolahan	46.105,71	48.189,13	50.870,79	55.348,96	57.444,19
Listrik, Gas dan Air Bersih	1.179,89	1.256,43	1.340,85	1.408,67	1.489,55
Bangunan	7.960,95	8.446,57	9.055,73	9.647,59	10.300,65
Perdagangan, Hotel dan Restoran	30.056,96	31.816,44	33.898,01	35.226,20	37.766,36
Pengangkutan dan Komunikasi	6.988,43	7.451,51	8.052,60	8.581,54	9.192,95
Bank/Lembaga Keuangan Lainnya	5.067,67	5.399,61	5.767,34	6.218,05	6.701,53
Jasa-jasa	14.312,74	15.442,47	16.479,36	16.871,57	17.724,22
PDRB Konstan	29.924,64	31.002,20	31.862,70	32.880,71	34.101,15

Sumber : (BPS Statistik Jawa Tengah) PDRB Jawa Tengah Tahun 2009,2010,2011

Tahun(r) = angka direvisi

Tabel 4.2. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah atas dasar Harga Berlaku Tahun 2005- 2010 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2005	2006	2007(r)	2008	2009
Pertanian	44.806,49	57.364,98	63.832,14	72.862,99	79.342,55
Pertambangan dan Galian	2.276,91	2.869,48	3.109,57	3.514,55	3.852,80
Industri Pengolahan	79.037,44	92.646,43	100.426,11	125.006,77	130.352,15
Listrik, Gas dan Air Bersih	2.815,65	3.153,23	3.416,36	3.749,44	4.114,52
Bangunan	13.517,73	15.962,32	18.113,00	21.196,20	24.448,72
Perdagangan, Hotel dan Restoran	46.694,12	55.362,79	62.277,99	71.617,05	78.262,54
Pengangkutan dan Komunikasi	13.852,02	16.801,49	18.360,56	21.091,61	23.836,79
Bank/Lembaga Keuangan Lainnya	8.339,49	9.592,40	10.821,69	12.617,10	14.447,44
Jasa-jasa	23.095,46	28.243,58	32.071,37	35.480,34	39.246,43
PDRB Berlaku	234.435,32	281.996,71	312.428,81	367.136,04	397.903,94

Sumber : (BPS Statistik Jawa Tengah) PDRB Jawa Tengah Tahun 2009,2010,2011

Tahun(r) = angka direvisi

Tabel 4.1 dan tabel 4.2 membandingkan PDRB Tahun 2005-2010 dengan harga konstan 2000 dan harga berlaku, sedangkan tabel 4.3 dan tabel 4.4 menunjukkan

perbandingan PDRB Tahun 2014-2019 dengan harga konstan 2010 dan harga berlaku. Berdasarkan tabel- tabel tersebut didapati bahwa terdapat selisih yang cukup besar antara PDRB harga konstan dan harga berlaku pada tahun 2014-2019 dibandingkan tahun 2005-2010, hal ini berarti pengaruh inflasi jauh lebih tinggi pada tahun 2014-2019.

Tabel 4.3. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah atas dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2014- 2019 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	107.793,38	113.826,30	116.331,12	118.450,17	121.554,48	123.195,69
Pertambangan dan Penggalian	15.566,65	16.278,16	19.367,60	20.356,48	20.855,98	21.557,12
Industri Pengolahan	271.526,77	284.306,59	295.960,84	308.770,22	322.143,29	338.820,38
Pengadaan Listrik dan Gas	866,49	887,58	928,11	976,55	1.028,92	1.085,27
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	567,98	577,26	589,81	628,21	658,88	687,51
Konstruksi	76.681,88	81.286,11	86.589,00	92.762,02	98.393,74	103.262,32
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	110.899,19	115.430,12	121.970,81	129.133,51	136.581,24	144.729,67
Transportasi dan Pergudangan	24.868,28	26.780,92	28.097,07	29.867,33	32.121,01	34.848,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.471,64	25.064,28	26.633,47	28.350,13	30.660,79	33.442,26
Informasi dan Komunikasi	30.130,16	33.001,27	35.742,56	40.485,50	45.500,92	50.789,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	20.106,85	21.636,63	23.533,41	24.749,92	25.635,55	26.535,01
Real Estate	13.776,86	14.822,30	15.831,48	16.856,96	17.797,50	18.782,40
Jasa Perusahaan	2.526,62	2.741,14	3.032,33	3.296,66	3.609,30	3.989,82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21.075,65	22.194,69	22.720,44	23.304,54	24.137,86	25.033,50
Jasa Pendidikan	27.266,22	29.324,08	31.479,47	33.674,59	36.286,32	39.040,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.916,71	6.307,62	6.929,50	7.525,67	8.187,91	8.738,37
Jasa lainnya	11.917,82	12.300,03	13.362,35	14.561,84	15.937,47	17.375,66
PDRB Konstan 2010	764.959,15	806.765,09	849.099,35	893.750,30	941.091,14	991.913,12

Sumber : BPS Statistik Provinsi Jawa Tengah

Tahun* = angka sementara

Tahun** = angka sangat sementara

Tabel 4.4. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah atas dasar Harga Berlaku Tahun 2014- 2019 (Juta Rupiah)

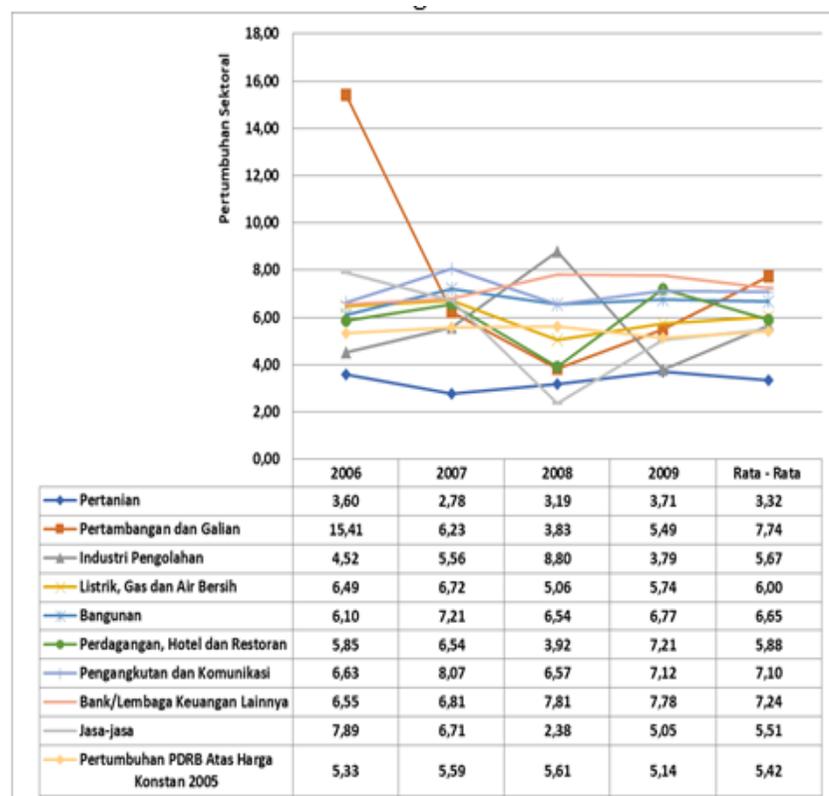
LAPANGAN USAHA	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	140.435,09	157.201,72	164.512,01	168.806,52	178.352,88	184.225,13
Pertambangan dan Penggalian	19.653,82	23.228,24	27.479,90	29.938,77	32.321,26	33.727,57
Industri Pengolahan	329.025,31	354.642,14	377.237,31	405.586,12	436.424,70	468.884,82
Pengadaan Listrik dan Gas	842,92	906,76	988,65	1.128,08	1.225,34	1.294,44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	601,32	632,70	659,34	706,83	743,87	790,46
Konstruksi	93.449,79	103.406,45	111.884,56	122.936,71	136.153,70	147.205,58
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	124.942,79	135.033,87	146.523,16	159.276,19	172.944,07	187.064,45
Transportasi dan Pergudangan	27.668,16	31.783,64	33.786,52	36.449,00	39.583,09	43.833,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27.787,79	30.968,36	33.658,31	36.204,67	39.498,49	43.634,69
Informasi dan Komunikasi	28.403,00	30.511,26	33.075,35	39.125,73	43.963,89	49.587,27
Jasa Keuangan dan Asuransi	25.534,86	28.518,19	31.865,32	34.964,64	37.488,38	39.406,40
Real Estate	15.037,14	16.749,47	18.172,33	19.836,97	21.450,33	22.920,25
Jasa Perusahaan	3.018,35	3.448,32	3.957,05	4.465,11	5.021,62	5.712,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	26.406,08	28.925,62	31.233,11	33.086,00	34.653,13	36.431,29
Jasa Pendidikan	38.446,23	41.989,36	46.454,03	51.741,34	56.951,69	62.396,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.537,88	8.404,00	9.307,25	10.258,53	11.283,42	12.275,40
Jasa lainnya	13.680,63	14.636,52	16.522,48	18.283,30	20.201,31	22.176,97
PDRB Berlaku	922.471,18	1.010.986,64	1.087.316,68	1.172.794,52	1.268.261,17	1.361.567,36

Sumber : (BPS Statistik Provinsi Jawa Tengah) PDRB Provinsi Jawa Tengah Seri 2010 ADHB

Tahun* = angka sementara

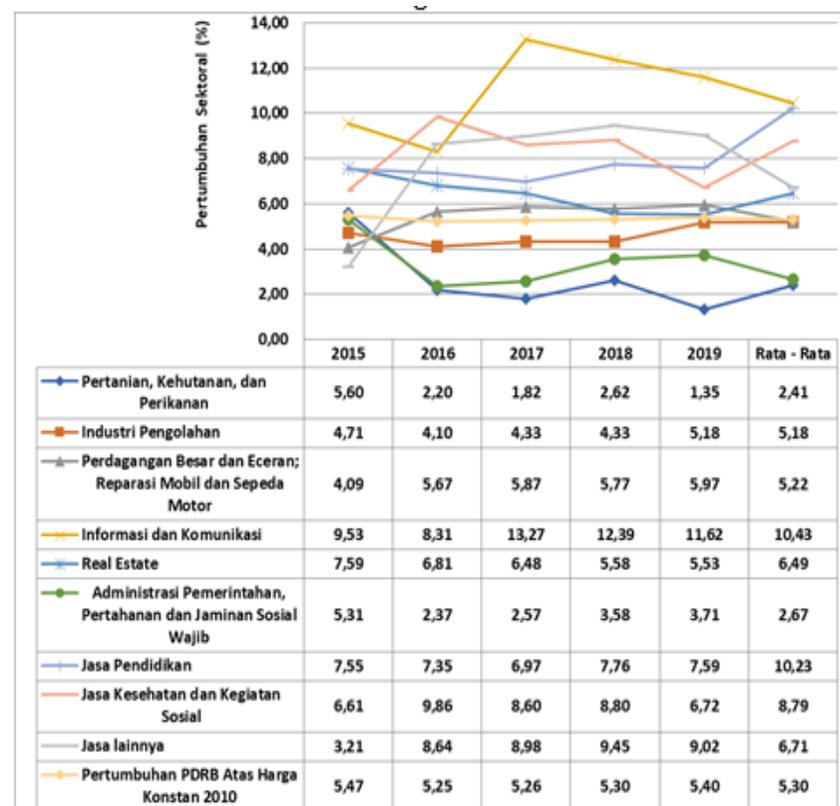
Tahun** = angka sangat sementara

Tabel 4.5. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2010 Atas dasar harga konstan 2000



Sumber: (BPS Statistik Provinsi Jawa Tengah) PDRB Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun, diolah

Tabel 4.6. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 Atas dasar harga Konstan 2010

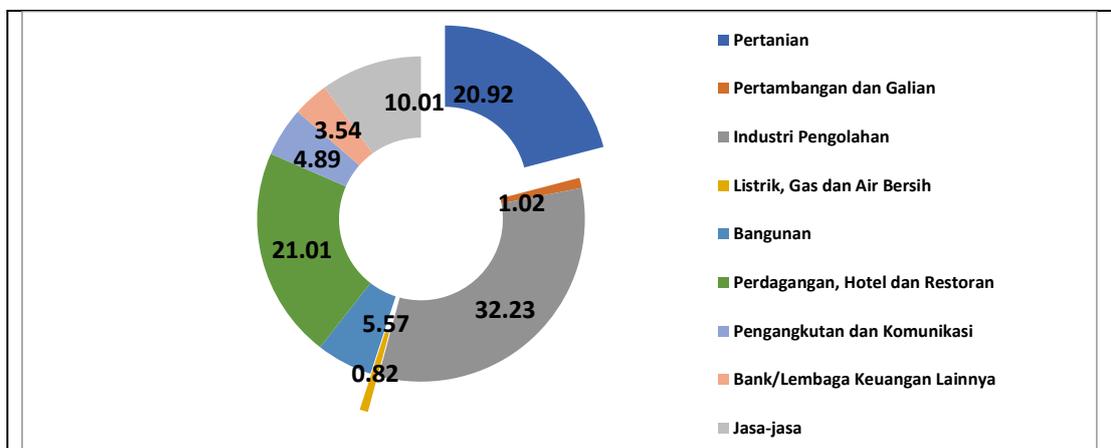


Sumber: (BPS Statistik Provinsi Jawa Tengah) PDRB Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun, diolah

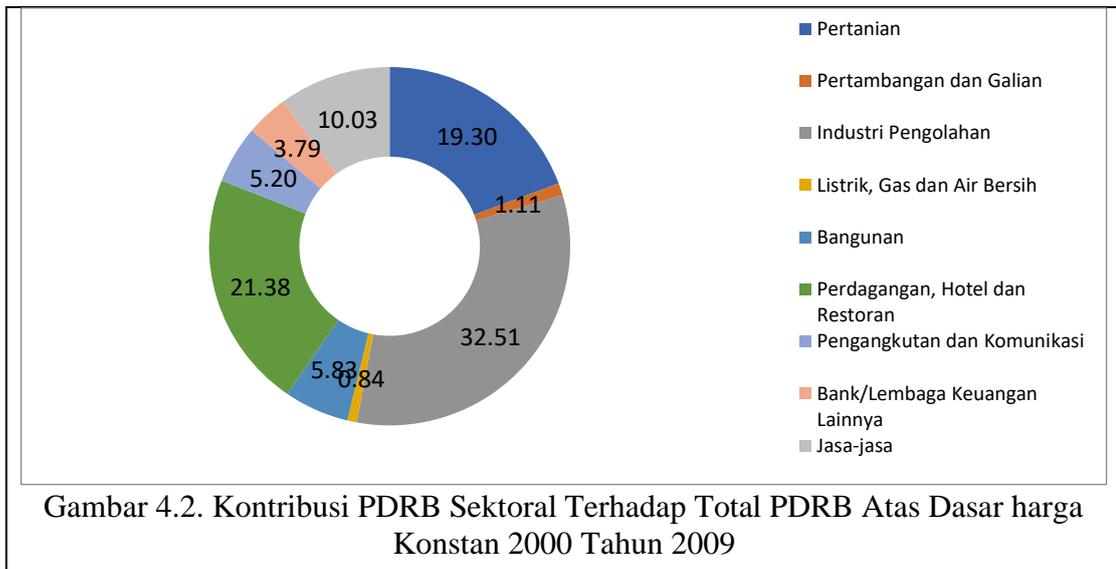
Pertumbuhan PDRB Tahun 2014- 2019 apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Tahun 2005-2010 menunjukkan perubahan yang signifikan di sektor pertanian. Sekalipun secara rata-rata pertumbuhan setiap sektor ataupun total pertumbuhan keseluruhan sektor cenderung stabil, namun pada sektor pertanian yang awalnya pada tahun 2006 hingga 2009 memiliki trend yang meningkat, mengalami perubahan trend dari tahun 2015 hingga 2019 yang menunjukkan trend yang menurun.

b. Kontribusi Sektoral Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1a hingga 1d menunjukkan kontribusi tiap sektor terhadap total PDRB Jawa Tengah. Bila dicermati terdapat tiga sektor yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDRB) Jawa Tengah di tahun 2005, 2009 yaitu Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Pertanian (lihat gambar 1a dan 1b).



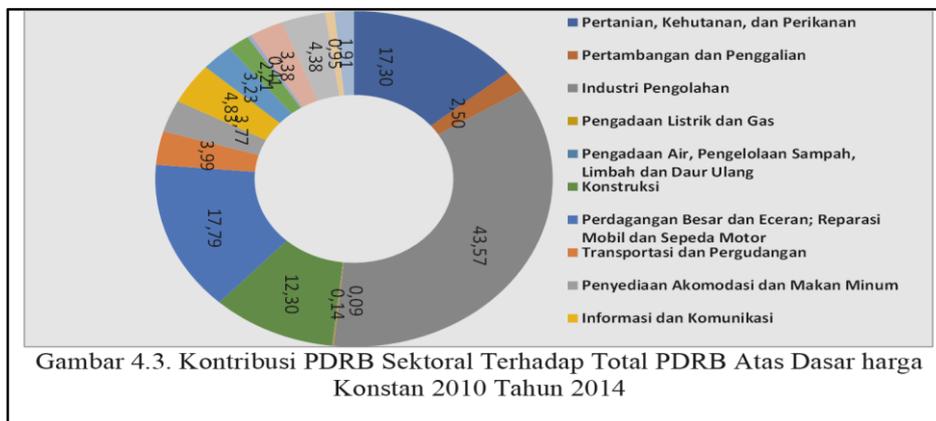
Gambar 4.1. Kontribusi PDRB Sektoral Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2005



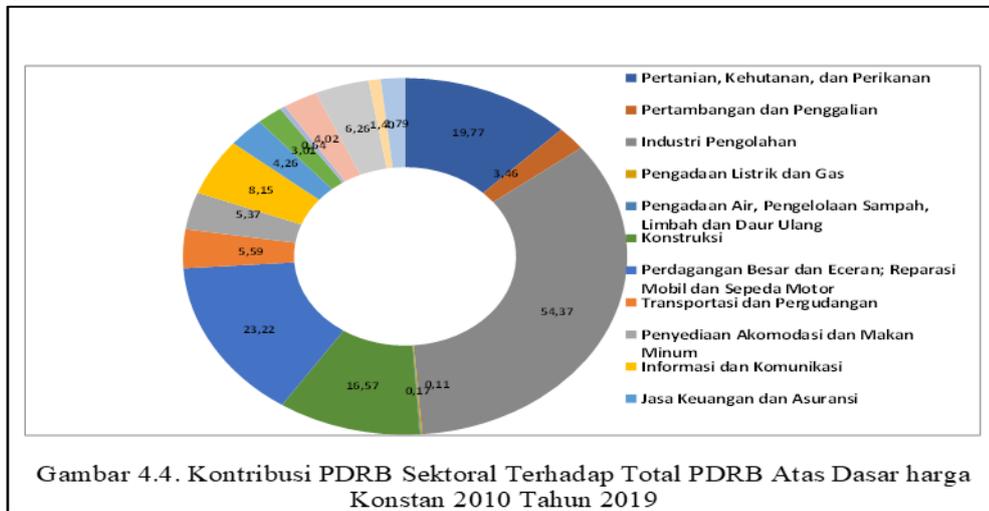
Sumber: (BPS Statistik Provinsi Jawa Tengah) PDRB Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun, diolah

Pada Tahun 2014 dan 2019 dominasi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB tidak mengalami perubahan, yaitu masih tetap didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (lihat gambar 4.3 dan 4.4)

Tiga sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB tidak mengalami perubahan, yang menjadi sorotan adalah besaran kontribusi makin didominasi oleh Industri Pengolahan hingga tahun 2019 mencapai lebih dari 50 persen keseluruhan PDRB Jawa Tengah, sedangkan dominasi sektor lainnya makin mengecil.



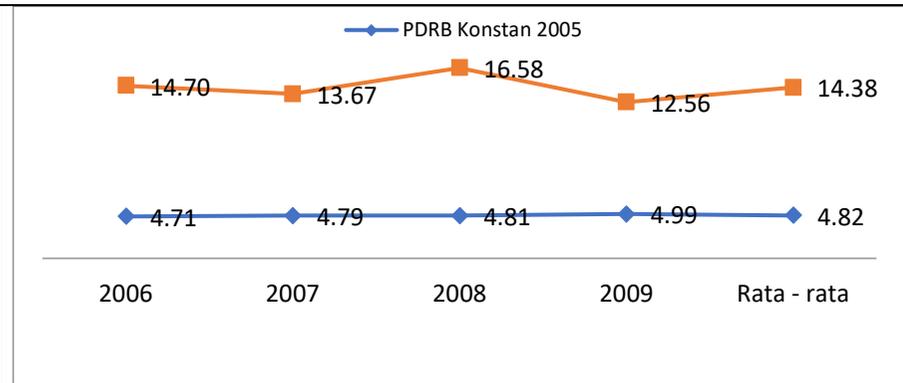
Sumber: (BPS Statistik Provinsi Jawa Tengah) PDRB Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun, diolah



Sumber: (BPS Statistik Provinsi Jawa Tengah) PDRB Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun, diolah

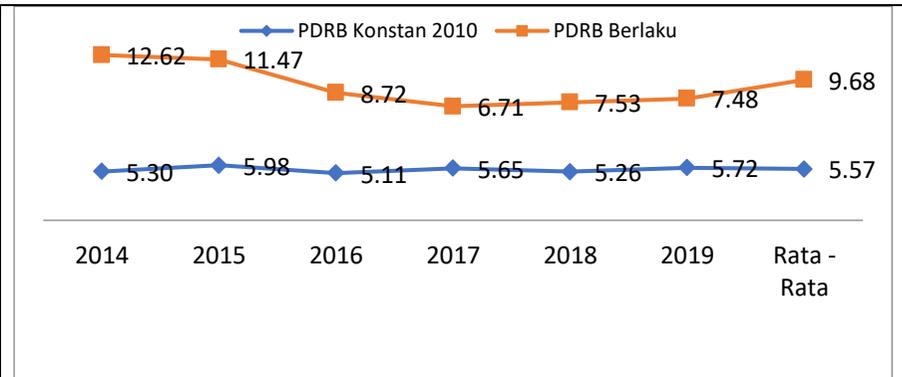
4.1.2. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten dengan Dominasi Sektor Pertanian: Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pati

Gambar 4.5a hingga 4.5d menampilkan pertumbuhan PDRB tahun 2005 hingga 2009 dan tahun 2014 hingga 2019 untuk Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pati. Pada gambar terlihat baik pada Kabupaten Brebes ataupun Kabupaten Pati selisih antara pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dengan PDRB atas dasar harga berlaku lebih kecil pada tahun 2014 hingga 2019 dibanding Tahun 2005-2009. Hal ini menunjukkan tahun 2014-2019 efek inflasi lebih kecil dibanding tahun 2005-2009.



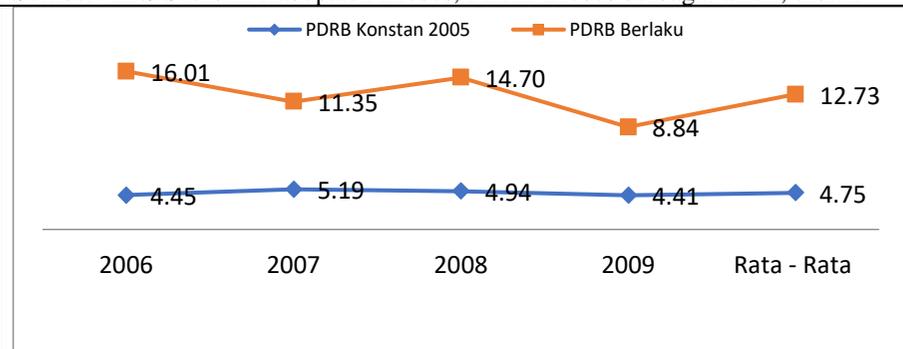
Gambar 4.5a Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Brebes Tahun 2005-2009

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Brebes, PDRB Brebes berbagai tahun, diolah



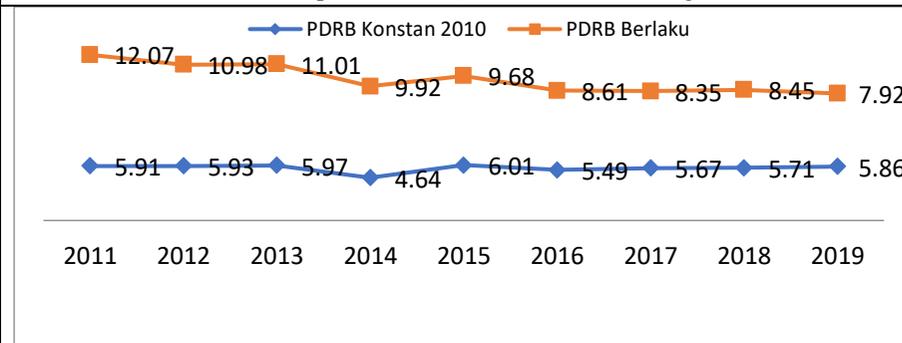
Gambar 4.5b Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Brebes Tahun 2014-2019

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Brebes, PDRB Brebes berbagai tahun, diolah



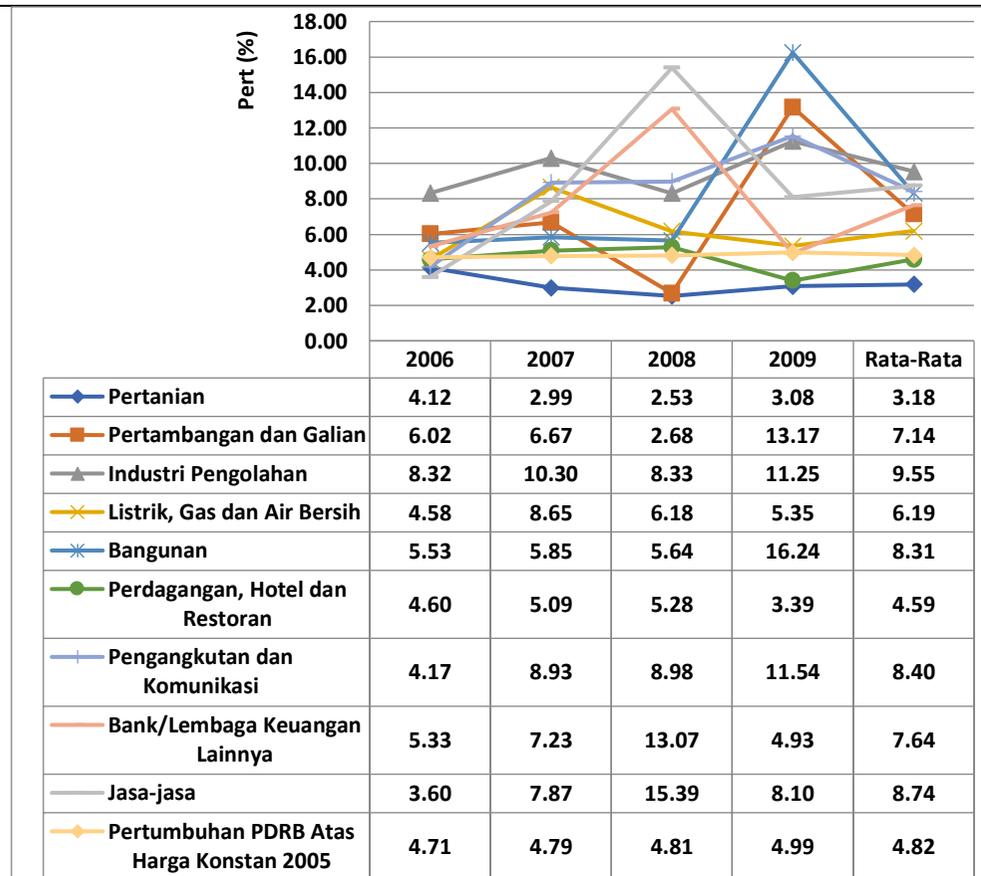
Gambar 4.5c Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Pati Tahun 2005-2009

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Pati, PDRB Pati berbagai tahun, diolah



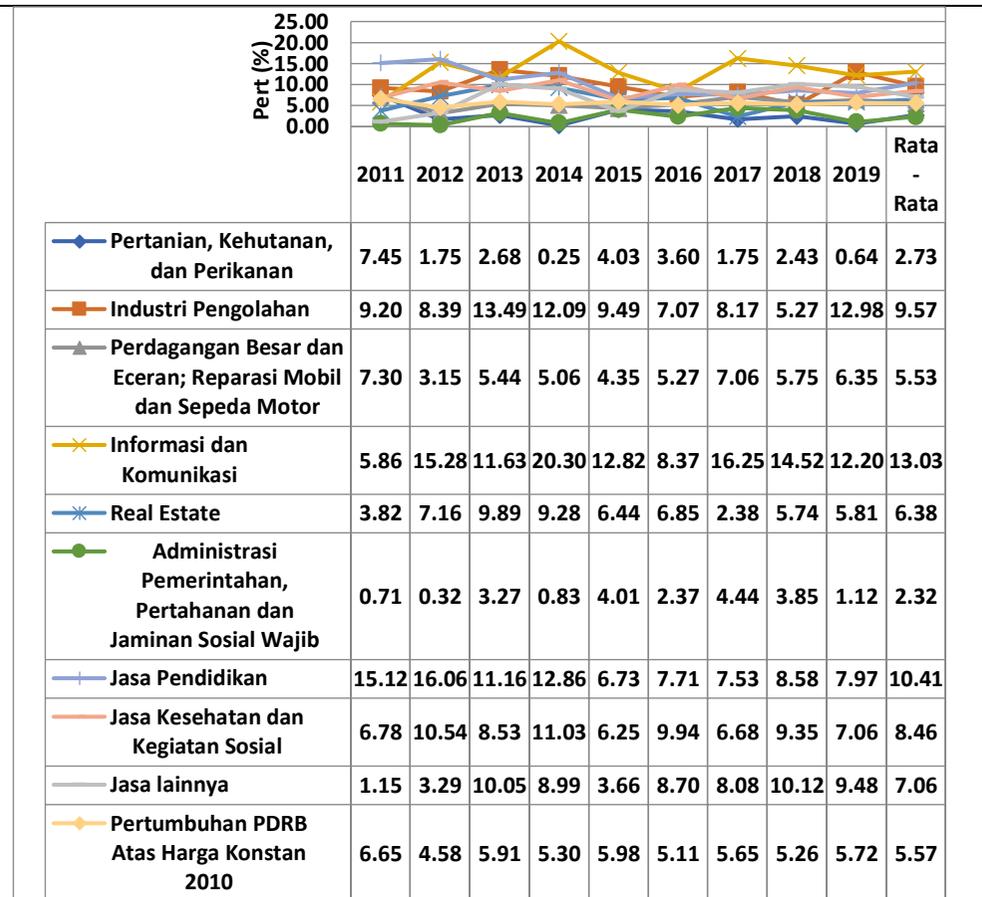
Gambar 4.5d Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Pati Tahun 2014-2019

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Pati, PDRB Pati berbagai tahun, diolah



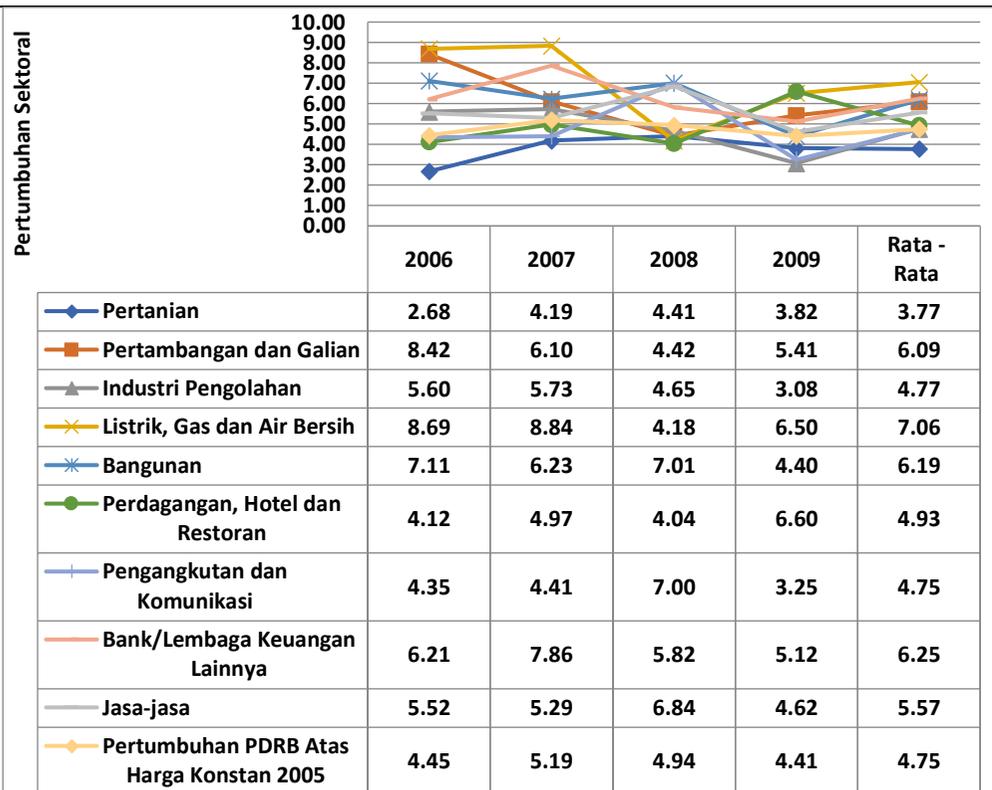
Gambar 4.6a. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2005 Kabupaten Brebes Tahun 2006-2009

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Brebes, PDRB Brebes berbagai tahun, diolah



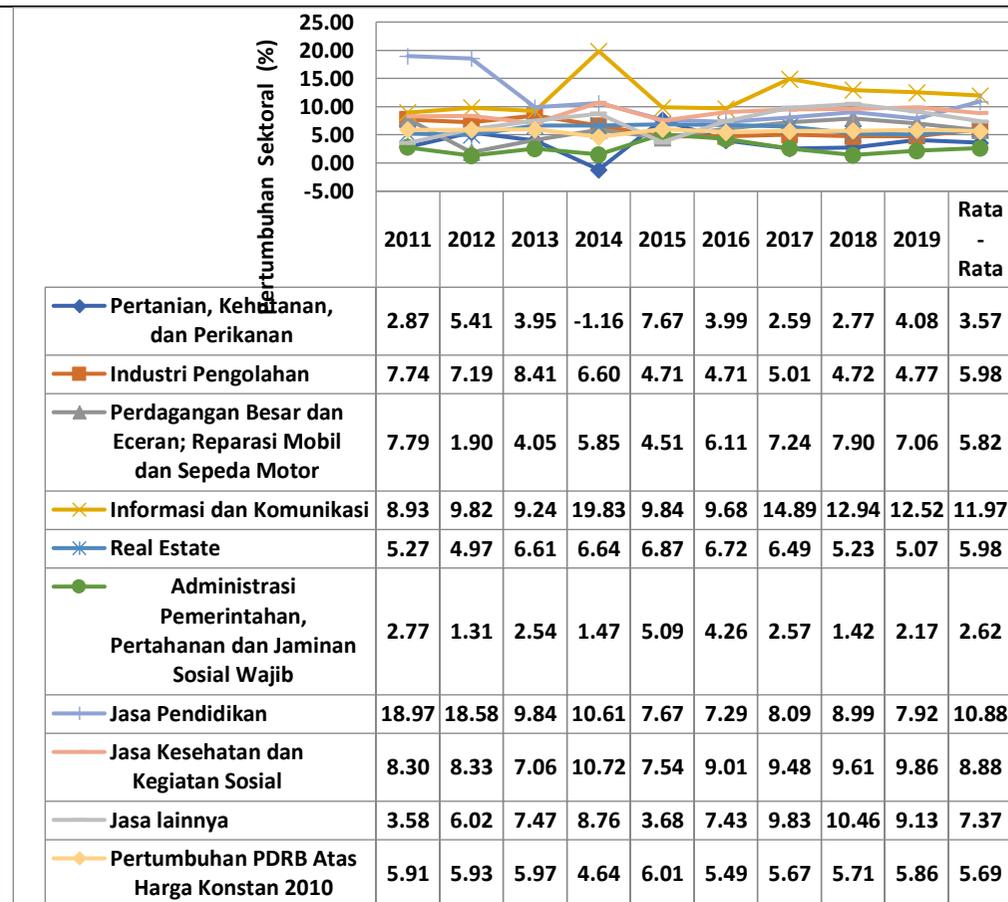
Gambar 4.6b Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Brebes Tahun 2014-2019

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Brebes, PDRB Brebes berbagai tahun, diolah



Gambar 4.6c Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2005 Kabupaten Pati Tahun 2006-2009

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Pati, PDRB Pati berbagai tahun, diolah

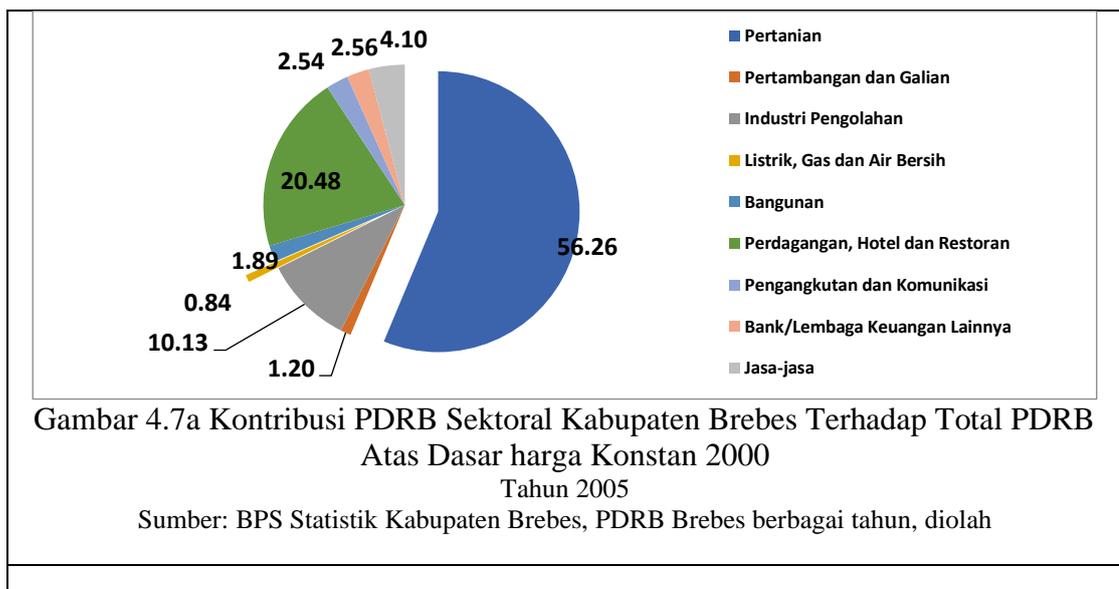


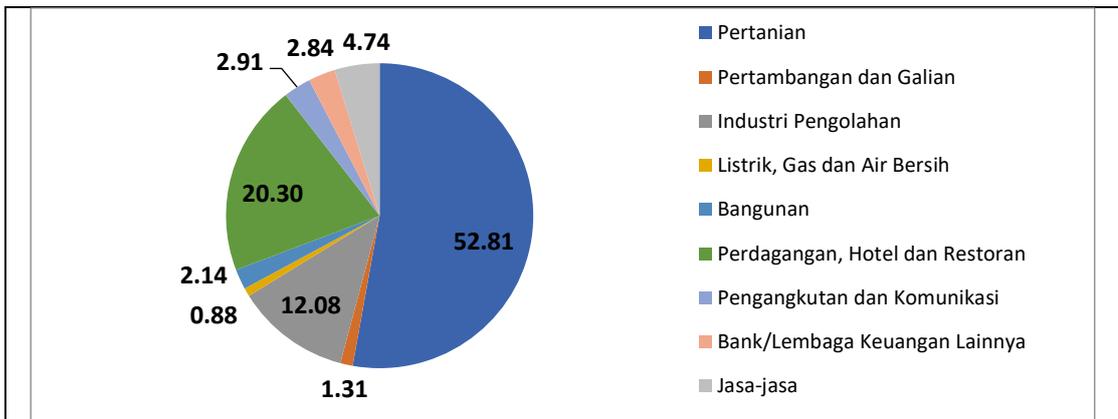
Gambar 4.6d Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Pati Tahun 2014-2019

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Pati, PDRB Pati berbagai tahun, diolah

Lebih spesifik terkait pertumbuhan PDRB adalah dengan melihat pertumbuhan per sektor nya. Melalui gambar 4.6a hingga 4.6d dapat diketahui bahwa pertumbuhan sektor pertanian baik sebelum maupun setelah desentralisasi di Kabupaten Brebes cenderung menurun, namun kecepatan penurunan terjadi semakin cepat setelah desentralisasi. Sedangkan pada Kabupaten Pati, sektor pertanian pertumbuhannya cenderung fluktuatif, sempat mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun 2014, namun stabil kembali setelah tahun 2014. Hal ini menunjukkan tidak ada perubahan yang berarti dengan diberlakukannya desentralisasi terhadap pertumbuhan sektoral khususnya sektor pertanian.

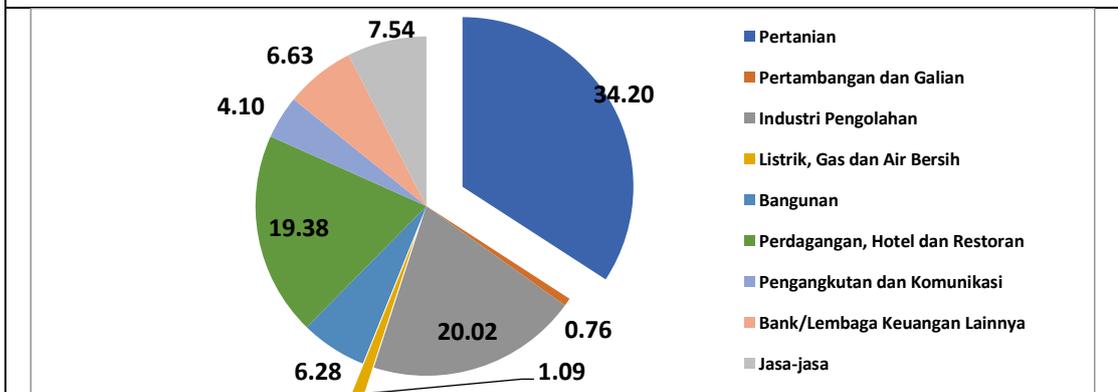
Gambar 4.7a. hingga 4.7d menampilkan kontribusi sektoral PDRB tahun 2005 dan Tahun 2009, sedangkan gambar 5a hingga 5d menampilkan kontribusi sektoral tahun 2014 hingga 2019 untuk Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pati sebagai sampel Kabupaten dengan dominasi sektor pertanian. Pada gambar terlihat 4.8a hingga 4.8d terlihat sektor pertanian selalu menjadi sektor utama penyumbang PDRB, namun baik Kabupaten Brebes maupun Kabupaten Pati, kontribusi sektor pertanian menurun di tahun 2009 dibanding tahun 2005.





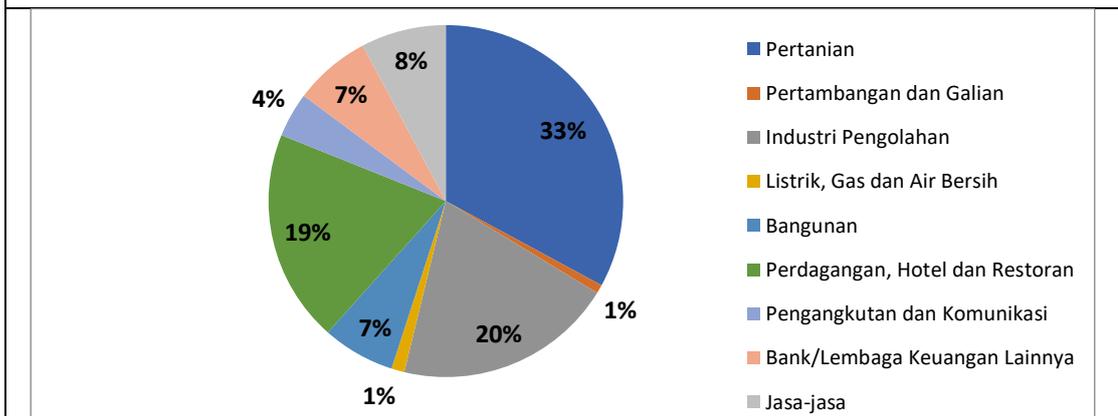
Gambar 4.7b. Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Brebes Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2009

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Brebes, PDRB Brebes berbagai tahun, diolah



Gambar 4.7c Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Pati Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2005

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Pati, PDRB Pati berbagai tahun, diolah

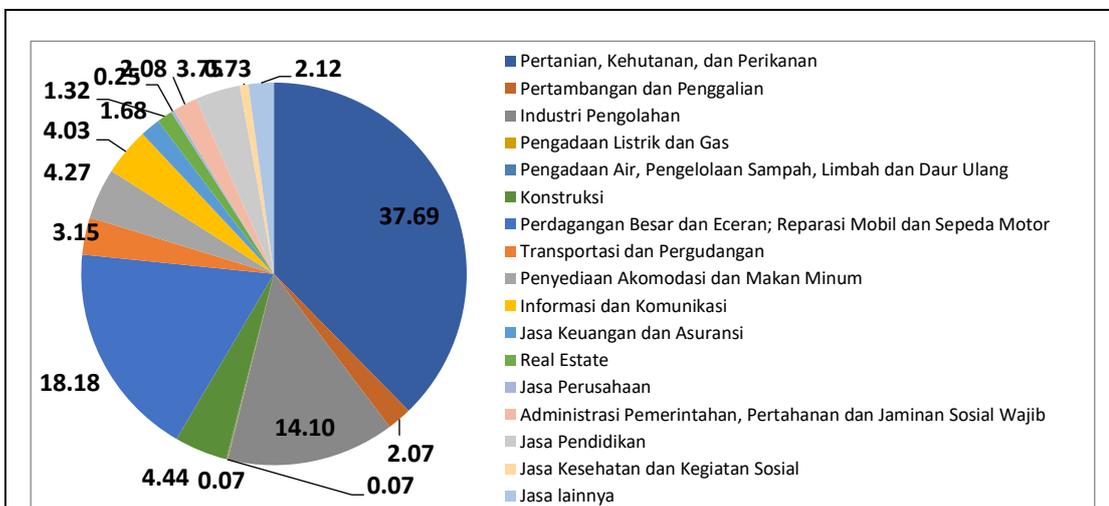


Gambar 4.7d Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Pati Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2009

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Pati, PDRB Pati berbagai tahun, diolah

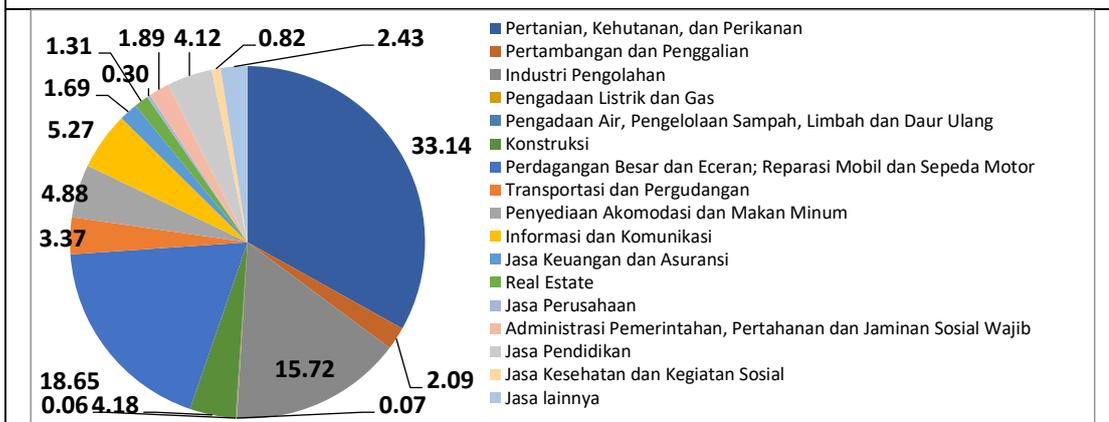
Kontribusi Sektoral Setelah Desentralisasi (Tahun 2015, 2019)

Gambar 5a hingga 5d menunjukkan kontribusi sektoral Kabupaten Pati yang pada tahun 2005 hingga 2009 didominasi sektor pertanian, pada tahun 2015 - 2019 sektor pertanian menjadi penyumbang ke-2 terbesar pembentukan PDRD, sedangkan sektor yang menjadi penyumbang ke-1 tertinggi adalah industri pengolahan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan signifikan komposisi penyusun PDRB setelah desentralisasi.



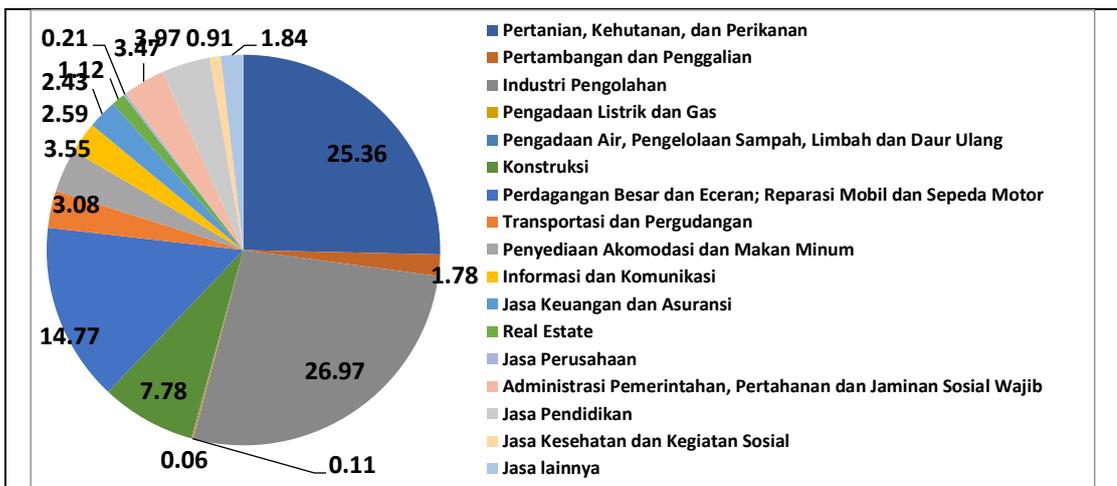
Gambar 4.8a Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Brebes Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2015

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Brebes, PDRB Kabupaten Brebes berbagai tahun, diolah



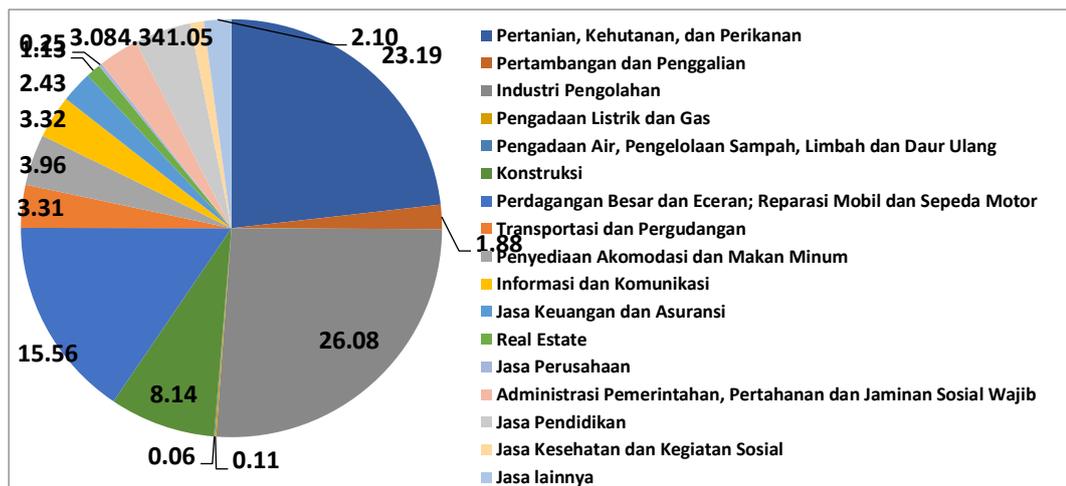
Gambar 4.8b Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Brebes Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2019

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Brebes, PDRB Kabupaten Brebes berbagai tahun, diolah



Gambar 4.8c Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Pati Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2015

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Pati, PDRB Kabupaten Pati berbagai tahun, diolah



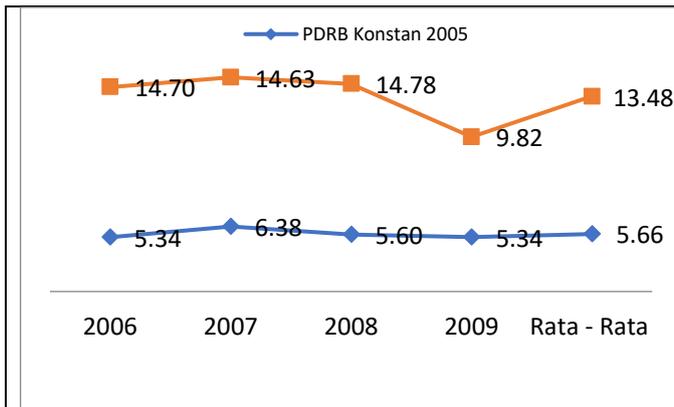
Gambar 4.8d. Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Pati Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2019

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Pati, PDRB Kabupaten Pati berbagai tahun, diolah

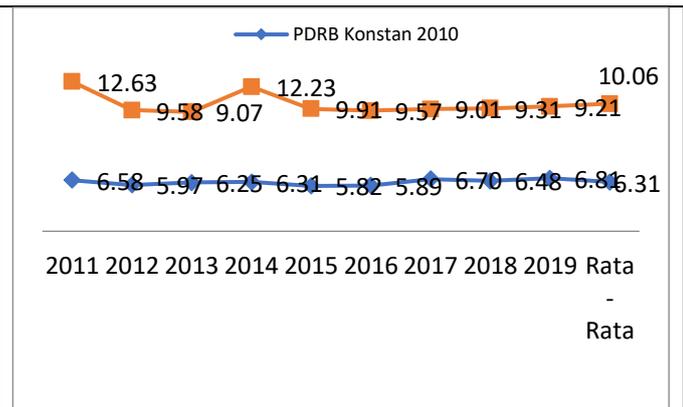
4.1.3. Analisis Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten dengan Dominasi Sektor Perdagangan: Kota Semarang dan Kabupaten Surakarta

Gambar 4.9a hingga 4.9b menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Kota Semarang tahun 2014 hingga 2019 memiliki selisih yang lebih kecil antara PDRB atas dasar harga konstan dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Hal ini berarti pada Kota Semarang efek inflasi juga dirasa lebih rendah pada tahun 2014-2019

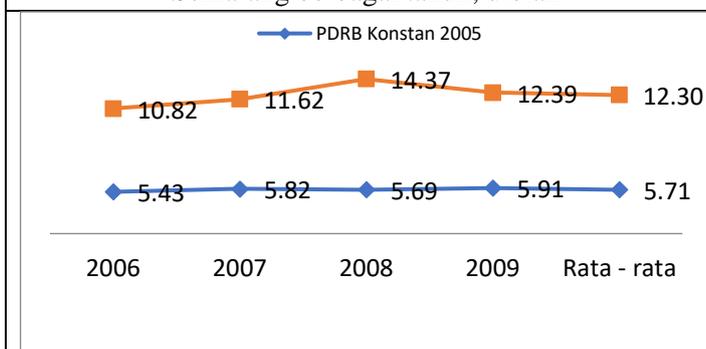
dibanding tahun 2005-2009. Berbeda dengan Kota Semarang, Kota Surakarta menunjukkan hal sebaliknya, pada tahun 2014-2019 justru selisih antara PDRB atas dasar harga konstan dengan PDRB atas dasar harga berlaku menjadi lebih besar dibanding tahun 2005-2009.



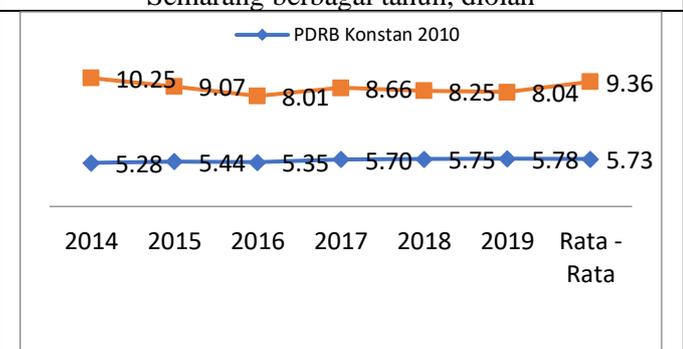
Gambar 4.9a Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kota Semarang Tahun 2005-2009
Sumber: BPS Statistik Kota Semarang, PDRB Kota Semarang berbagai tahun, diolah



Gambar 4.9b Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kota Semarang Tahun 2014-2019
Sumber: BPS Statistik Kota Semarang, PDRB Kota Semarang berbagai tahun, diolah



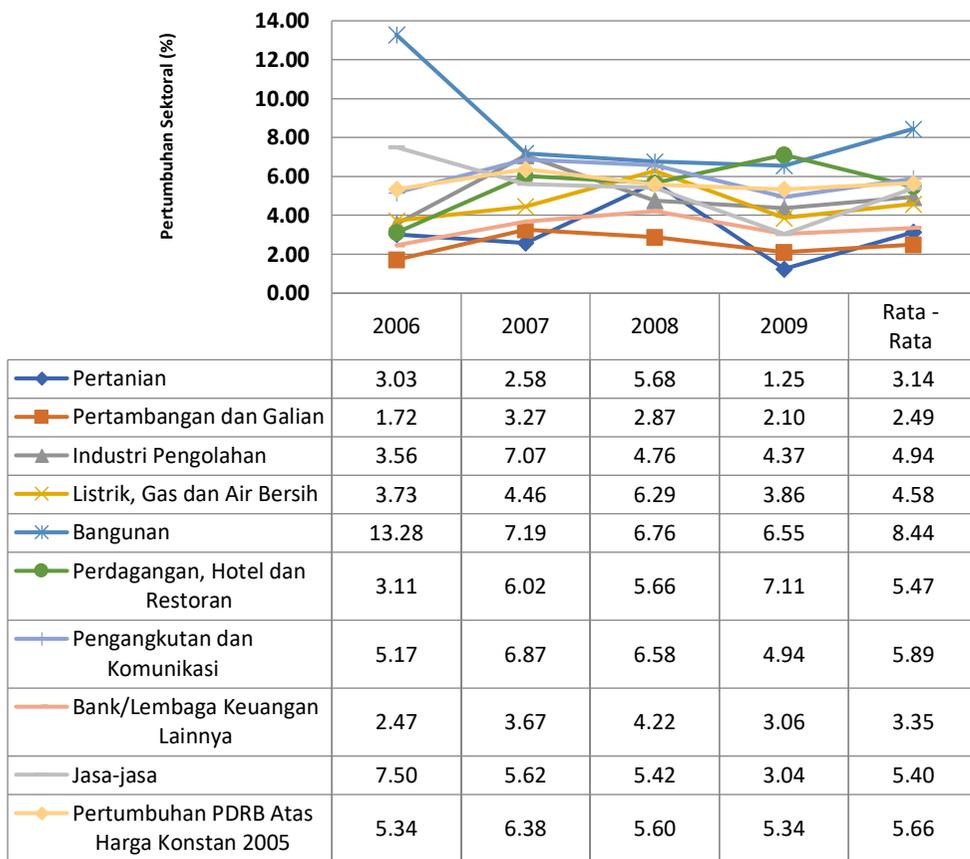
Gambar 4.9c Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Surakarta Tahun 2005-2009
Sumber: BPS Statistik Kabupaten Surakarta, PDRB Surakarta berbagai tahun, diolah



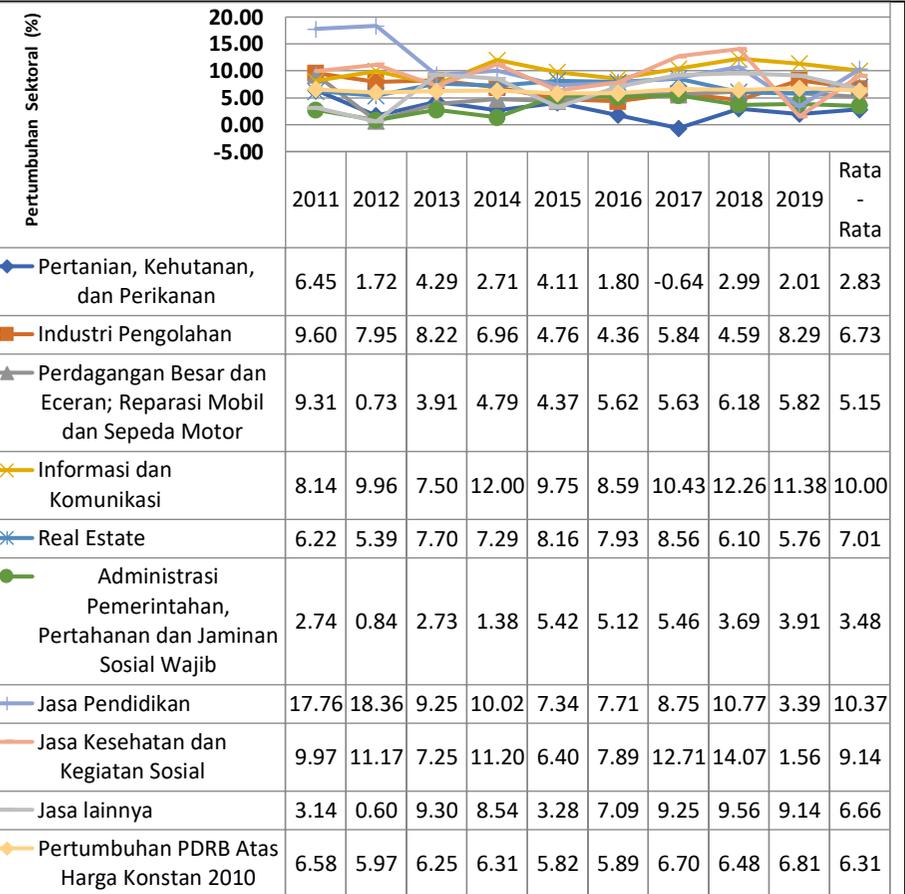
Gambar 4.9d Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Surakarta Tahun 2014-2019
Sumber: BPS Statistik Kabupaten Surakarta, PDRB Surakarta berbagai tahun, diolah

Pertumbuhan per sektor Kota Semarang dan Kabupaten Surakarta hendak melihat secara spesifik pertumbuhan sektoral khususnya pada sektor Perdagangan. Pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Semarang baik sebelum maupun setelah desentralisasi terus mengalami peningkatan, namun demikian peningkatan lebih

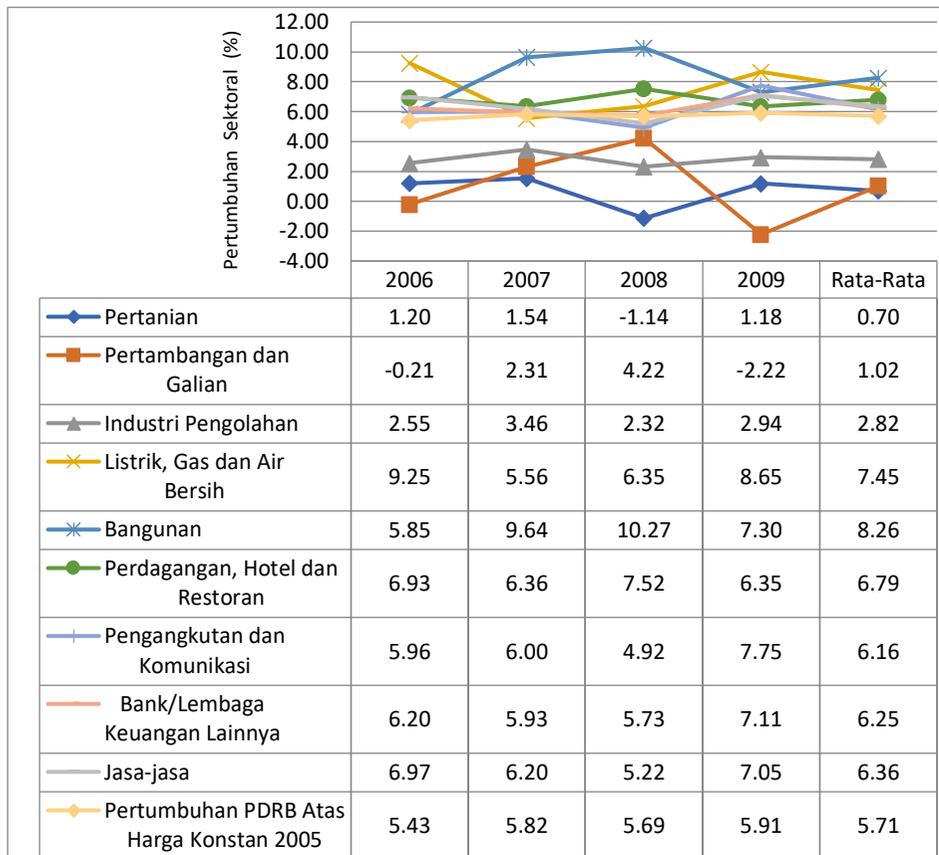
tinggi justru terjadi pada tahun 2005-2009 (periode sebelum desentralisasi). Demikian pula pada Kabupaten Surakarta sektor perdagangan memiliki angka pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2005-2009 dibanding tahun 2014-2019.



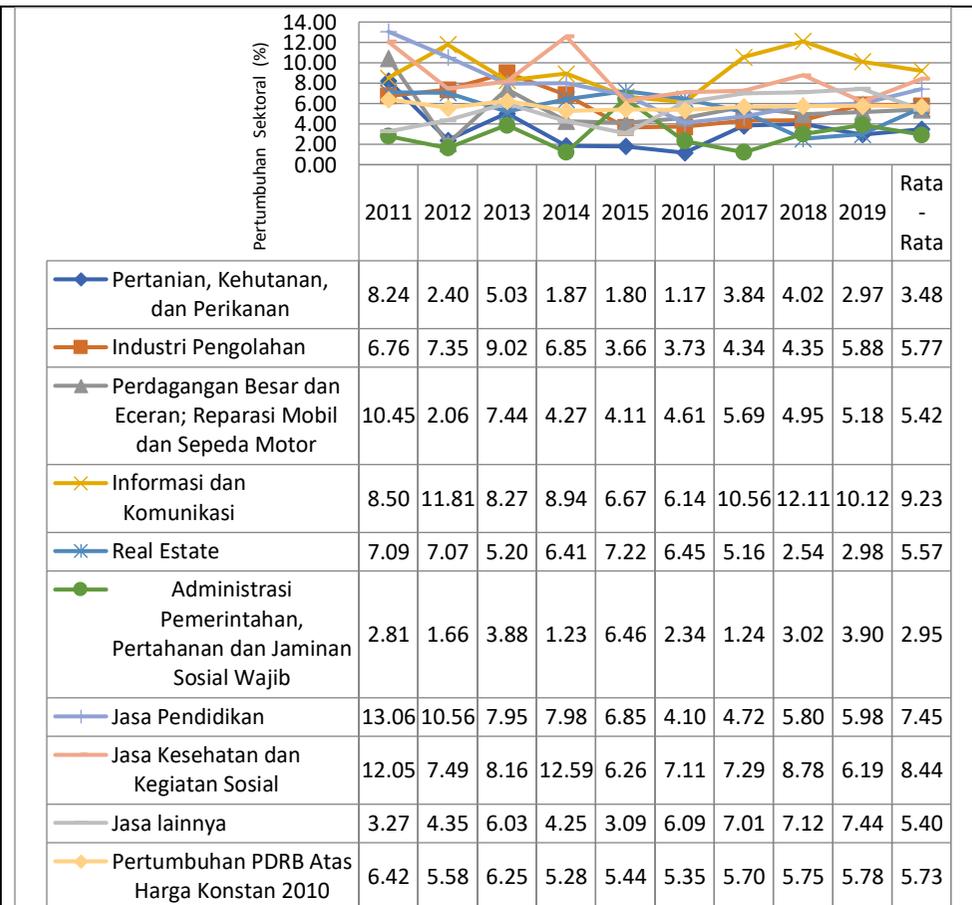
Gambar 4.10a Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2005 Kota Semarang Tahun 2006-2009
 Sumber: BPS Statistik Kota Semarang, PDRB Kota Semarang berbagai tahun, diolah



Gambar 4.10b Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2010 Kota Semarang Tahun 2014-2019
 Sumber: BPS Statistik Kota Semarang, PDRB Kota Semarang berbagai tahun, diolah

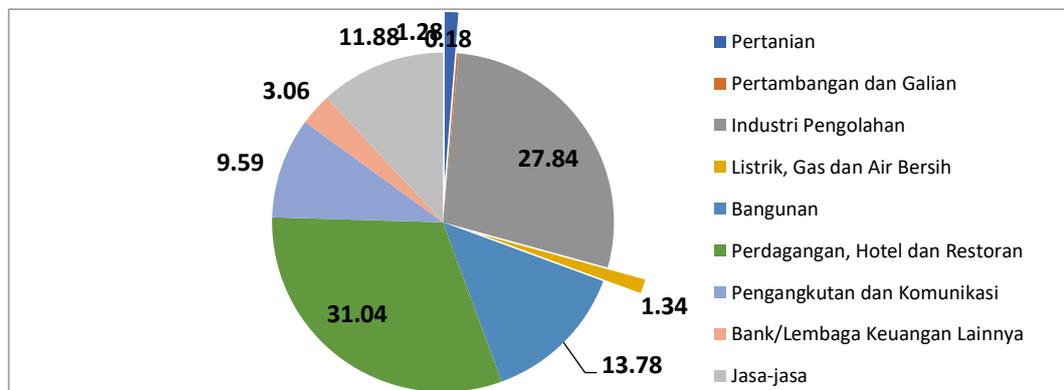


Gambar 4.10c Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2005 Kabupaten Surakarta Tahun 2006-2009
 Sumber: BPS Statistik Kabupaten Surakarta, PDRB Surakarta berbagai tahun, diolah

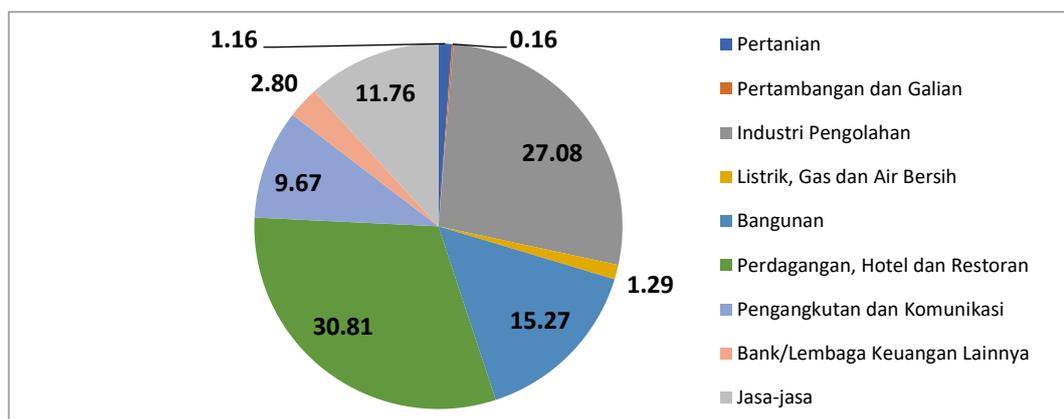


Gambar 4.10d Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Surakarta Tahun 2014-2019
 Sumber: BPS Statistik Kabupaten Surakarta, PDRB Surakarta berbagai tahun, diolah

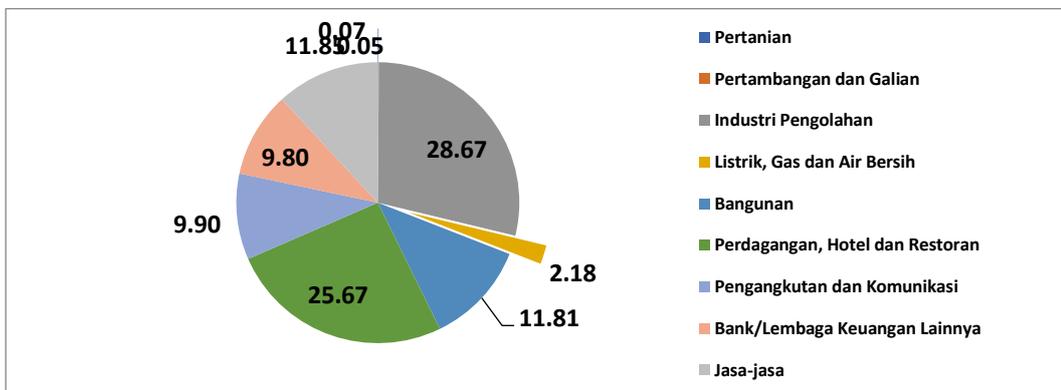
Kontribusi sektoral sering digunakan untuk melihat peran tiap sektor terhadap total pembentukan PDRB. Peran sektor perdagangan di Kota Semarang tahun 2005 dan 2009 tidak menunjukkan perubahan yang berarti, Begitu pula pada Kabupaten Surakarta peran sektor perdagangan sedikit mengalami kenaikan di tahun 2009 dibanding tahun 2005.



Gambar 4.11a Kontribusi PDRB Sektoral Kota Semarang Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2005
 Sumber: BPS Statistik Kota Semarang, PDRB Kota Semarang berbagai tahun, diolah

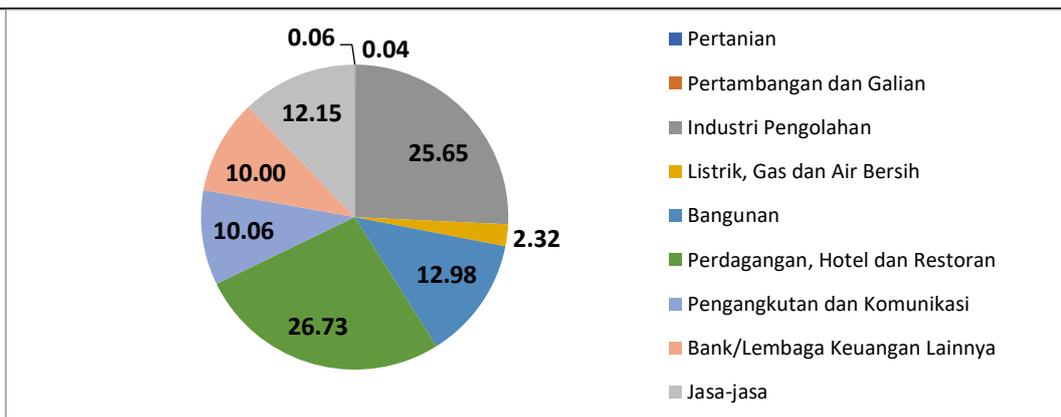


Gambar 4.11b Kontribusi PDRB Sektoral Kota Semarang Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2009
 Sumber: BPS Statistik Kota Semarang, PDRB Kota Semarang berbagai tahun, diolah



Gambar 4.11c Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Surakarta Terhadap Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Surakarta, PDRB Surakarta berbagai tahun, diolah



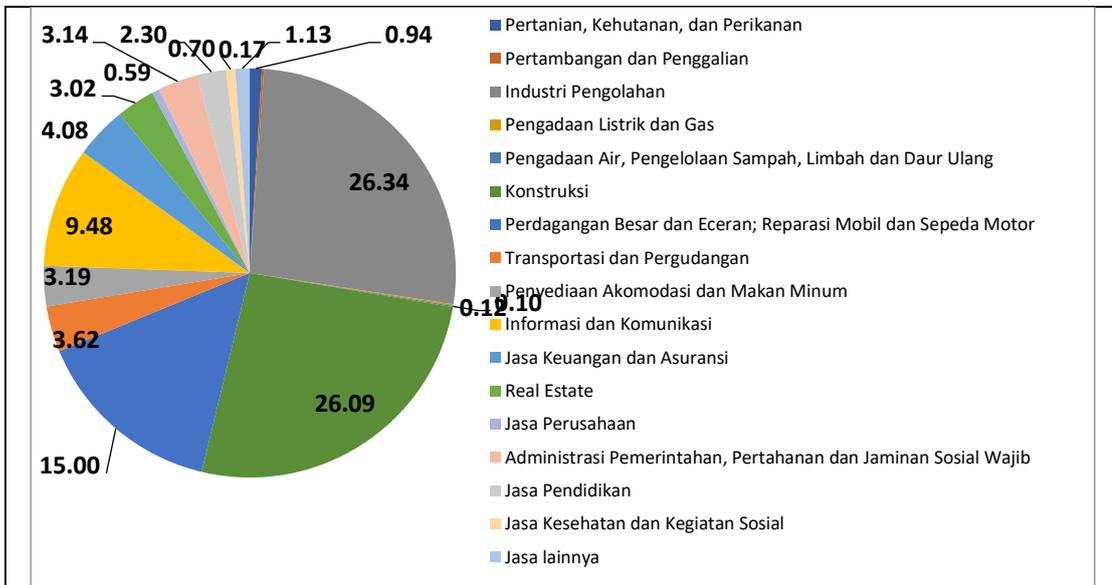
Gambar 4.11d Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Surakarta Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2009

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Surakarta, PDRB Surakarta berbagai tahun, diolah

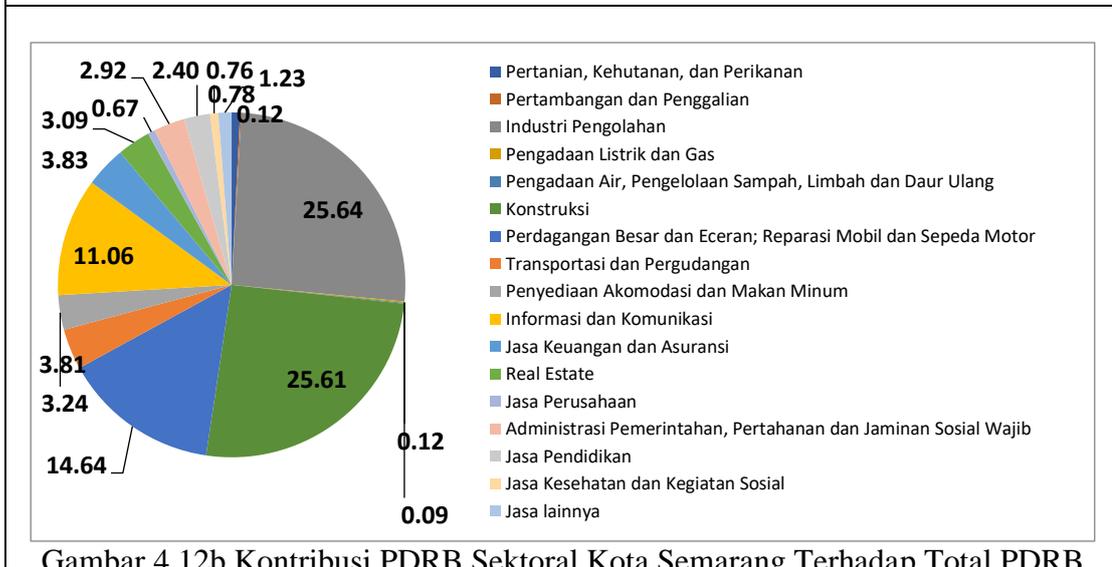
Kontribusi Sektoral Setelah Desentralisasi (Tahun 2015 2019)

Tahun 2015 maupun tahun 2019, Kota Semarang didominasi oleh sektor perdagangan dan sektor Industri pengolahan dengan selisih persentase yang tidak lebih dari 1 persen, dan pada tahun 2019 kedua sektor tersebut sama-sama mengalami penurunan kontribusi dengan besaran yang masing-masing berkisar turun 1 persen. Pada Kabupaten Surakarta, tidak terjadi perubahan yang berarti, di tahun 2015 ataupun 2019 sama-sama didominasi sektor Kontruksi dan Sektor

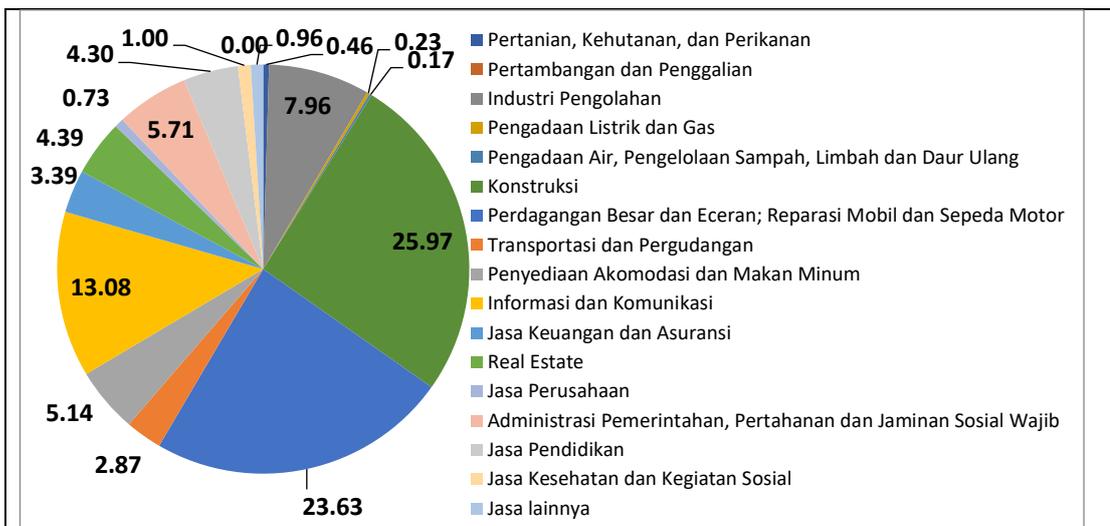
perdagangan, dan tidak terjadi perubahan kontribusi sektoral yang berarti pada tahun tersebut.



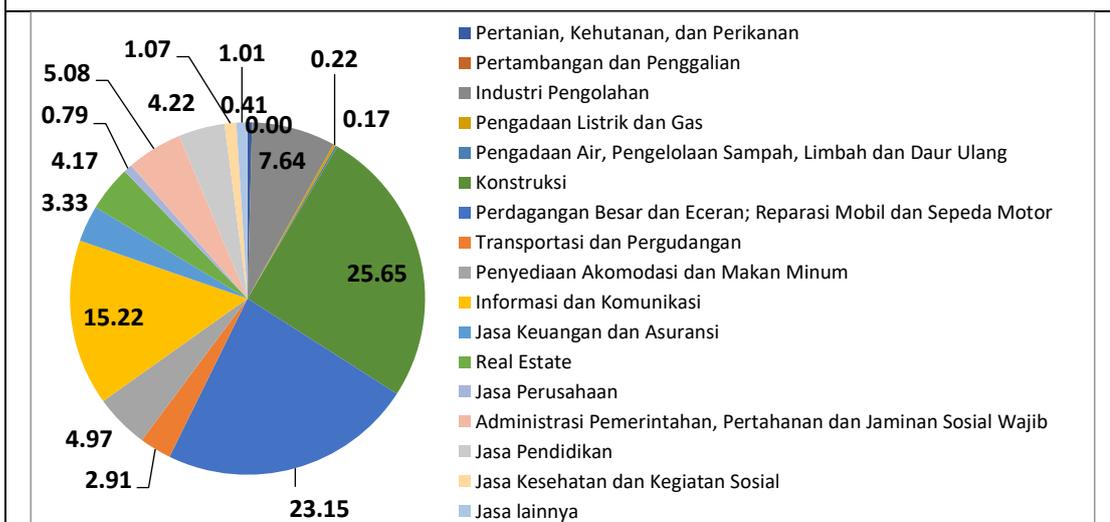
Gambar 4.12a Kontribusi PDRB Sektoral Kota Semarang Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2015
 Sumber: BPS Statistik Kota Semarang, PDRB Kota Semarang berbagai tahun, diolah



Gambar 4.12b Kontribusi PDRB Sektoral Kota Semarang Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2019
 Sumber: BPS Statistik Kota Semarang, PDRB Kota Semarang berbagai tahun, diolah



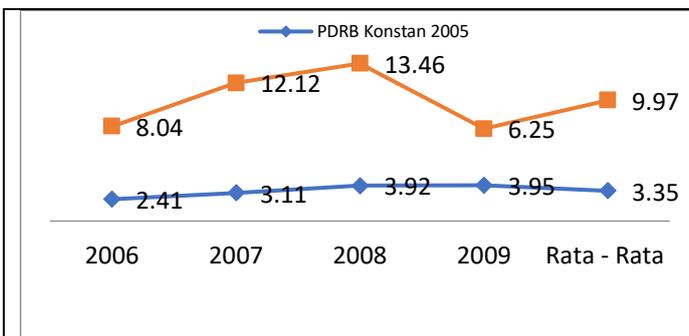
Gambar 4.12c Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Surakarta Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2015
 Sumber: BPS Statistik Kabupaten Surakarta, PDRB Kabupaten Surakarta berbagai tahun, diolah



Gambar 4.12d Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Surakarta Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2019
 Sumber: BPS Statistik Kabupaten Surakarta, PDRB Kabupaten Surakarta berbagai tahun, diolah

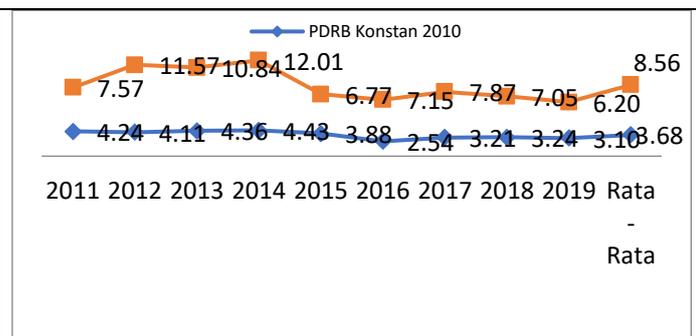
4.1.4. Analisis Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten dengan Dominasi Sektor Industri: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kudus

Perbedaan atau jarak antara PDRB atas dasar harga konstan dengan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan pengaruh dari harga/ inflasi. Melalui gambar 4.13a hingga gambar 4.13d dapat diketahui bahwa baik pada Kabupaten Kudus maupun Kabupaten Cilacap pengaruh inflasi didapati lebih rendah pada tahun 2014 hingga 2019 dibanding tahun 2005 hingga tahun 2009.



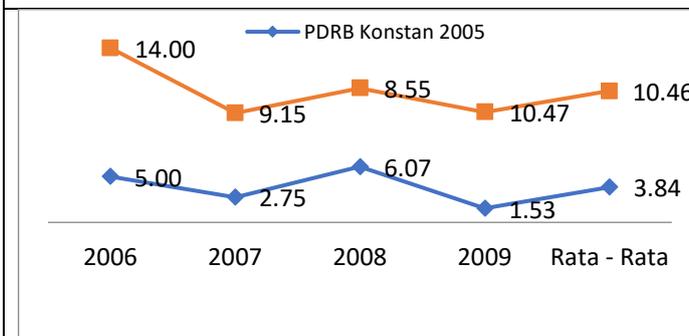
Gambar 4.13a Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Kudus, PDRB Kudus berbagai tahun, diolah



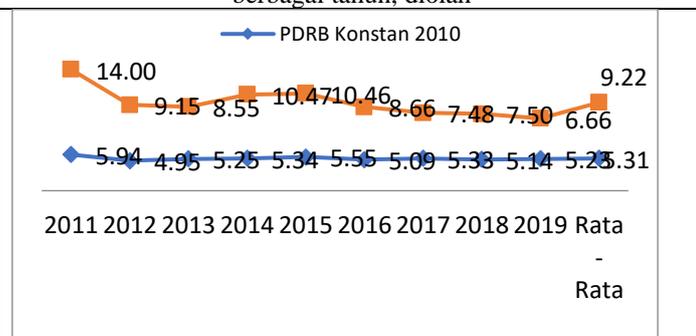
Gambar 4.13b Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus Tahun 2014- 2019

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Kudus, PDRB Kudus berbagai tahun, diolah



Gambar 4.13c Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2009

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Cilacap, PDRB Kabupaten Cilacap berbagai tahun, diolah



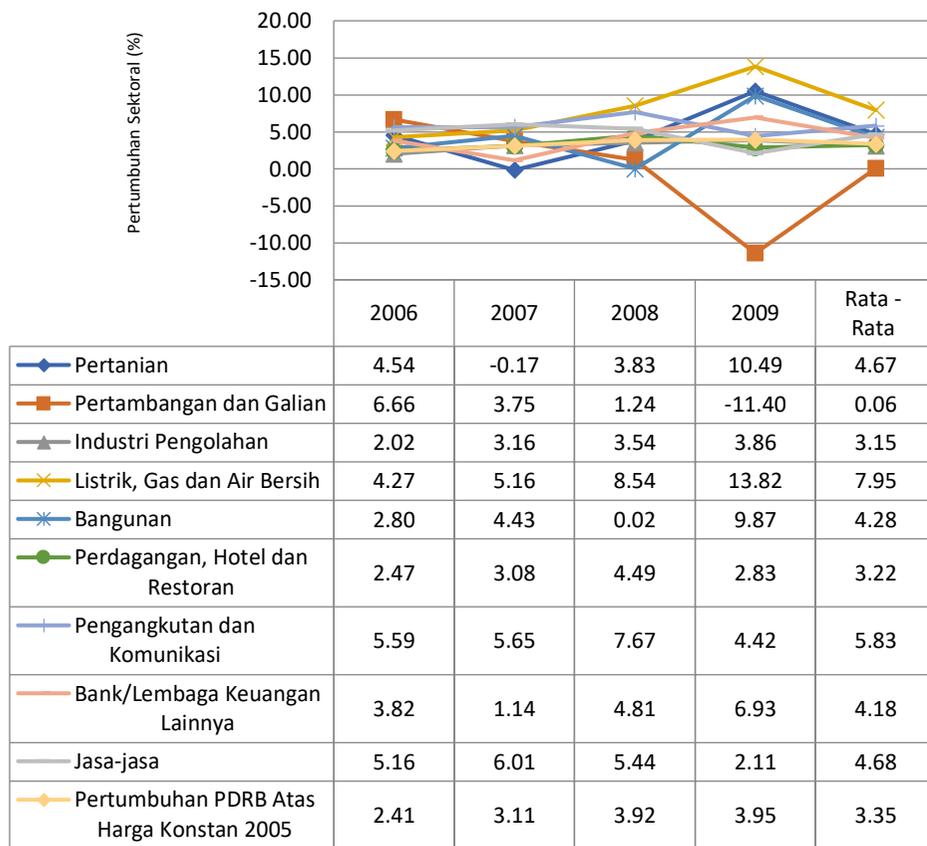
Gambar 4.13d Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2019

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Cilacap, PDRB Kabupaten Cilacap berbagai tahun, diolah

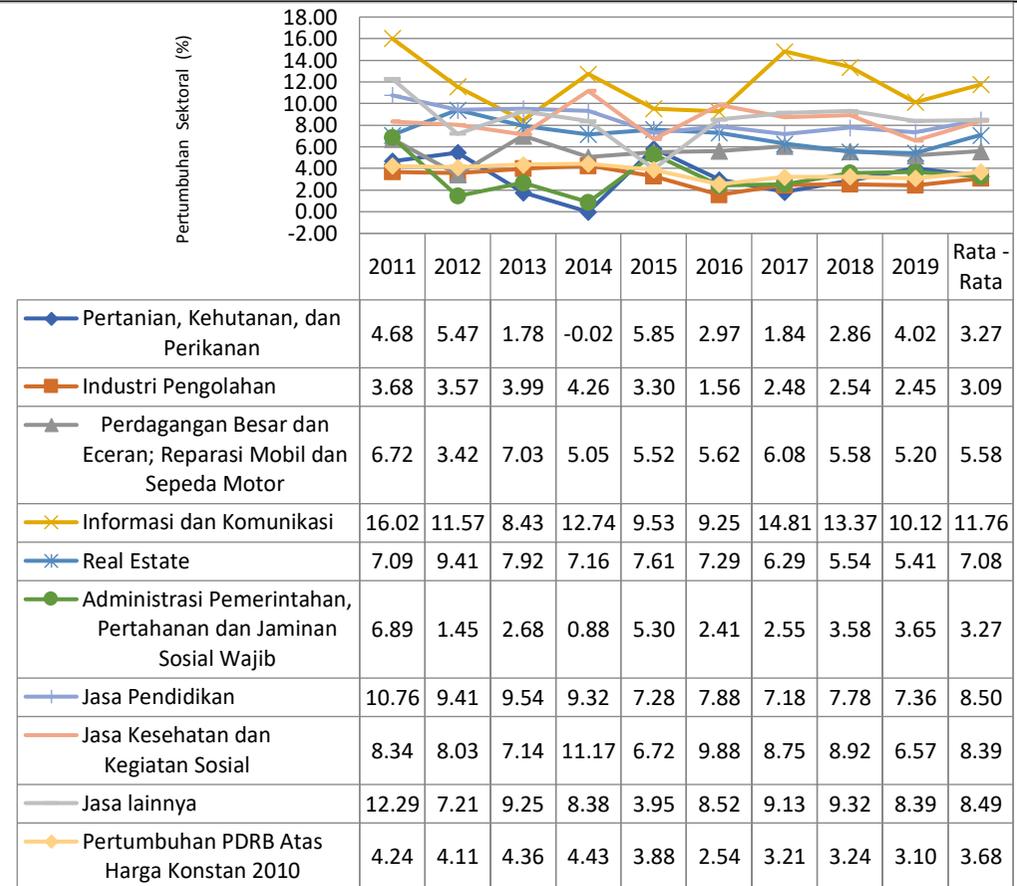
Pertumbuhan tiap sektor ditampilkan dalam gambar 4.14a hingga 4.14d. Meskipun sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan PDRB sektoral tertinggi namun pertumbuhannya bukanlah yang paling tinggi. Pada Kabupaten Kudus, sektor dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2006-2009 adalah

sektor Listrik, gas dan air bersih, disusul dengan sektor pengangkutan dan komunikasi pada urutan ke-2, kemudian sektor jasa di urutan ke-3. Sektor industri sendiri pengolahan hanya menempati urutan ke-8 dari 9 sektor yang ada. Sedangkan pada tahun 2014 hingga tahun 2019 sektor industri pengolahan di Kabupaten Kudus justru merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah dibanding sektor lainnya.

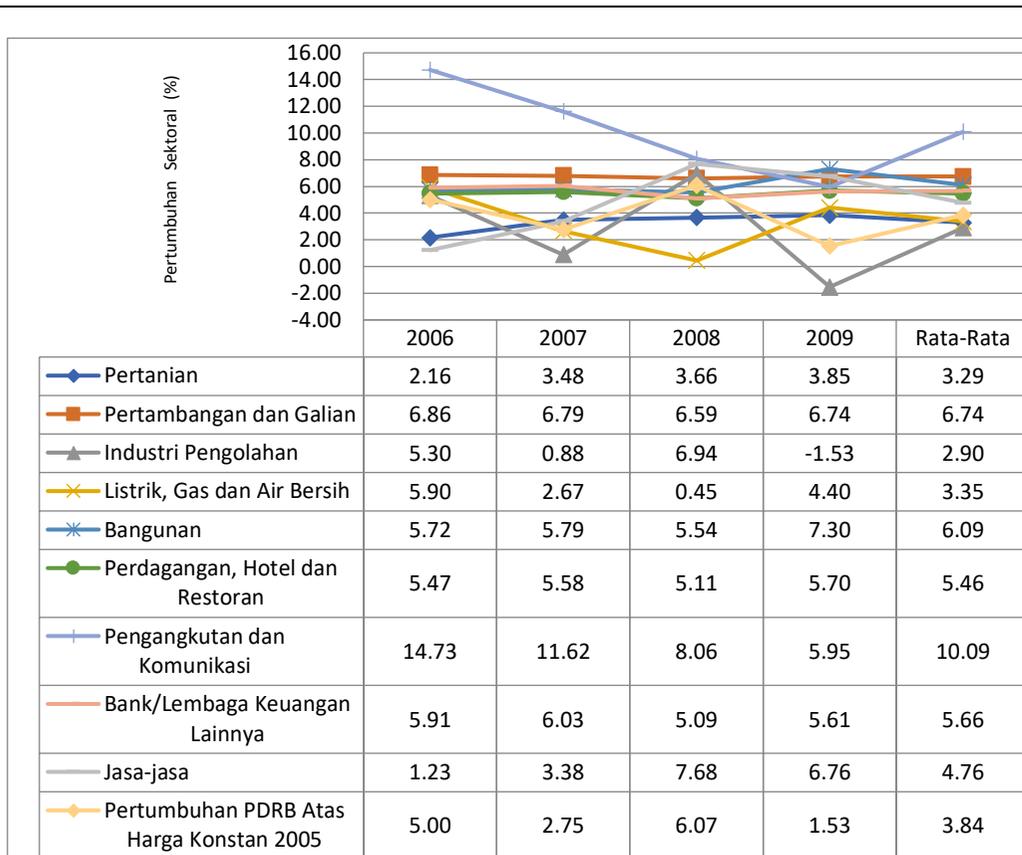
Kabupaten Cilacap memiliki pola pertumbuhan yang hampir sama dengan Kabupaten Kudus untuk sektor industri pengolahan. Pada tahun 2005-2009 sektor Industri pengolahan adalah sektor dengan angka pertumbuha terendah dibanding 8 sektor lainnya. Sedangkan pada tahun 2014-2019, sektor industri pengolahan meskipun bukanlah yang terendah, namun termasuk dalam 4 sektor dengan pertumbuhan terendah. Pada tahun 2014-2019 terlihat pertumbuhan sektoral cenderung lebih fluktuatif dibanding tahun 2005-2009.



Gambar 4.14a Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2005 Kabupaten Kudus Tahun 2006-2009
 Sumber: BPS Statistik Kabupaten Kudus, PDRB Kudus berbagai tahun, diolah

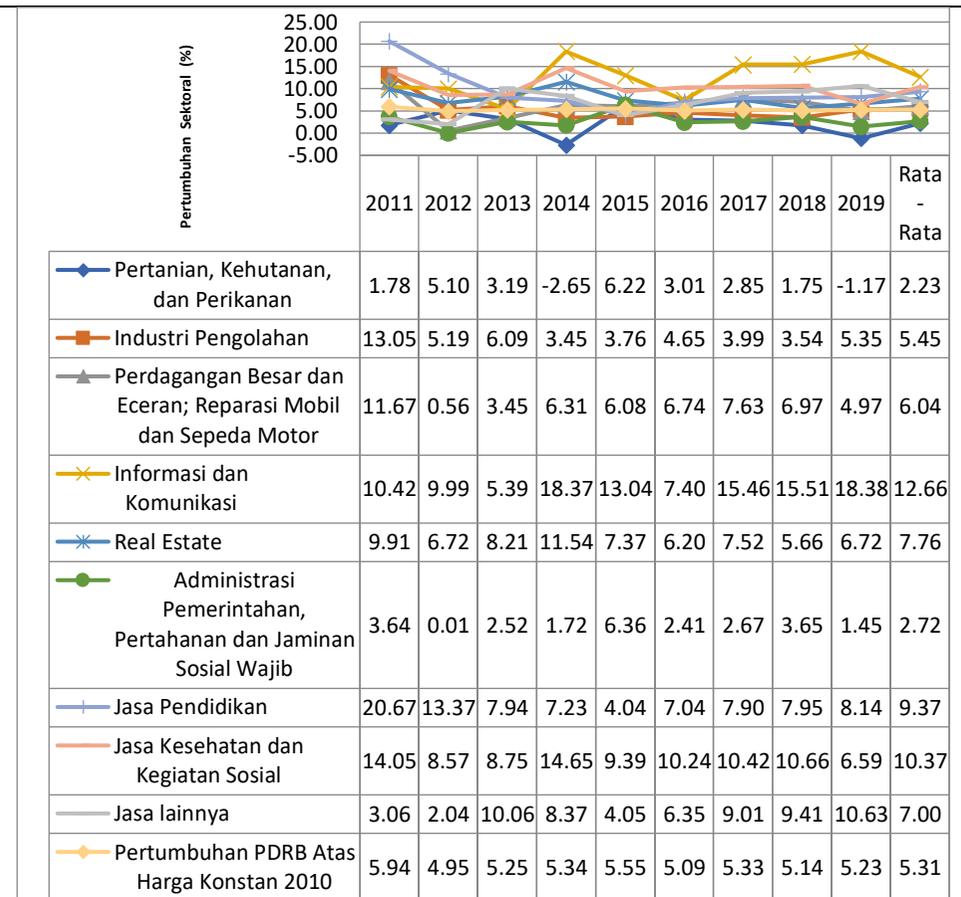


Gambar 4.14b Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Kudus Tahun 2014-2019
 Sumber: BPS Statistik Kabupaten Kudus, PDRB Kudus berbagai tahun, diolah



Gambar 4.14c Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2005 Kabupaten Cilacap Tahun 2006-2009

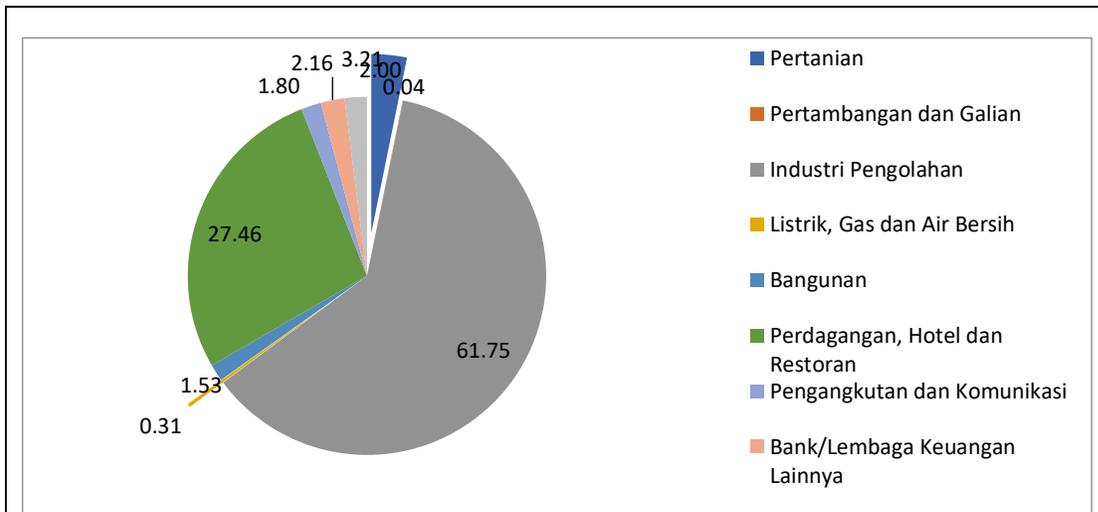
Sumber: BPS Statistik Kabupaten Cilacap , PDRB Kabupaten Cilacap berbagai tahun, diolah



Gambar 4.14d Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2019

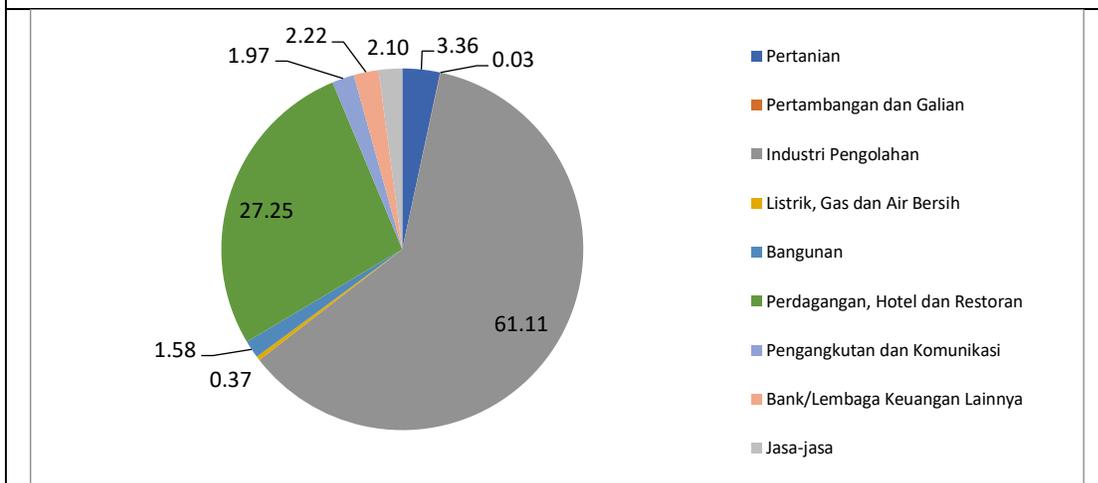
Sumber: BPS Statistik Kabupaten Cilacap , PDRB Kabupaten Cilacap berbagai tahun, diolah

Kontribusi sektoral Kabupaten Kudus dan Kabupaten Cilacap sebagai Kabupaten yang bercirikan Industri Pengolahan didominasi oleh Sektor Industri pengolahan sebagai menyusun PDRB tertinggi. Apabila dibandingkan tahun 2005 dan 2009 dapat dilihat pada tabel 4.15a hingga 4.15d pada Kabupaten Kudus tidak terjadi perubahan komposisi share sektoral yang berarti, sedangkan Kabupaten Cilacap peran perdagangan cenderung meningkat bersamaan dengan sedikit menurunnya peran Industri pengolahan.



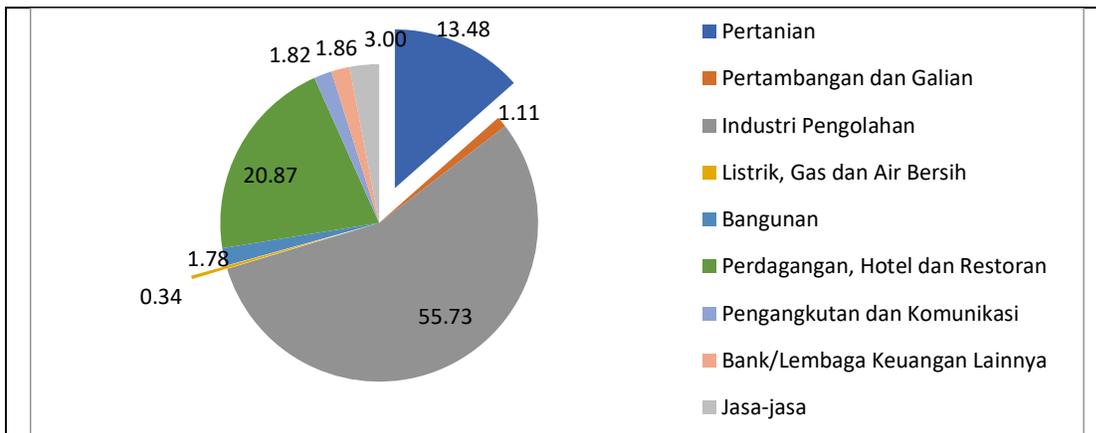
Gambar 4.15a Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Kudus Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2005

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Kudus, PDRB Kudus berbagai tahun, diolah



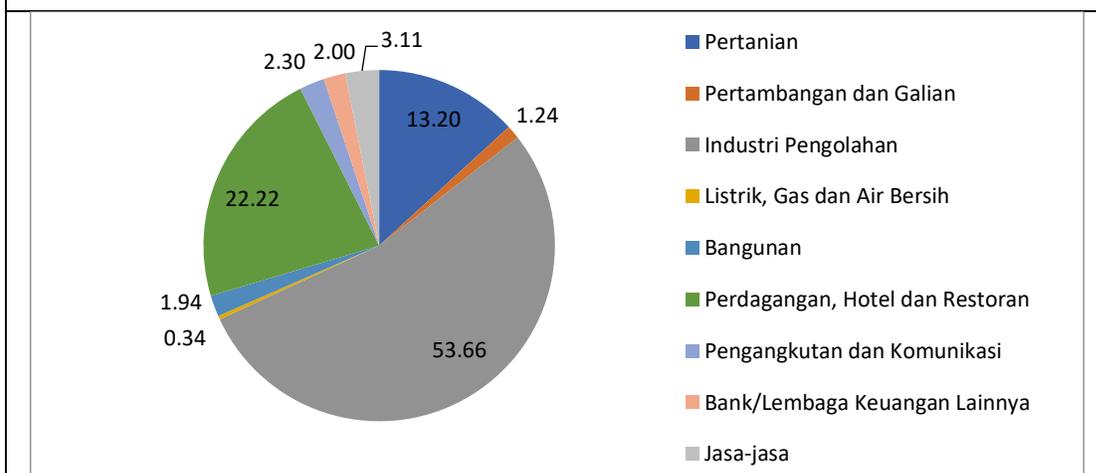
Gambar 4.15b Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Kudus Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2009

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Kudus, PDRB Kudus berbagai tahun, diolah



Gambar 4.15c Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Cilacap Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2005

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Cilacap, PDRB Kabupaten Cilacap berbagai tahun, diolah

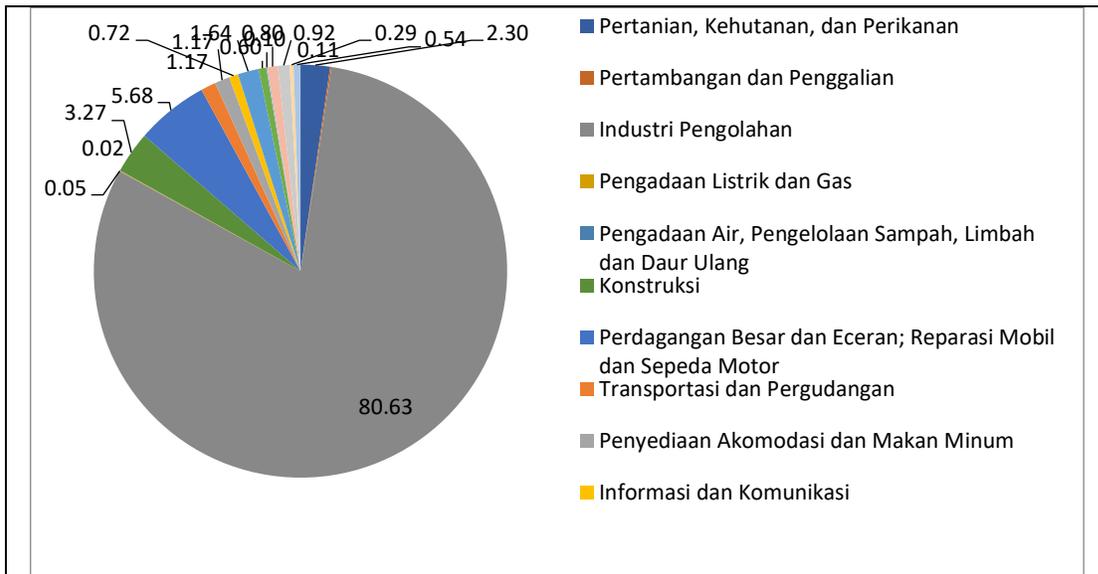


Gambar 4.15d Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Cilacap Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2009

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Cilacap, PDRB Kabupaten Cilacap berbagai tahun, diolah

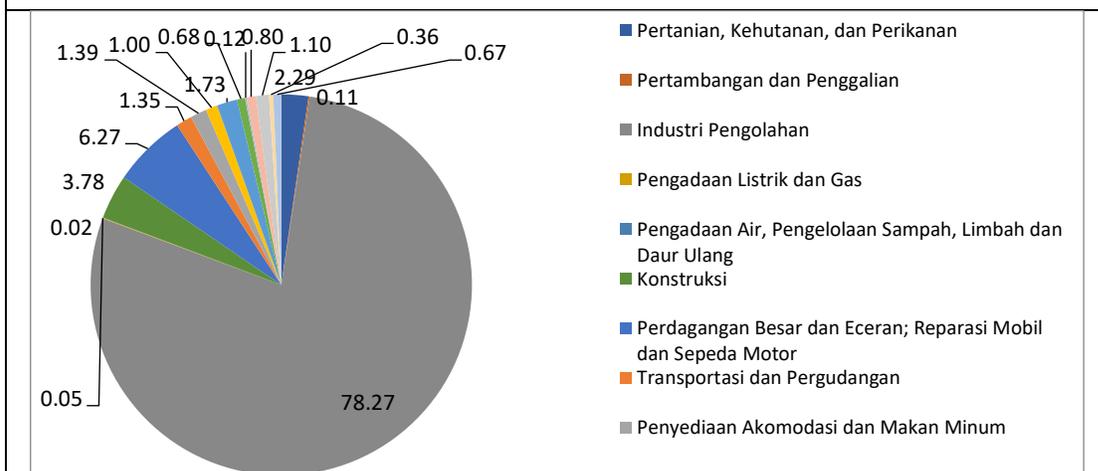
Gambaran share sektoral tahun 2014 dan 2019 Kabupaten Kudus dan Kabupaten Cilacap ditampilkan dalam gambar 4.16a hingga 4.16d. Pada Kabupaten Kudus terlihat peran Industri pengolahan yang paling tinggi dalam pembentukan PDRB. Terjadi penurunan share sektor industri pengolahan dari tahun 2015 ke tahun 2019 dan naiknya peran/ share sektor perdagangan di tahun yang sama.

Pada Kabupaten Cilacap peran sektor industri pengolahan hanya berkisar 32 persen disusul sektor pertanian dan sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Pada tahun 2019 share sektor industri pengolahan dan pertanian mengalami penurunan sedangkan share sektor perdagangan dan sektor konstruksi justru meningkat, hal ini mengindikasikan mulai terjadi indikasi pemerataan sektoral.



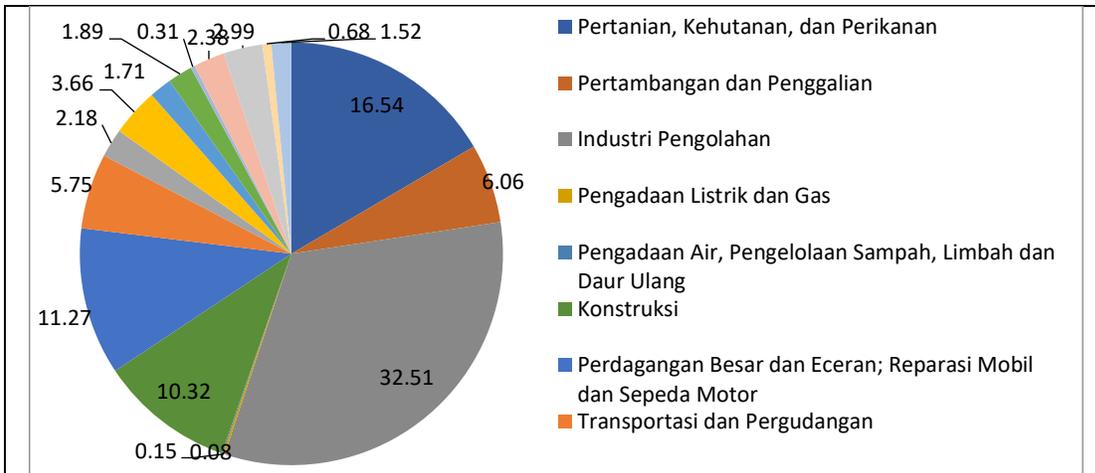
Gambar 4.16a Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Kudus Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2015

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Kudus, PDRB Kabupaten Kudus berbagai tahun, diolah



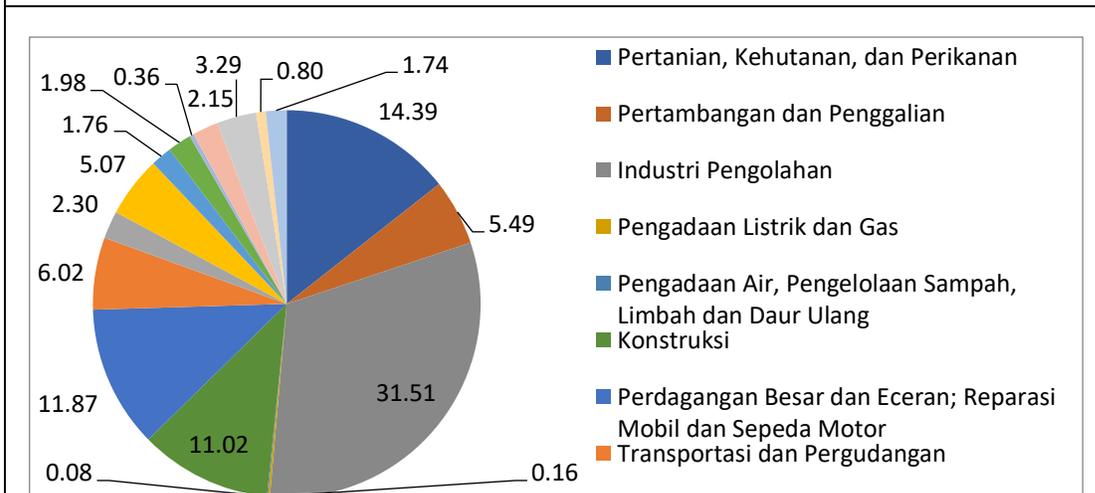
Gambar 4.16b Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Kudus Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2019

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Kudus, PDRB Kabupaten Kudus berbagai tahun, diolah



Gambar 4.16c Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Cilacap Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2015

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Cilacap, PDRB Kabupaten Cilacap berbagai tahun, diolah



Gambar 4.16d Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Cilacap Terhadap Total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Tahun 2019

Sumber: BPS Statistik Kabupaten Cilacap, PDRB Kabupaten Cilacap berbagai tahun, diolah

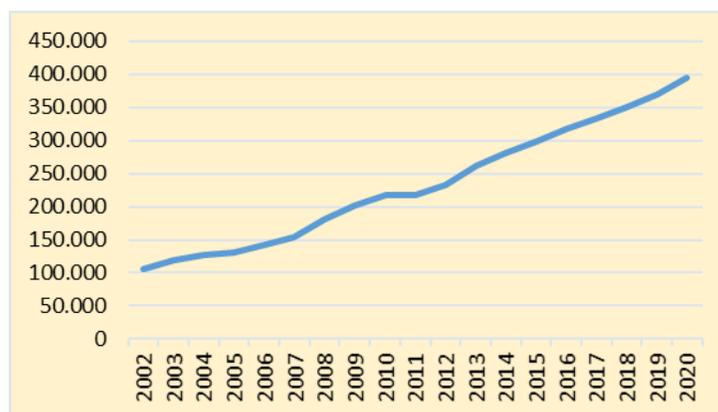
4.2. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

4.2.1. Perkembangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang serius bagi negara. Oleh karena itu berbagai program dan kegiatan telah dan masih terus dilakukan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan, demikian juga di Jawa Tengah. Berikut ini tampilan gambar berbagai indikator kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2002 hingga 2020.

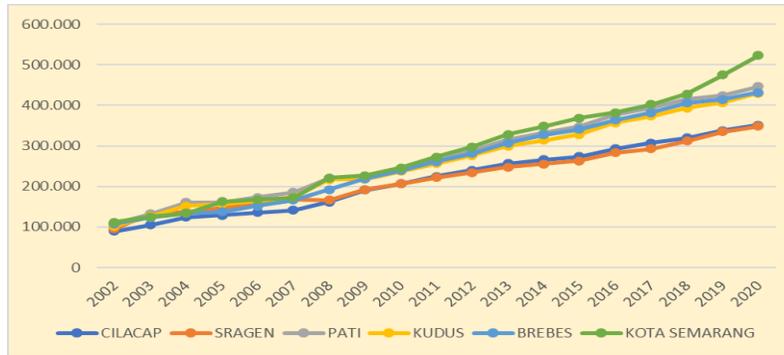
a. Garis Kemiskinan

Indikator ini merepresentasikan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Di Jawa Tengah, angka garis kemiskinan menunjukkan kecenderungan naik, mulai dari angka seratus ribuan pada tahun 2002 hingga hampir mencapai angka empat ratus ribuan pada 2020.



Gambar 4.17. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Jika kemudian dilakukan analisis terhadap 6 daerah sampel di Jawa Tengah, maka secara rata-rata sepanjang tahun pengamatan, kota Surakarta mempunyai garis kemiskinan paling tinggi dari daerah sampel lainnya, atau bahkan dari ibu kota propinsi (Kota Semarang). Hanya pada tahun terakhir saja kota Semarang berada lebih tinggi garis kemiskinannya dari kota Surakarta. Selama masa transisi desentralisasi fiscal (2009-2014) kota Surakarta justru memiliki garis paling tinggi, baik jika dibanding dengan tahun-tahun sebelum atau sesudahnya maupun jika dibanding dengan daerah sampel lainnya. Sementara kabupaten Cilacap konsisten memiliki garis kemiskinan terendah pada sepanjang tahun pengamatan.



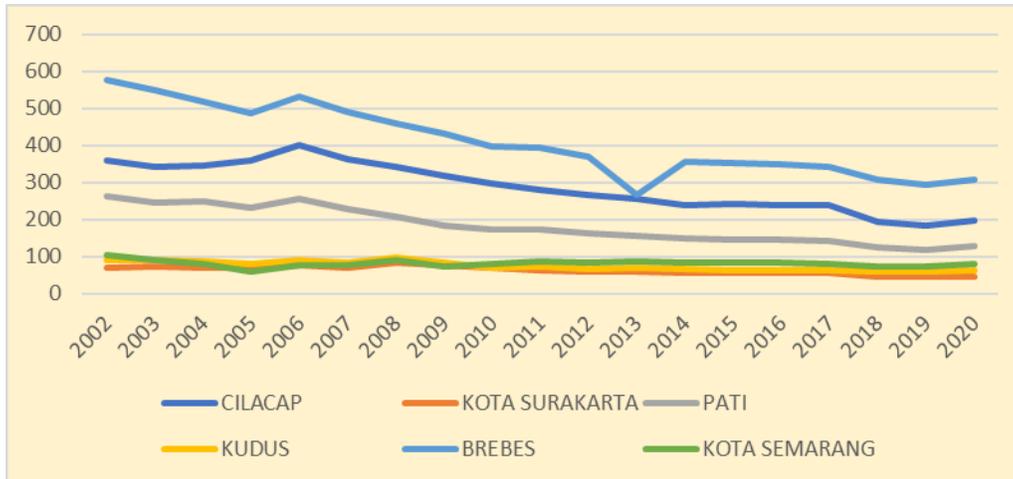
Gambar 4.18. Perkembangan Garis Kemiskinan Kab/Kota Cilacap, Surakarta, Pati, Kudus, Brebes, dan Kt Semarang

b. Tingkat Kemiskinan

Gambar 4.19. adalah grafik yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah selama tahun 2002-2020. Meskipun ada kecenderungan menurun sampai dengan 2019, namun harus diperhatikan Bersama bahwa pada tahun 2020, angka tersebut justru lebih tinggi dari pencapaian sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah karena dampak pandemi global yang juga mempengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat di Jawa Tengah. Penghasilan yang berada dalam range terdekat pada garis kemiskinan menjadi rentan untuk turun di bawah garis kemiskinan sehingga menyebabkan jumlah penduduk miskin menjadi naik Kembali. Berikut disajikan grafik jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dalam satuan orang dan porsentase dari total penduduk.



Gambar 4.20 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah



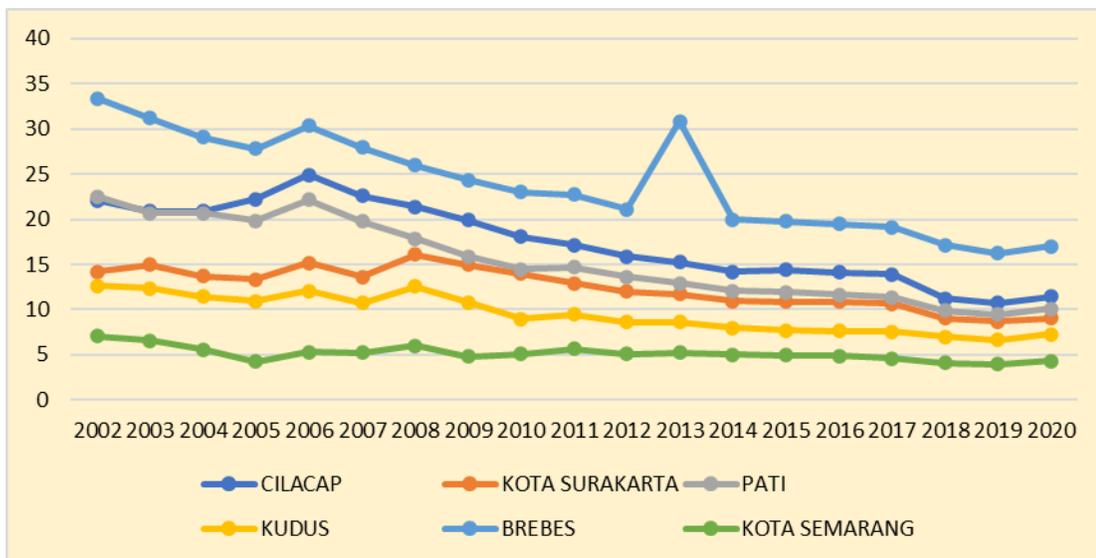
Gambar 4.21. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Cilacap, Kt Surakarta, Pati, Kudus, Brebes, dan Kt Semarang

Secara agregat propinsi, jumlah penduduk miskin di Jawa tengah mengalami kecenderungan penurunan, demikian juga pada daerah-daerah sampel yang diamati. Diantara enam daerah sampel, Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, meski pada tahun 2013 sempat turun namun Kembali naik pada tahun 2014. Sedangkan kota Semarang, Kudus, dan kota Surakarta memiliki jumlah penduduk miskin yang hampir sama banyak, dan kota Surakarta memiliki paling sedikit jumlah penduduk miskin. Melihat dari grafik jumlah penduduk miskin, penurunan paling banyak terjadi pada sekitar tahun 2006-2013.



Gambar 4.22. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah

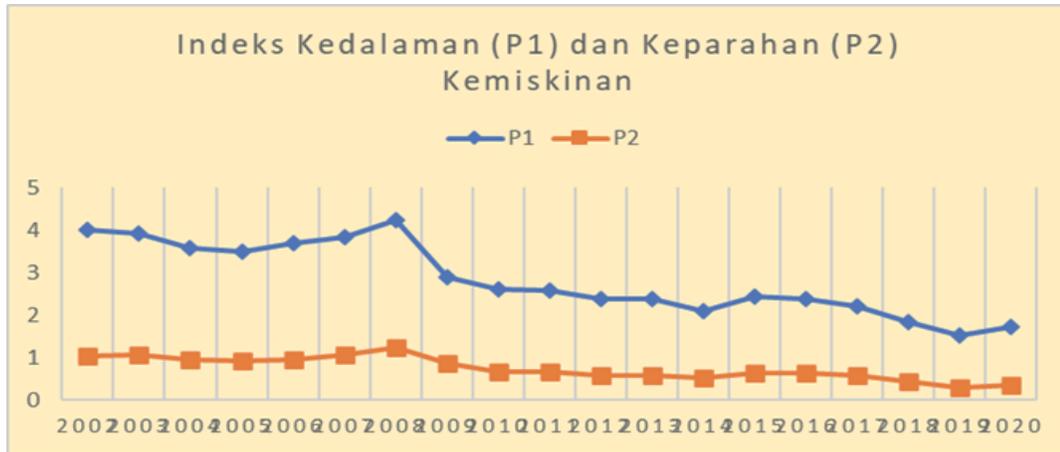
Setelah pelaksanaan otonomi daerah secara murni (2014), juga terjadi penurunan penduduk miskin namun sudah tidak secepat atau sebanyak penurunan pada tahun-tahun sebelumnya. Gambar 4.22 menunjukkan kecenderungan penurunan hingga pada tahun 2020 masih menyentuh angka 11,4%. Perbandingan antara jumlah penduduk miskin pada suatu daerah terhadap total penduduk pada daerah masing-masing nampak pada gambar 4.23. Kabupaten Brebes memiliki persentase penduduk miskin terbanyak, dan terburuk terjadi pada tahun 2013. Sedangkan kota Semarang bisa menekan jumlah penduduk miskinnya, sehingga dibandingkan dengan total penduduknya pada tahun 2020 masih bisa mencapai 4,34% saja.



Gambar 4.23. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Cilacap, Kt Surakarta, Pati, Kudus, Brebes, dan Kt Semarang (%)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks P2 ini menunjukkan seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya, maka sasaran alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk daerah tersebut harus semakin terukur dan tepat. Di wilayah Jawa Tengah, kondisi kemiskinan terparah terjadi pada tahun 2008,

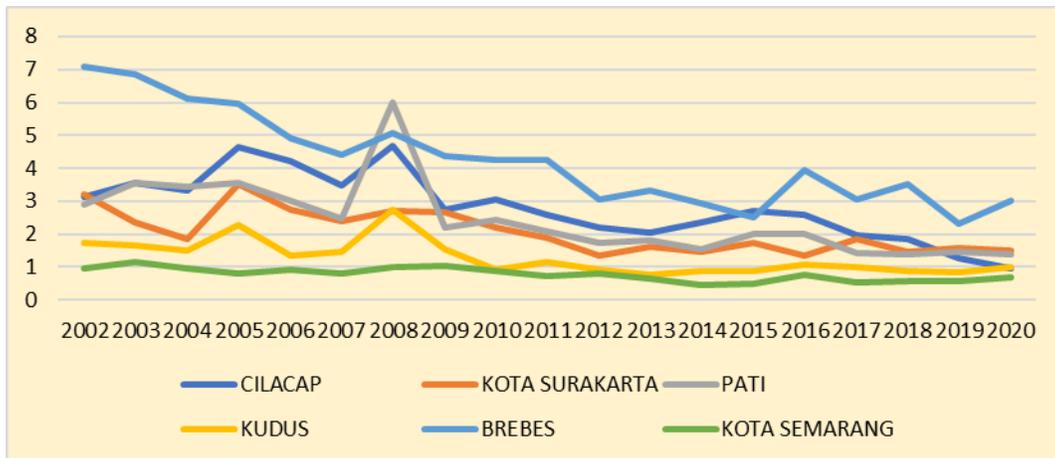
dimana indeks P1 dan P2 mencapai angka tertinggi yaitu 4,25 dan 1,24. Angka tersebut tidak cukup baik jika dibandingkan dengan angka P1 dan P2 nasional yang dapat mencapai 2,77 untuk P1 dan 0,76 untuk P2. Seiring dengan berjalannya waktu tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Jawa tengah menurun menjadi semakin mendekati perolehan angka nasional. Hingga pada tahun 2020 mencapai angka 1,72 dan 0,34 sementara rata-rata nasional mencapai 1,75 dan 0,47 (bps.go.id).



Gambar 4.24. Perkembangan Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah

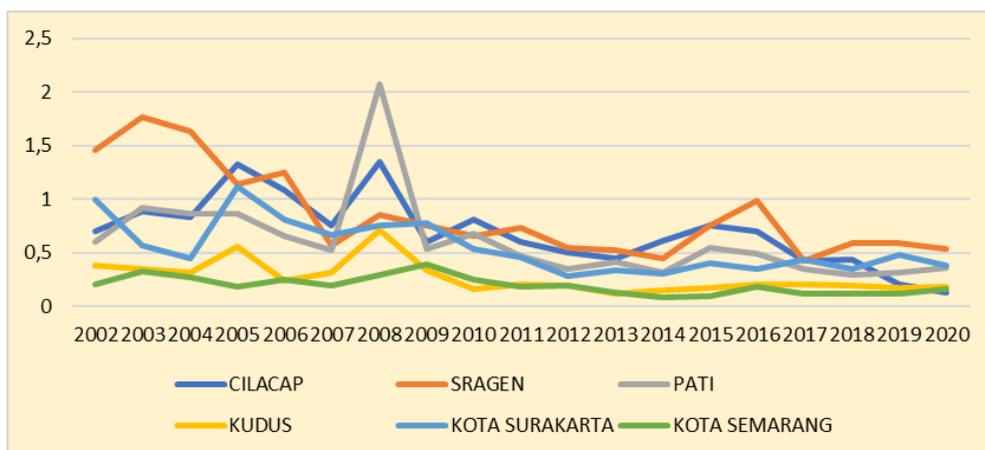
Gambar 4.24 menyajikan perkembangan kedalaman dan keparahan kemiskinan di propinsi Jawa Tengah pada tahun 2002 hingga 2020. Selama tahun tersebut kondisi terburuk yang dialami propindi Jawa Tengah adalah tahun 2008. Pada tahun 2008 terjadi kenaikan kedalaman kemiskinan di seluruh daerah sampel, sebagaimana juga dicerminkan oleh grafik P1 Jawa Tengah.

Pada tahun 2008 terjadi kenaikan kedalaman kemiskinan di seluruh daerah sampel, sebagaimana juga dicerminkan oleh grafik P1 Jawa Tengah. Pada tahun 2008 semua daerah sampel mengalami kenaikan P1, dan Kabupaten Pati mengalami lonjakan paling tinggi. Sementara kota Semarang pada tahun tersebut tetap dapat menjaga kelandaian angka P1. Tingginya angka ini menunjukkan semakin dalamnya kemiskinan. Pola P1 yang fluktuatif masih terus terjadi pada kabupaten Brebes bahkan hingga tahun 2020.



Gambar 4.25.a. Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab/Kota Cilacap, Pati, Kudus, Brebes, Surakarta, dan Kt Semarang

Konsisten dengan tingkat kedalaman kemiskinan, berikut ini disajikan grafik tingkat keparahan kemiskinan di daerah Sampel. Selain kota Semarang, pada tahun 2008 lima daerah sampel lainnya mengalami kenaikan drastis tingkat keparahan kemiskinan (P2), dan yang paling tinggi keparahannya adalah kabupaten Pati. Sebagaimana kondisi kedalaman kemiskinan, kota Semarang secara rata-rata dapat mempertahankan tingkat keparahan kemiskinan pada level yang paling rendah. Kenaikan tertinggi bagi kota Semarang justru terjadi pada tahun 2009, Ketika daerah lain mengalaminya tahun 2008.

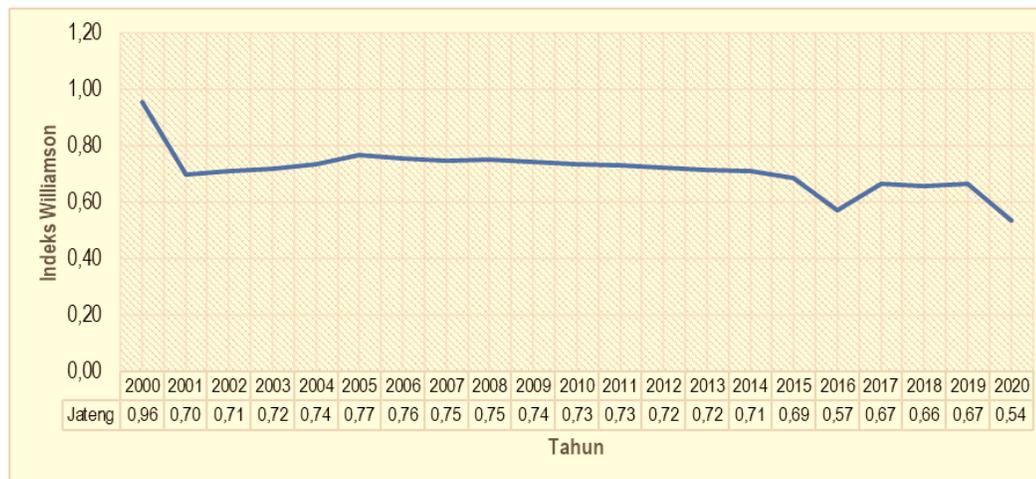


Gambar 4.25.b. Keparahannya Kemiskinan (P2) Kab/Kota Cilacap, Pati, Kudus, Brebes, Surakarta, dan Kt Semarang

4.2.2. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan

- a. Ketimpangan Pendapatan antar Wilayah: Williamson Index

Pemberlakuan desentralisasi fiskal diharapkan berdampak positif terhadap pemerataan pembangunan antar wilayah. Daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh karena sulit dijangkau semakin terbuka oleh pemerintah pusat diharapkan memiliki ruang gerak untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang bermunculan secara merata pada berbagai wilayah sehingga dapat tumbuh bersama. Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang semakin menurun, yakni sebesar 0.96 pada tahun 2000, menjadi 0.73 pada tahun 2010, dan pada akhir tahun 2020 sebesar 0.54. Kondisi demikian menunjukkan bahwa disparitas pembangunan ekonomi antar Kabupaten/kota di Jawa Tengah semakin kecil.



Gambar 4.26. Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah

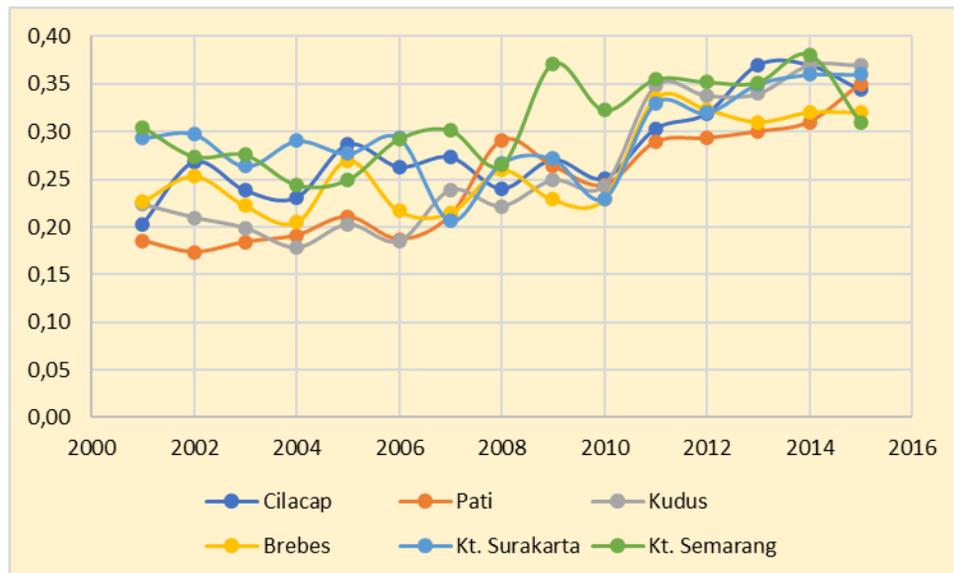
b. Ketimpangan Pendapatan antar Kelompok Pendapatan: Gini Index

Indeks gini (gini ratio) merupakan alat untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relative antar penduduk dalam suatu wilayah. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1, apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Pengkategorian lebih lanjut menunjukkan jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; kemudian jika nilainya ada di antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.



Gambar 4.27. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jawa tengah

Gambar 4.28 menjelaskan bahwa kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah justru semakin tinggi pada tahun-tahun terlebih setelah tahun 2010. Sebelum 2010 ketimpangan pendapatan masih berada pada level rendah, kemudian setelah itu angka ketimpangan berada dalam level sedang. Kenaikan indeks gini ini menunjukkan belum meratanya pendapatan, atau kenaikan pendapatan hanya terjadi pada beberapa golongan penduduk sedangkan yang lainnya tidak. Sehingga kesenjangan pendapatan semakin tinggi.



Gambar 4.28. Perkembangan Indeks Gini Kab/Kota Cilacap, Kt Surakarta, Pati, Kudus, Brebes, dan Kt Semarang

Pada 6 daerah sampel penelitian, nampak dari grafik bahwa kesenjangan pendapatan terbesar terjadi di Kota Semarang pada tahun 2009. Pada tahun 2015 kota Semarang berhasil menekan kesenjangan pendapatan ini hingga berada pada level 0,31 (terendah diantara daerah sampel lainnya).

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 % penduduk dengan pendapatan tinggi. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

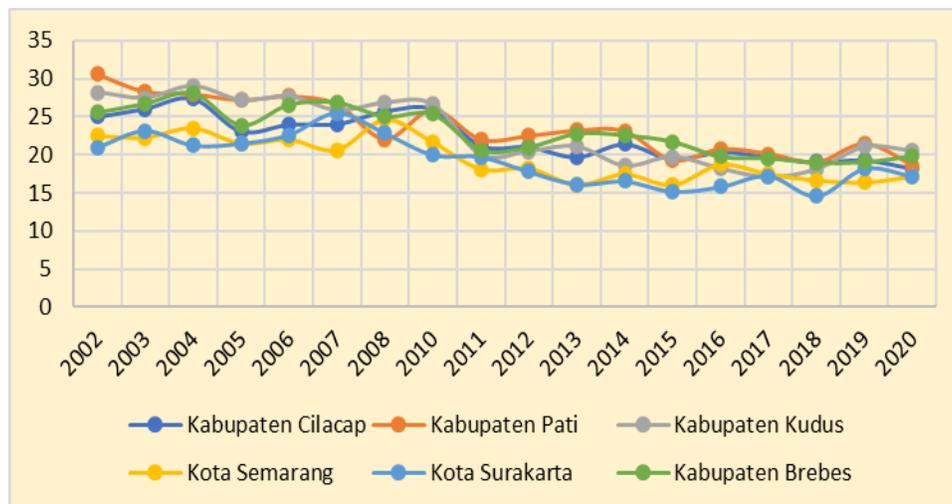
- a. Jika proporsi antara jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap jumlah atau total pendapatan dari seluruh penduduk, kurang dari 12 persen maka dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. Jika proporsi antara jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap jumlah atau total pendapatan seluruh penduduk, berkisar pada angka 12-17 persen maka dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- c. Jika proporsi antara jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan dari seluruh penduduk, lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.



Gambar 4.29. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Kriteria Bank Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4.29 menyajikan perkembangan data kategori kesenjangan pendapatan di Jawa Tengah pada tahun 2002 hingga 2020. Berdasarkan kriteria kesenjangan yang ditetapkan

bank dunia, pencapaian propinsi Jawa Tengah Nampak pada grafik di bawah ini. Grafik tersebut menyatakan bahwa Jawa Tengah memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. hal ini terbukti dari besaran rasio ini yang selalu di atas 17%. Sementara itu, gambar 4.30 menyajikan perkembangan ketimpangan pendapatan berdasarkan versi atau kriteria Bank Dunia Kab/Kota Cilacap, Surakarta, Pati, Kudus, Brebes, dan Kt Semarang. Data tahun 2002-2020 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan daerah-daerah sampel di Jawa tengah cenderung mencapai level rendah. Hal ini terjadi karena proporsi antara jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk dalam kategori 40% terendah terhadap total pendapatan dari seluruh penduduk bernilai di atas 17%. Meski pada tahun 2013-2015 Kota Surakarta dan kota Semarang berada pada level 16% namun kondisi dapat diperbaiki menjadi lebih baik dengan perolehan angka ketimpangan di atas level 17%.



Gambar 4.30. Perkembangan Ketimpangan Kriteria Bank Dunia Kab/Kota Cilacap, Kt Surakarta, Pati, Kudus, Brebes, dan Kt Semarang

4.3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan

lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan IPM sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah dan setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Analisis ini dilakukan dengan mengambil tahun 2004 hingga 2009 sebagai gambaran situasi sebelum Undang-Undang tersebut berlaku dan tahun 2014 hingga tahun 2019 sebagai gambaran setelah berlakunya undang-undang tersebut. Adapun antara tahun 2010 hingga 2013 merupakan masa peralihan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, maka sepanjang tahun tersebut tidak masuk dalam analisis ini.

4.3.1. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

a. Kesehatan

Angka Harapan Hidup saat Lahir - Life Expectancy (e_0)

Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Tabel 4.7. Usia Harapan Hidup Saat Lahir Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Sebelum UU No.28 Tahun 2009		Sesudah UU No.28 Tahun 2009	
Tahun	Usia Harapan Hidup saat Lahir (tahun)	Tahun	Usia Harapan Hidup saat Lahir (tahun)
2004	69,70	2014	73,88
2005	70,60	2015	73,96
2006	70,80	2016	74,02
2007	70,90	2017	74,08
2008	71,10	2018	74,18
2009	71,25	2019	74,23

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Angka harapan hidup merupakan indikator penting dalam mengukur panjang umur, yang berkaitan dengan seberapa jauh masyarakat atau negara dengan penggunaan sumber daya yang tersedia berusaha untuk memperpanjang hidup atau umur penduduknya. Pembangunan manusia dinilai belum berhasil apabila

pemanfaatan sumber daya masyarakat tidak diarahkan pada pembinaan kesehatan agar dapat mencegah warga meninggal lebih awal dari yang seharusnya.

Tabel 4.8a Usia Harapan Hidup Saat Lahir Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta Sebelum Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Tahun	Kota Semarang	Kabupaten Kudus	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Brebes	Kabupaten Pati	Kota Surakarta
2004	71,70	69,00	69,00	65,50	72,50	71,60
2005	71,90	69,40	69,60	66,50	72,60	71,74
2006	71,90	69,40	69,60	66,50	72,60	71,80
2007	71,90	69,41	69,86	66,75	72,62	71,84
2008	72,01	69,51	70,20	67,08	72,72	71,98
2009	72,07	69,57	70,51	67,37	72,77	72,07

Sumber: (BPS PROVINSI JAWA TENGAH) Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru

Tabel 4.7., Tabel 4.8a dan 4.8b menunjukkan Usia Harapan Hidup Saat Lahir di Propinsi Jawa Tengah maupun daerah sampel sebelum berlakunya UU No.28 Tahun 2009 yakni dari tahun 2004-2009 dan sesudah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 yakni antara tahun 2014-2019 meningkat.

Tabel 4.8b. Usia Harapan Hidup Saat Lahir Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Tahun	Kota Semarang	Kabupaten Kudus	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Brebes	Kabupaten Pati	Kota Surakarta
2014	77,18	76,40	72,80	67,90	75,43	76,99
2015	77,20	76,41	73,00	68,20	75,63	77,00
2016	77,21	76,43	73,11	68,41	75,69	77,03
2017	77,21	76,44	73,24	68,61	75,80	77,05
2018	77,23	76,47	73,39	68,84	75,93	77,11
2019	77,25	76,50	73,52	69,04	76,04	77,12

Sumber: (BPS PROVINSI JAWA TENGAH) Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru

Kota Semarang memiliki Usia Harapan Hidup yang paling tinggi, sebaliknya Kabupaten Brebes merupakan daerah yang memiliki Usia Harapan Hidup paling rendah.

b. **Pendidikan**

1) **Metode Lama – Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. unya UU No.28 Tahun 2009 yakni dari tahun 2004-2009.

Tabel 4.9a. Angka Melek Huruf Propinsi Jawa Tengah
Sebelum Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Sebelum UU No.28 Tahun 2009	
Tahun	Angka Melek Huruf (tahun)
2004	86,70
2005	87,30
2006	88,24
2007	88,62
2008	89,24
2009	89,46

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Angka Melek Huruf dipergunakan saat Indeks Pembangunan Manusia masih menggunakan Metode Lama dan sebelum berlakunya UU No.28 Tahun 2009. Tabel 4.9a. menunjukkan Angka Melek Huruf di Propinsi Jawa Tengah sebelum berlak. Dilihat dari Tabel 4.9a. Angka Melek Huruf selama tahun 2004 hingga 2009 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini menandakan bahwa Pendidikan di Propinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan/perbaikan tiap tahunnya.

Tabel 4.10a Angka Melek Huruf Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kt Surakarta
Sebelum Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Tahun	Kota Semarang	Kabupaten Kudus	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Brebes	Kabupaten Pati	Kota Surakarta
2004	94,60	88,90	90,00	79,40	83,80	95,60
2005	95,85	91,85	90,10	84,30	86,28	95,80
2006	95,85	91,85	90,10	84,30	86,28	96,58
2007	95,94	91,85	90,10	84,85	86,28	96,58
2008	95,94	91,98	90,10	84,85	86,28	96,66
2009	96,44	92,48	90,28	85,21	86,38	96,67

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4.10a menunjukkan Angka Melek Huruf di 6 (enam) daerah sampel di Propinsi Jawa Tengah sebelum berlakunya UU No.28 Tahun 2009 yakni dari tahun 2004-2009.

2) Metode Baru - Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah ini dipergunakan saat Indeks Pembangunan Manusia sudah menggunakan Metode Baru dan sebelum berlakunya UU No.28 Tahun 2009. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

Tabel 4.9b Harapan Lama Sekolah Propinsi Jawa Tengah
Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Sesudah UU No.28 Tahun 2009	
Tahun	Harapan Lama Sekolah (tahun)
2014	12,17
2015	12,38
2016	12,45
2017	12,57
2018	12,63
2019	12,68

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dilihat dari Tabel 4.9b Harapan Lama Sekolah selama tahun 2014 hingga 2019 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini menandakan bahwa Pendidikan di Propinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan/perbaikan tiap tahunnya.

Sedangkan Tabel 4.10b menunjukkan Harapan Lama Sekolah di 6 (enam) daerah sampel di Propinsi Jawa Tengah sesudah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 yakni antara tahun 2014-2019

Tabel 4.10b Harapan Lama Sekolah Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kt Surakarta Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Tahun	Kota Semarang	Kabupaten Kudus	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Brebes	Kabupaten Pati	Kota Surakarta
2014	13,97	12,58	12,27	11,03	11,24	13,92
2015	14,33	13,14	12,28	11,34	11,79	14,14
2016	14,70	13,19	12,29	11,37	11,92	14,50
2017	15,20	13,20	12,30	11,69	12,29	14,51
2018	15,50	13,21	12,48	12,02	12,30	14,52
2019	15,51	13,22	12,49	12,03	12,41	14,55

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari ke-enam daerah sampel tersebut Harapan Lama Sekolah dari tahun ke tahun baik sebelum dan sesudah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 mengalami peningkatan. Kota Semarang memiliki Harapan Lama Sekolah paling tinggi, sebaliknya Kabupaten Brebes memiliki Harapan Lama Sekolah paling rendah.

3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Tabel 4.11. Rata-rata Lama Sekolah Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Sebelum UU No.28 Tahun 2009		Sesudah UU No.28 Tahun 2009	
Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
2004	6,50	2014	6,93
2005	6,60	2015	7,03
2006	6,80	2016	7,15
2007	6,80	2017	7,27
2008	6,86	2018	7,35
2009	7,07	2019	7,53

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP. RLS dalam hal ini tingkat pendidikan, merupakan unsur mendasar dari pembangunan manusia. Harkat dan martabat

masyarakat akan meningkat apabila memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Selain itu, tingkat pengetahuan yang tinggi akan membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan karena masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam secara signifikan. Pembangunan manusia belum berhasil apabila masyarakat belum memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Tabel 4.11, Tabel 4.12a dan 4.12b menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah di Propinsi Jawa Tengah maupun daerah sampel sebelum berlakunya UU No.28 Tahun 2009 yakni dari tahun 2004-2009 dan sesudah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 yakni antara tahun 2014-2019 meningkat.

Tabel 4.12a Rata-rata Lama Sekolah Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta Sebelum Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Tahun	Kota Semarang	Kabupaten Kudus	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Brebes	Kabupaten Pati	Kota Surakarta
2004	9,40	7,10	6,40	4,80	6,20	9,74
2005	9,80	7,80	6,60	5,50	6,80	9,83
2006	9,80	7,80	6,60	5,50	6,80	10,00
2007	9,80	7,80	6,60	5,50	6,80	10,00
2008	9,80	7,80	6,60	5,50	6,80	10,15
2009	9,98	8,11	6,72	5,62	6,95	10,32

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4.12b. Rata-rata Lama Sekolah Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Tahun	Kota Semarang	Kabupaten Kudus	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Brebes	Kabupaten Pati	Kota Surakarta
2014	10,19	7,83	6,48	5,86	6,35	10,33
2015	10,20	7,84	6,58	5,88	6,71	10,36
2016	10,49	7,85	6,90	6,17	6,83	10,37
2017	10,50	8,31	6,91	6,18	7,08	10,38
2018	10,51	8,62	6,92	6,19	7,18	10,53
2019	10,52	8,63	6,93	6,20	7,19	10,54

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari ke-enam daerah sampel tersebut Rata-rata Lama Sekolah dari tahun ke tahun baik sebelum dan sesudah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 meningkat. Kota Surakarta memiliki Rata-rata Lama Sekolah paling tinggi dibandingkan daerah lainnya, dan Kabupaten Brebes merupakan daerah yang memiliki Rata-rata Lama Sekolah paling rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

c. Pendapatan

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota.

Tabel 4.13 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Sebelum UU No.28 Tahun 2009		Sesudah UU No.28 Tahun 2009	
Tahun	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	Tahun	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)
2004	618,70	2014	9.639,74
2005	621,40	2015	9.930,00
2006	621,75	2016	10.153,00
2007	628,53	2017	10.377,00
2008	633,59	2018	10.777,00
2009	636,39	2019	11.102,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4.14a Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta Sebelum Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Tahun	Kota Semarang	Kabupaten Kudus	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Brebes	Kabupaten Pati	Kota Surakarta
2004	631,40	619,00	614,90	614,90	632,40	638,22
2005	636,84	625,56	620,81	619,98	634,28	638,41
2006	636,84	625,56	620,81	619,98	634,28	639,04
2007	638,78	629,99	625,07	625,37	635,27	641,60
2008	643,55	633,57	631,17	629,64	639,68	646,45
2009	644,63	635,90	633,50	633,23	643,48	648,23

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao. Tabel 4.13 menunjukkan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Propinsi Jawa Tengah sebelum berlakunya UU No.28 Tahun 2009 yakni dari tahun 2004-2009 dan sesudah berlakunya UU

No.28 Tahun 2009 yakni antara tahun 2014-2019, sedangkan gambar 4.13 menunjukkan gambar tingkat pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Propinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.14a menunjukkan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di 6 (enam) daerah sampel di Propinsi Jawa Tengah sebelum berlakunya UU No.28 Tahun 2009 yakni dari tahun 2004-2009 dan Tabel 4.14b menunjukkan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di 6 (enam) daerah sampel di Propinsi Jawa Tengah sesudah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 yakni antara tahun 2014-2019.

Dari ke-enam daerah sampel tersebut Pengeluaran per Kapita Disesuaikan dari tahun ke tahun baik sebelum dan sesudah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 meningkat. Kota Semarang memiliki Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Sekolah paling tinggi dibandingkan daerah lainnya, dan Kabupaten Brebes merupakan daerah yang memiliki Pengeluaran per Kapita Disesuaikan paling rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Tabel 4.14b. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Tahun	Kota Semarang	Kabupaten Kudus	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Brebes	Kabupaten Pati	Kota Surakarta
2014	12.802,48	10.102,14	9.091,04	8.783,61	9.106,28	12.907,29
2015	13.589,00	10.203,00	9.351,00	8.898,00	9.380,00	13.604,00
2016	13.909,00	10.348,00	9.677,00	9.148,00	9.548,00	13.900,00
2017	14.334,00	10.639,00	9.896,00	9.554,00	9.813,00	13.986,00
2018	14.895,00	10.979,00	10.274,00	9.890,00	10.190,00	14.528,00
2019	15.550,00	11.318,00	10.639,00	10.238,00	10.660,00	15.049,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

4.3.2. Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 4.15 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia di 6 (enam) daerah sampel di Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 yakni dari tahun 2004-2009 dan Tabel 4.16 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia di 6 (enam) daerah sampel di Propinsi Jawa Tengah sesudah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 yakni antara tahun 2014-2019. IPM Provinsi Jawa tengah maupun ke 6 daerah sampel mengalami peningkatan IPM. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa

sumberdaya manusia yang terukur pada status ekonomi, sosial maupun kesehatan mengalami perbaikan.

Tabel 4.15. Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Sebelum UU No.28 Tahun 2009		Sesudah UU No.28 Tahun 2009	
Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2004	68,90	2014	68,78
2005	69,80	2015	69,49
2006	70,25	2016	69,98
2007	70,92	2017	70,52
2008	71,60	2018	71,12
2009	72,10	2019	71,73

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4.15 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Tengah baik sebelum berlakunya UU No.28 Tahun 2009 maupun sesudah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya.

Tabel 4.16a. Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta Sebelum Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Tahun	Kota Semarang	Kabupaten Kudus	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Brebes	Kabupaten Pati	Kota Surakarta
2004	74,90	69,40	68,80	63,40	70,60	75,80
2005	75,30	70,00	69,50	64,30	70,90	76,00
2006	75,94	71,31	69,78	65,89	71,78	76,36
2007	76,11	71,66	70,25	66,57	71,87	76,58
2008	76,54	72,02	70,91	67,08	72,26	77,16
2009	76,90	72,57	71,39	67,69	72,72	77,49

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4.16a menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia di 6 (enam) daerah sampel di Propinsi Jawa Tengah sebelum berlakunya UU No.28 Tahun 2009 yakni dari tahun 2004-2009 dan Tabel 4.16b menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia di 6 (enam) daerah sampel di Propinsi Jawa Tengah sesudah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 yakni antara tahun 2014-2019. Dari kedua tabel tersebut nampak bahwa Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki Indeks Pengembangan Manusia paling tinggi disaat sebelum berlakunya UU No.28 Tahun 2009, sedangkan disaat setelah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 Kota Semarang merupakan Kota yang memiliki Indeks Pengembangan

Manusia paling tinggi. Namun dari kedua tabel tersebut, baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 Kabupaten Brebes merupakan Kabupaten yang memiliki Indeks Pengembangan Manusia paling rendah dibandingkan kota sampel lainnya.

Tabel 4.16b. Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta Sesudah Berlakunya UU No.28 Tahun 2009

Tahun	Kota Semarang	Kabupaten Kudus	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Brebes	Kabupaten Pati	Kota Surakarta
2014	79,24	72,00	67,25	62,55	66,99	79,34
2015	80,23	72,72	67,77	63,18	68,51	80,14
2016	81,19	72,94	68,60	63,98	69,03	80,76
2017	82,01	73,84	68,90	64,86	70,12	80,85
2018	82,72	74,58	69,56	65,68	70,71	81,46
2019	83,19	74,94	69,98	66,12	71,35	81,86

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Arah pergerakan IPM dikaitkan dengan desentralisasi fiskal bersifat positif. Kondisi demikian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdul Bashir (2011), hasil pengujian hipotesis dilihat dari nilai t-statistik yang diperoleh untuk desentralisasi fiskal yaitu bernilai 11,001, pada nilai t-statistik dari desentralisasi fiskal menunjukkan hasil yang signifikan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

4.4. Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Akhir tahun 2018 yang lalu, usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah genap 18 tahun. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Kapasitas Fiskal Daerah

Tabel 4.17 menyajikan perkembangan dan status kapasitas daerah secara relatif terhadap provinsi serta kabupaten/kota lain di Indonesia.

Tabel 4.17. Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten

Prov/Kab/Kt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Semarang	1,03	0,790	1,020	3,490	4,681	4,573	1,146	5,806
	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	sangat tinggi
Surakarta	0,258	0,330	0,530	1,250	1,508	1,696	1,492	1,845
	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
Cilacap	0,19	0,130	0,190	2,200	1,470	1,769	1,725	2,206
	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi
Kudus	0,54	0,320	0,540	1,270	1,196	0,996	0,613	1,036
	Rendah	Rendah	Rendah	tinggi	tinggi	sedang	Rendah	Sedang
Brebes	0,11	0,080	0,110	1,870	1,759	1,672	1,658	1,857
	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi
Pati	0,25	0,150	0,250	1,490	1,552	1,369	1,880	1,468
	Rendah	Rendah	Rendah	tinggi	tinggi	tinggi	Tinggi	Tinggi
Jateng	0,18	0,120	0,180	1,060	2,043	1,948	2,943	2,046
	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi

Sumber: PMK Kapasitas Fiskal Daerah 2014 – 2021

Sesuai dengan laporan *Fiscal Policy for Growth and Development* (World Bank, 2006) yang menyatakan bahwa bahwa ruang fiskal (*fiscal space*) tersedia apabila peningkatan pengeluaran pemerintah tidak mengancam solvabilitas fiskal (*fiscal solvency*). Artinya, tertadapat ruang yang cukup pada anggaran guna menyediakan sumber daya tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

Kapasitas fiskal merupakan pendapatan setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) serta belanja rutin/ yang mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Efektivitas penggunaan anggaran akan berdampak positif terhadap terciptanya ruang fiskal bagi pembangunan suatu daerah. Peran APBD sebagai cerminan perencanaan pembangunan daerah menjadi sangat penting. Kapasitas fiskal per provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki Kapasitas Fiskal dalam kategori sangat tinggi, dan termasuk dalam daftar 4 provinsi dengan kapasitas fiskal tertinggi (NOMOR 120/PMK. 07 /2020).

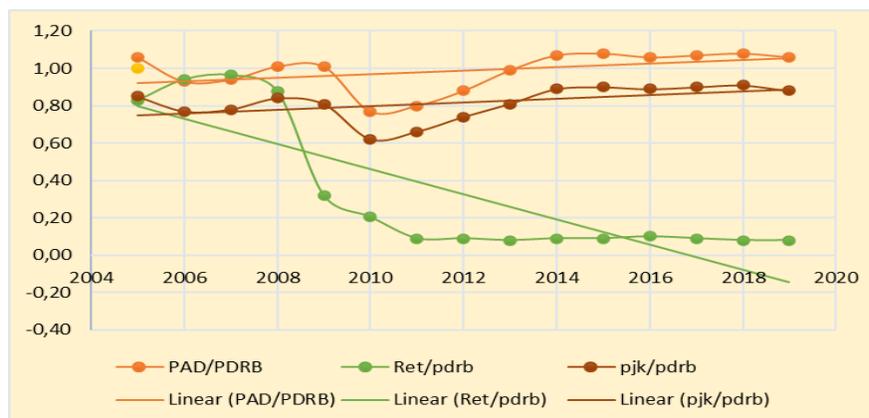
Tabel 4.18 Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Kapasitas Fiskal (Juta Rupiah)
2005	3.517.496,04
2006	3.495.050,42
2007	4.683.540,03
2008	5.380.099,29
2009	5.885.819,55
2010	6.725.720,24
2011	7.682.661,64
2012	11.969.771,68
2013	13.645.700,51
2014	15.234.750,31
2015	16.270.879,27
2016	19.252.800,36
2017	21.728.913,84
2018	22.594.721,83
2019	23.774.630,05

Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah, diolah

b. Rasio Pendapatan dan Retribusi Daerah terhadap PDRB

Rasio pendapatan daerah terhadap PDRB merupakan pendekatan untuk mengukur optimalisasi kapasitas pemerintah daerah dalam rangka menghimpun penerimaan pajak dan retribusi daerah.



Gambar 4.31 Rasio Pendapatan dan Retribusi Daerah thd PDRB

Sumber: APBD dan BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Gambar 4.31 menyajikan perkembangan angka-angka rasio pendapatan dan retribusi daerah terhadap PDRB. Secara keseluruhan tren menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam rangka menghimpun penerimaan semakin optimal, namun

dalam menghimpun retribusi retribusi daerah cenderung semakin kurang optimal. Namun demikian, penelitian ini tidak mengungkap penyebab penurunan optimalisasi dalam menghimpun retribusi daerah tersebut.

c. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD

Rasio kemandirian tercermin pada rasio PAD terhadap total pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Tabel 4.19 Rasio PAD terhadap Pendapatan dan Belanja

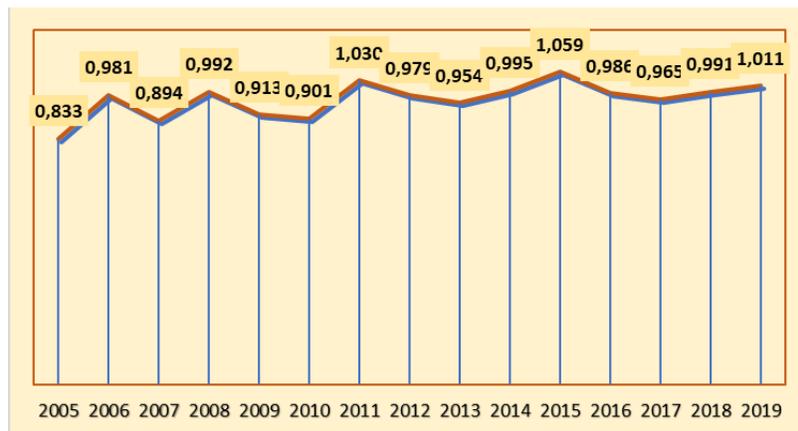
Tahun	Rasio PAD terhadap Pendapatan	Rasio PAD terhadap Belanja	Rata-rata	Kategori
2005	70,62	84,82	77,72	Tinggi
2006	68,89	70,19	69,54	Sedang
2007	67,21	75,21	71,21	Sedang
2008	71,08	71,65	71,37	Sedang
2009	70,23	76,94	73,59	Sedang
2010	72,21	80,18	76,20	Sedang
2011	73,72	71,55	72,64	Sedang
2012	57,00	57,91	57,46	Sedang
2013	61,55	64,54	63,04	Sedang
2014	65,42	65,73	65,58	Sedang
2015	64,80	61,19	63,00	Sedang
2016	58,79	59,63	59,21	Sedang
2017	52,94	54,83	53,88	Sedang
2018	55,51	56,02	55,76	Sedang
2019	55,83	55,21	55,52	Sedang

Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah, diolah

Semakin besar kedua rasio mencerminkan kemandirian daerah semakin tinggi atau memiliki tingkat kemampuan yang semakin tinggi untuk membiayai perencanaan pembangunan daerah sesuai prioritas. Memperhatikan perkembangan kemandirian fiskal daerah yang tercermin pada rasio PAD terhadap total pendapatan daerah serta rasio PAD terhadap total belanja daerah, menunjukkan bahwa arah pergerakan kemandirian keuangan daerah justru negatif. Tingkat kemandirian keuangan daerah semakin menurun dari waktu kewaktu dengan dilakukannya desentralisasi fiskal. Sampai dengan tahun 2014, rasio rata-rata kemandirian keuangan daerah sebesar 69,83, sementara itu pada tahun selanjutnya yakni 2015 – 2019 hanya sebesar 57,57.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan adanya pengeluaran atau belanja yang dilakukan daerah sesuai dengan peruntukan dan rencana. Rasio efisiensi keuangan daerah merupakan perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan fluktuasi yang relatif teratur setiap tahunnya namun dengan kecenderungan angka rasio yang semakin tinggi. Hal tersebut mencerminkan perkembangan ke arah inefisien. Penjelasan atas fluktuasi yang nampak teratur dapat diduga karena faktor jeda waktu atau adanya *time lag* antara kebijakan alokasi belanja dengan dampak yang ditimbulkan.



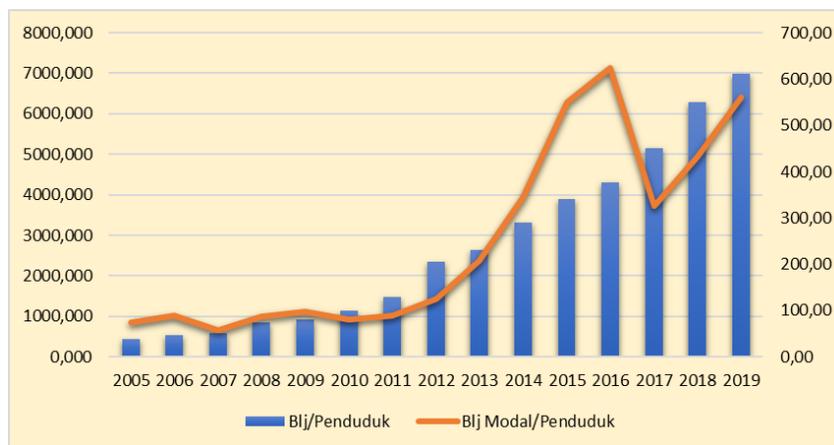
Gambar 4.32 Rasio Belanja terhadap Pendapatan daerah
Sumber: APBD dan BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

e. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan seberapa besar belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Secara keseluruhan, belanja pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian. Terlebih dalam situasi perekonomian mengalami kelesuan dan peran swasta terhambat karena berbagai alasan seperti saat ini, yakni dengan merebaknya COVID 19. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasio belanja modal terhadap total belanja daerah berarti semakin baik pengaruhnya perekonomian. Belanja modal merupakan implementasi pemerintah daerah

dalam pengeluaran. Belanja modal mempengaruhi PDRB secara positif dan signifikan (Hafidh, 2013)

Rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah perkapita) mencerminkan seberapa besar belanja yang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Semakin tinggi nilainya artinya semakin besar belanja yang arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan orang per orang penduduk wilayah tersebut. Secara lebih khusus, rasio belanja modal perkapita menunjukkan seberapa besar belanja yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah per penduduk yang diharapkan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2019 membuktikan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian (Delima & Yulianita, 2016; Siti Fatimah dan Yusuf Hasbullah, 2020).

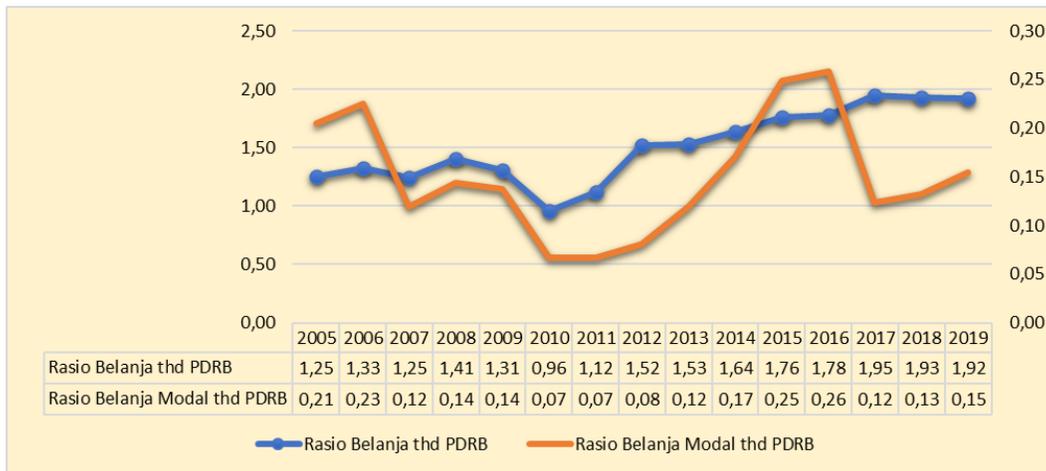


Gambar 4.33 Belanja dan Belanja Modal Perkapita
Sumber: APBD dan BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Mengenai porsi belanja yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang per orang (perkapita) dalam berbagai bentuk maupun melalui pembangunan berbagai infrastruktur menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2015 terjadi lonjakan yang signifikan terkait dengan belanja modal. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pusat (APBN) dimana pemerintah memberi alokasi yang besar anggaran infrastruktur. Pada tahun tersebut untuk pertama kalinya belanja modal lebih besar dibandingkan belanja rutin.

f. Rasio Belanja Daerah dan Belanja Modal Terhadap PDRB

Rasio belanja terhadap Produk Domestik Regional Broto (PDRB) merupakan angka perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB suatu daerah tertentu. Rasio ini mencerminkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah (Mahmudi, 2010). Belanja daerah, khususnya belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB. Dalam penelitian dengan judul Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik bagi Pertumbuhan Ekonomi mendukung pernyataan tersebut. Dilaporkan dalam penelitian tersebut bahwa pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki konstanta positif sebesar 5,815 dan koefisien regresi positif sebesar 1,918, kedua angka tersebut dinyatakan signifikan pada uji-t (Hafidh, 2013; Siti Fatimah dan Yusuf Hasbullah, 2020). Penelitian ini menunjukkan fenomena yang sama, yakni belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB dengan konstanta 334,82 dan koefisien regresi 366,25, dan R kuadrat yang relatif tinggi sebesar 0,6333.



Gambar 4.34. Rasio Belanja dan Belanja Modal terhadap PDRB
 Sumber: APBD dan BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Mengenai perkembangan rasio belanja daerah secara keseluruhan maupun belanja modal, gambar 4.34 menunjukkan gerak yang fluktuatif. Tren menurun terjadi pada tahun 2007 – 2009/2010. Beberapa faktor yang mempengaruhi belanja modal antara lain pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), DAU, Lain-lain Pendapatan yang sah (LP), dan BP. Tren (PAD), dana bagi hasil (DBH), DAU pada periode yang sama cenderung naik, namun terjadi penurunan yang signifikan pada LP. Hal tersebut menyebabkan rasio belanja modal terhadap PDRB menurun signifikan.

4.5. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan (Pendapatan Perkapita)

Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memenuhi aspirasi daerah terkait dengan pengelolaan atas sumber-daya keuangan daerah, meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Penerapan desentralisasi fiskal diharapkan mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang berarti terdapat peningkatan kapasitas ekonomi daerah yang tercermin pada PDRB, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa penelitian terkait dengan hubungan antara desentralisasi fiskal dalam pengaruhnya terhadap perekonomian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh hasil penelitian tersebut antara lain, desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Bambang Saputra, 2012), desentralisasi fiskal yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra, 2016), desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang positif tetapi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi (Sasana, 2016), dan derajat desentralisasi fiskal di wilayah Aceh Barat Daya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh Barat Daya. (Alisman Alisman, 2020).

Penelitian ini mengembangkan hipotesis baru mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan yang tercermin pada perkembangan pendapatan perkapita. Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada perkembangan perkapita dengan kapasitas fiskal daerah sebagai variabel mediasi.

$$IPC = f (PAD) = \alpha_1 + aPAD \rightarrow \text{Model 1}$$

$$KF = f (PAD) = \alpha_2 + bPAD \rightarrow \text{Model 2}$$

$$IPC = f (PAD, KF) = \alpha_3 + c'PAD + bKF \rightarrow \text{Model 3}$$

Keterangan:

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

KF : Kapasitas Fiskal

IPC : Pendapatan Perkapita yang mencerminkan Kesejahteraan Masyarakat
 α : Konstanta

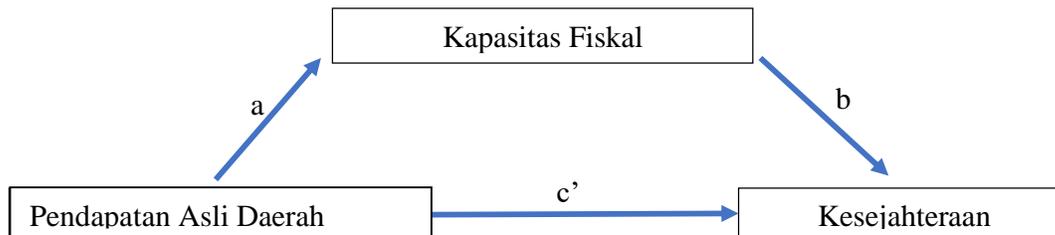
Dalam bentuk diagram alir, model tersebut disajikan pada gambar 4.35a, 4.35b dan 4.36



Gambar 4.35a. Model 1 Pengaruh PAD Terhadap Kesejahteraan



Gambar 4.35b. Model 2 Pengaruh PAD Terhadap Kapasitas Fiskal



Gambar 4.36. Model 3 Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan

Bertitiktolak dari model yang dikembangkan tersebut diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada tabel 4.20, tabel 4.21, dan tabel 4.22. Data menunjukkan bahwa sejak sejak derajat desentralisasi fiskal daerah yang tercermin pada rasio antara PAD dan Belanja Daerah semakin memiliki kecenderungan menurun dari waktu tahun ke tahun. Namun demikian PAD mengalami peningkatan sebesar 15,87% per tahun selama periode pengamatan. Ruang fiskal atau kapasitas fiskal daerah memiliki kecenderungan meningkat. Hasil regresi menunjukkan adanya pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kesejahteraan (IPC). Hal tersebut tercermin pada koefisien regresi 0,986, dengan prop. Sig. 0,000 dan adjusted R square tinggi (0,975).

Tabel 4.20 Perhitungan Regresi PAD Terhadap IPC (model 1)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-21,483	9,760		-2,201	,046
	PAD	,024	,001	,986	21,534	,000
Adjusted R Square		,971				

F-test	463,731			
F-Sig	0,000			
a. Dependent Variable: KF				

Sumber: APBD dan BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 4.21 Perhitungan Regresi PAD Terhadap KF (model 2)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-890,593	439,247		-2,028	,064
	PAD	1,712	,051	,994	33,699	,000
Adjusted R Square		,989				
F-test		463,731				
F-Sig		0,000				
a. Dependent Variable: KF						

Sumber: APBD dan BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Pada pengujian simultan diperoleh nilai pvalue sebesar $(0,000) < \alpha (0,05)$ berarti da pengaruh dan PAD terhadap Kapasitas Fiskal (KF).

Pengujian pengaruh PAD dan kapasitas fiskal daerah (KF) terhadap IPC menunjukkan bahwa PAD dan KF berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada pendapatan perkapita (IPC), namun hanya kapasitas fiskal yang terbukti memilikpengaruh signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kesejahteraan (IPC) melalui kapasitas fiskal sebagai mediasi (tabel 4.22).

Tabel 4.22 Perhitungan Regresi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kapasitas Fiskal Terhadap Kesejahteraan

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-20,786	11,647		-1,785	,100
	PAD	,023	,011	,932	2,081	,060
	KF	,001	,006	,055	2,122	,905
Adjusted R Square		,973				
F-test		214.307				
F-Sig		0,000				
a. Dependent Variable: IPC						

Sumber: APBD dan BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Pengujian kapasitas fiskal sebagai variabel mediasi mengacu pada pola pikir jika A berpengaruh signifikan terhadap B, B berpengaruh signifikan terhadap C, maka B adalah

variabel mediasi. Hubungan A ke C tidak langsung namun melalui B (Ghozali, 2009). Bertitiktolak dari signifikansi pengaruh tersebut, yakni

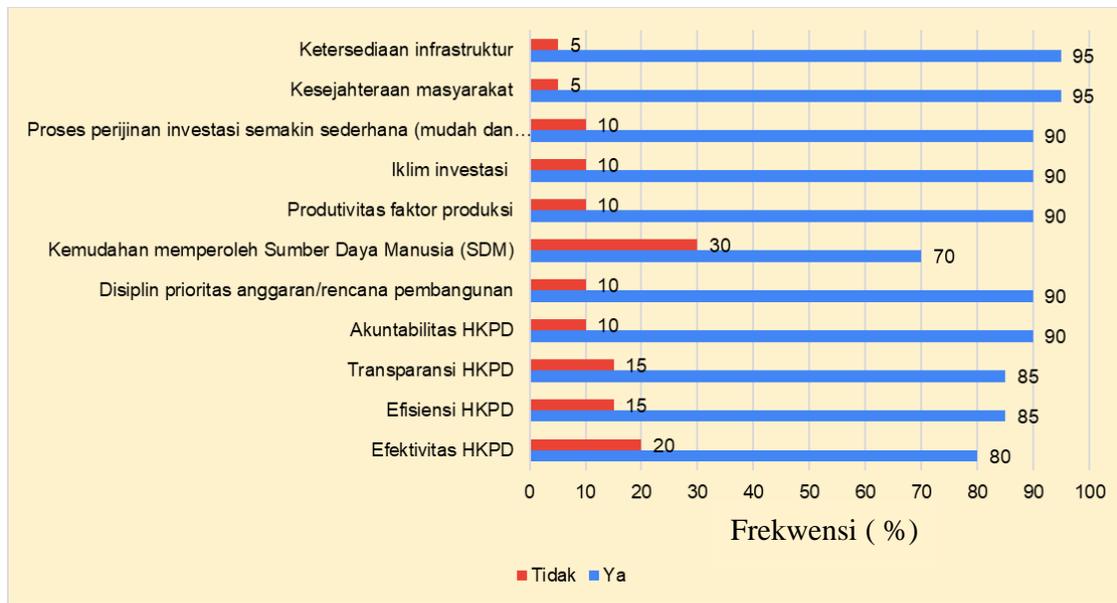
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah (KF),
2. Kapasitas Fiskal Daerah (KF) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan yang tercermin pada pendapatan perkapita (IPC),
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)) dan Kapasitas Fiskal daerah (KF) secara bersama-sama tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan yang tercermin pada pendapatan perkapita (IPC).

Maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal daerah (KF) bukan merupakan variabel antara (mediasi) variabel. (KF) yang merupakan variabel antara (mediasi) juga tercermin pada hasil uji sobel p-value sebesar 0,0000, lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung PAD terhadap pendapatan perkapita (kesejahteraan).

4.6. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Beberapa Indikator Kemandirian Daerah: Pendekatan AHP

4.6.1. Persepsi Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Indikator Kinerja Perekonomian Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).



Gambar 4.37. Persepsi Narasumber mengenai Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Variabel Kinerja Perekonomian Daerah
Sumber: data primer diolah

Mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian daerah yang tercermin pada variabel kinerja perekonomian daerah dan HKPD dipersepsikan berdampak positif. Indikator kinerja perekonomian daerah yang dipersepsikan semakin baik dengan diterapkannya desentralisasi fiskal adalah ketersediaan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat. Persepsi bahwa desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan ketersediaan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat dinyatakan oleh 95% narasumber. Pada indikator HKPD, persepsi bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan akuntabilitas HKPD dinyatakan oleh 90% narasumber.

4.6.2. Perbandingan Tingkat Keterdampakan Indikator Kinerja Perekonomian Daerah

Sebagaimana telah diketahui, analisis dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) pada dasarnya AHP adalah metode yang memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu hirarkhi. Prinsip metode AHP adalah memberikan bobot tiap faktor, variabel, dan indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel, indikator satu dengan lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya, yang dalam kasus ini

menunjukkan indikator tertentu lebih terdampak dibandingkan indikator yang lain. *AHP* ini dilakukan 3 tahap utama yaitu pembobotan, klasifikasi intensitas tiap indikator dan penentuan nilai intensitas tiap indikator dan pemeringkatan. Untuk menentukan nilai keterdampakan dilakukan dengan membandingkan nilai total baris dalam matrik perbandingan berpasangan dengan nilai total dari kolom hasil perhitungan. Nilai eigen diperoleh dari jumlah total perkalian nilai keterdampakan dalam matrik dibandingkan dengan nilai keterdampakan. Model *AHP* menggunakan persepsi pakar sebagai input. Oleh karena itu dimungkinkan terjadi inkonsistensi jawaban karena keterbatasan. Semakin banyak perbandingan berpasangan, inkonsistensi cenderung semakin tinggi. Dalam pendekatan *AHP*, jika matriks perbandingan berpasangan memiliki nilai consistency ratio (CR) lebih kecil dari 0,100 (10%), maka inkonsistensi perbandingan dapat masih dapat diterima.

a. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat - Daerah

Terkait dengan indikator HKPD, jumlah pertanyaan perbandingan berpasangan sebanyak 6 karena saling berbalikan dengan nilai pada diagonal 1. Perbandingan berpasangan ini digunakan untuk membentuk hubungan di dalam suatu struktur. Hasil dari perbandingan berpasangan membentuk matrik dengan skala rasio diturunkan dalam bentuk fungsi-eigen yang positif dan berbalikan. Tabel 4.23 menyajikan perbandingan berpasangan antar indikator HKPD.

Tabel 4.23. Matriks Perbandingan Berpasangan Keterdampakan Indikator HKPD

	Efektifitas	Transparansi	Akuntabilitas	Kemandirian
Efektivitas	1,00	1,63	1,94	1,22
Transparansi	0,61	1,00	1,42	1,56
Akuntabilitas	0,51	0,71	1,00	1,79
Kemandirian	0,82	0,64	0,56	1,00
Total	2,95	3,98	4,92	5,56

Sumber: data primer diolah

Hasil perbandingan nilai total baris dalam matrik perbandingan berpasangan dengan nilai total dari kolom hasil perhitungan pada indikator HKPD menunjukkan tingkat keterdampakan indikator dengan pemberlakuan desentralisasi fiskal. Mengacu pada tabel 4.24, dapat dilihat bahwa Efektifitas Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah merupakan indikator yang paling terdampak oleh pemberlakuan desentralisasi fiskal dengan bobot 0,34.

Tabel 4.24 Matriks Penentuan Bobot Keterdampakan Indikator HKPD

	Efektifitas	Transparansi	Akuntabilitas	Kemandirian	Eigen Value	
					Normalisasi	Bobot
Efektivitas	0,34	0,41	0,39	0,22	0,33	0,34
Transparansi	0,21	0,25	0,29	0,28	0,26	0,26
Akuntabilitas	0,17	0,18	0,20	0,32	0,23	0,22
Kemandirian	0,28	0,16	0,11	0,18	0,17	0,18
Eigen Value Total						4,1144
Eigenvalue			Lambda:	4,1144	MRE:	28,3%
Consistency Ratio	0,37	GCI: 0,16	Psi: 41,7%	CR: 4,4%	MRE est	28,4%

Sumber: data primer diolah

Penelusuran lebih lanjut mengenai sifat keterdampakan tersebut, sebagian besar (80%) narasumber mengatakan bahwa Desentralisasi fiskal meningkatkan Efektivitas Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (gambar 4.37). Pada urutan berikutnya adalah transparansi, diikuti dengan akuntabilitas dan kemandirian daerah. Masing-masing dengan bobot 0,26, 0,22 dan 0,18. Dalam penelitian ini, inkonsistensi perbandingan berpasangan pada indikator-indikator HKPD dapat diterima karena memiliki CR kurang dari 10%, yakni 4,4%.

b. Prioritas Renja

Pemerintah daerah membutuhkan strategi dalam penerapan kebijakan desentralisasi fiskal sehingga hasil yang dicapai bisa optimal. Strategi ini antara lain dituangkan dan dilakukan pemerintah dalam bentuk perumusan program kerja berikut prioritas rencana kerjanya.

Tabel 4.25 Matriks Perbandingan Berpasangan Keterdampakan Indikator Disiplin Prioritas

	Ketepatan Alokasi	Ketepatan Waktu	Prioritas Renja
Ketepatan Alokasi	1,00	0,92	2,07
Ketepatan Waktu	1,08	1,00	2,18
Prioritas Renja	0,48	0,46	1,00
Total	2,57	2,38	5,25

Sumber: data primer diolah

Tabel 4.26 Matriks Penentuan Bobot Keterdampakan Indikator Disiplin Prioritas

	Ketepatan Alokasi	Ketepatan Waktu	Prioritas Renja	Eigen Value	
				Normalisasi	Bobot
Ketepatan Alokasi	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Ketepatan Waktu	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Prioritas Renja	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
				Eigenvalue:	3,0001

Eigenvalue		Lambda:	3,000	MRE:	0,9%
Consistency Ratio	0,37	GCI:	0,00	Psi:	0,0%
		CR:	0,0%	MRE est	0,9%

Sumber: data primer diolah

Segala potensi dari sumber daya daerah harus dapat digali atau dieksplorasi untuk bisa menentukan program dan prioritas kerja sehingga desentralisasi fiskal dapat tercapai lebih optimal. Tabel 4.25 berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perbandingan berpasangan tingkat kepentingan rencana kerja berdasarkan variable ketepatan alokasi, ketepatan waktu, dan prioritas rencana kerja.

Nilai atau bobot perbandingan berpasangan antar variable-variabel dalam penyusunan prioritas rencana kerja tersebut dijelaskan dengan tabel 4.26. Ketepatan waktu dalam penentuan prioritas rencana daerah menjadi faktor yang paling terdampak karena adanya desentralisasi fiskal ini (bobot 0,42). Diikuti kemudian oleh variable ketepatan alokasi (0,39) dan prioritas rencana kerja (0,19). Nilai consistency ratio (CR) untuk jawaban responden atas persepsinya tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap penyusunan prioritas rencana kerja sebesar 0,0%. Angka ini jauh dibawah 10% sehingga inkonsistensi perbandingan berpasangan pada indikator-indikator penyusunan prioritas rencana kerja masih dapat diterima.

c. Produktivitas

Desentralisasi fiskal diharapkan dapat lebih memacu daerah untuk mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing yaitu antara lain dengan menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang tinggi. Berikut ini adalah matrik yang menunjukkan perbandingan tingkat keterdampakan produktivitas karena penerapan kebijakan desentralisasi fiskal.

Tabel 4.27 Matriks Perbandingan Berpasangan Keterdampakan Indikator Produktivitas

	Kemudahan SDM	Kemudahan Input Lain	Ketersediaan Input Lain	Produktivitas Input Lain
Kemudahan SDM	1,00	1,49	2,43	2,49
Kemudahan Input Lain	0,67	1,00	1,37	1,77
Ketersediaan Input Lain	0,41	0,73	1,00	1,76
Produktivitas Input Lain	0,40	0,56	0,57	1,00

Sumber: data primer diolah

Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan dampak kepada produktivitas ekonomi daerah yang dijelaskan oleh variable kemudahan SDM, kemudahan input lain, ketersediaan input lain, dan produktivitas input lain. Dari empat indikator produktivitas tersebut, yang paling tinggi terdampak adalah pada variable kemudahan penyediaan sumber daya manusia (SDM) dengan bobot 0,40 yang kemudian disusul dengan indikator kemudahan input lain (0,26), ketersediaan input lain (0,2), dan produktivitas input lain (0,14).

Tabel 4.28 Matriks Penentuan Bobot Keterdampakan Indikator Produktivitas

	Kemudahan SDM	Kemudahan Input Lain	Ketersediaan Input Lain	Produktivitas Input Lain	Eigen value	
					Normalisasi	Bobot
Kemudahan SDM	0,40	0,39	0,45	0,35	0,40	0,40
Kemudahan Input Lain	0,27	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26
Ketersediaan Input Lain	0,17	0,19	0,19	0,25	0,21	0,20
Produktivitas Input Lain	0,16	0,15	0,11	0,14	0,14	0,14
Eigenvalue					Eigenvalue:	4,0226
Consistency Ratio	0,37	GCI: 0,04	Psi: 0,0%	Lambda: 4,0226	MRE:	13,2%
				CR: 1,0%	MRE est	13,2%

Sumber: data primer diolah

Angka CR ratio untuk keterdampakan desentralisasi fiskal terhadap produktivitas ekonomi adalah sebesar 1,0%. Angka tersebut masih dibawah 10% sehingga segala inkonsistensi jawaban responden yang terjadi masih dapat diterima.

d. Kesejahteraan

Pada indikator Kesejahteraan, jumlah pertanyaan perbandingan berpasangan sebanyak 3 karena saling berbalikan dengan nilai pada diagonal 1. Perbandingan berpasangan ini digunakan untuk membentuk hubungan di dalam suatu struktur. Hasil dari perbandingan

berpasangan membentuk matrik dengan skala rasio diturunkan dalam bentuk fungsi-eigen yang positif dan berbalikan. Tabel 4.29 menyajikan perbandingan berpasangan antar indikator Kesejahteraan.

Tabe 4.29 Matriks Perbandingan Berpasangan Keterdampakan Indikator Kesejahteraan

	Infratraktur	Fasos	Fasum
Infratraktur	1,00	0,63	1,49
Fasos	1,59	1,00	2,02
Fasum	0,67	0,50	1,00
	3,26	2,12	4,50

Sumber: data primer diolah

Hasil perbandingan nilai total baris dalam matrik perbandingan berpasangan dengan nilai total dari kolom hasil perhitungan pada indikator Kesejahteraan menunjukkan tingkat keterdampakan indikator Kesejahteraan dengan pemberlakuan desentralisasi fiskal. Mengacu pada tabel 4.30, dapat dilihat bahwa Fasilitas Sosial merupakan indikator yang paling terdampak oleh pemberlakuan desentralisasi fiskal dengan bobot 0,42. Pada urutan berikutnya adalah Infrastruktur, diikuti dengan Fasilitas Umum. Masing-masing dengan bobot 0,39 dan 0,19.

Tabel 4.30. Matriks Penentuan Bobot Keterdampakan Indikator Kesejahteraan

	Infratraktur	Fasos	Fasum	Eigen Value	
				Normalisasi	Bobot
Infratraktur	0,31	0,30	0,33	0,39	0,39
Fasos	0,49	0,47	0,45	0,42	0,42
Fasum	0,21	0,23	0,22	0,19	0,19
	Eigenvalue:			3,0025	

Eigenvalue				Lambda:	3,0025	MRE:	5,2%
Consistency Ratio	0,37	GCI: 0,01	Psi: 0,0%	CR:	0,3%	MRE est	5,2%

Sumber: data primer diolah

Hasil penelitian ini menghasilkan Nilai consistency ratio (CR) atas persepsi responden mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap Kesejahteraan sebesar 0,3%. Angka ini sangat jauh dibawah 10% sehingga inkonsistensi perbandingan berpasangan pada indikator-indikator Kesejahteraan masih dapat diterima.

e. Ekonomi

Terkait dengan indikator Ekonomi, jumlah pertanyaan perbandingan berpasangan sebanyak 6 karena saling berbalikan dengan nilai pada diagonal 1

Tabel 4.31. Matriks Perbandingan Berpasangan Keterdampakan Indikator Ekonomi

	Pendapatan Masyarakat	Ketimpangan Pendapatan	Ketimpangan Antar Wilayah	Harga-harga
Pendapatan Masyarakat	1,00	1,43	1,94	2,04
Ketimpangan Pendapatan	0,70	1,00	2,09	1,97
Ketimpangan Antar Wilayah	0,52	0,48	1,00	1,75
Harga-harga	0,49	0,51	0,57	1,00
	2,71	3,41	5,60	6,75

Sumber: data primer diolah

Perbandingan berpasangan pada indikator ekonomi selanjutnya diolah untuk memperoleh perbandingan keterdampakan indikator ekonomi. Hasil dari perbandingan berpasangan membentuk matrik dengan skala rasio diturunkan dalam bentuk fungsi-eigen yang positif dan berbalikan. Tabel 4.32 menyajikan perbandingan berpasangan antar indikator Ekonomi. Hasil Perbandingan nilai total baris dalam matrik perbandingan berpasangan dengan nilai total dari kolom hasil perhitungan pada indikator Ekonomi.

Tabel 4.32 Matriks Penentuan Bobot Keterdampakan Indikator Ekonomi

	Pendapatan Masyarakat	Ketimpangan Pendapatan	Ketimpangan Antar Wilayah	Harga-harga	Eigen value	
					Normalisasi	Bobot
Pendapatan Masyarakat	0,37	0,42	0,35	0,30	0,35	0,36
Ketimpangan Pendapatan	0,26	0,29	0,37	0,29	0,31	0,31
Ketimpangan Antar Wilayah	0,19	0,14	0,18	0,26	0,20	0,19
Harga-harga	0,18	0,15	0,10	0,15	0,14	0,14
					Eigenvalue:	4,0523

Eigenvalue				4,0523	MRE:	19,6%	
Consistency Ratio	0,37	GCI:	0,08	CR:	2,1%	MRE est	19,7%

Sumber: data primer diolah

Mengacu pada tabel 4.32, dapat dilihat bahwa Pendapatan Masyarakat merupakan indikator yang paling terdampak oleh pemberlakuan desentralisasi fiskal dengan bobot 0,36. Pada urutan berikutnya adalah Ketimpangan Pendapatan, diikuti oleh Ketimpangan

Antar Wilayah dan Harga-harga. Masing-masing dengan bobot 0,31, 0,19 dan 0,14. Nilai consistency ratio (CR) untuk jawaban responden atas persepsinya tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap Ekonomi sebesar 2,1%. Angka ini dibawah 10% sehingga inkonsistensi perbandingan berpasangan pada indikator-indikator Ekonomi dapat diterima.

f. Iklim Investasi

Indikator Iklim Investasi memiliki tiga alternatif dampak dengan jumlah pertanyaan perbandingan berpasangan sebanyak 4. Hasil AHP berguna untuk mengetahui urutan prioritas dampak bersadar perspektif dari responden AHP. Tabel x.x menunjukkan nilai consistency ratio sebesar 0,37, yang berarti hasil tersebut dapat dinilai konsisten atau inconsistency masih dibawah 10 % yang artinya jawaban-jawaban inkonsisten responden masih dalam batas normal..Tabel 4.33 menyajikan perbandingan berpasangan antar indikator Iklim Investasi.

Tabel 4.33. Matriks Perbandingan Berpasangan Keterdampakan Indikator Iklim Investasi

	Iklim Investasi	Perijinan	Pungli
Iklim Investasi	1,00	1,99	2,11
Perijinan	0,50	1,00	1,48
Pungli	0,47	0,68	1,00
	1,98	3,66	4,59

Sumber: data primer diolah

Tabel 4.34 menampilkan nilai total dari kolom hasil perhitungan pada indikator Iklim Investasi menunjukkan tingkat keterdampakan indikator dengan pemberlakuan desentralisasi fiskal. Berdasar tabel 4.34 menunjukkan indikator Iklim investasi adalah indikator paling terdampak dengan bobot 0,34. Urutan indikator yang terdampak pada aspek investasi adalah iklim investasi (0,34) , perijinan (0,26), pungli (0,22). Meskipun pungli dinilai paling sedikit terdampak namun berdasarkan informasi wawancara mendalam dengan ahli didapati bahwa pungli cukup mempengaruhi jalannya desentralisasi, hal ini karena responden mendapati persoalan pungli adalah hal yang kompleks sehingga sulit untuk diselesaikan. Berdasarkan informasi tersebut dapat dipahami mengapa pungli hanya terdampak kecil dari pelaksanaan desentralisasi.

Tabel 4.34. Matriks Penentuan Bobot Keterdampakan Indikator Iklim Investasi

	Iklim Investasi	Perijinan	Pungli	Iklim Investasi	Eigen value	
					Normalisasi	Bobot
Iklim Investasi	0,34	0,41	0,39	0,22	0,33	0,34
Perijinan	0,21	0,25	0,29	0,28	0,26	0,26
Pungli	0,17	0,18	0,20	0,32	0,23	0,22
	0,28	0,16	0,11	0,18	0,17	0,18
					Eigenvalue:	4,1144

Eigenvalue				Lambda:	3,0106	MRE:	10,9%
Consistency Ratio	0,37	GCI: 0,04	Psi: 0,0%	CR:	1,3%	MRE est	11,0%

Sumber: data primer diolah

4.7. Diskusi

Agregat perekonomian yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah maupun enam Kabupaten/kota yang diamati sebagai daerah sampel mengalami pertumbuhan positif sampai dengan tahun 2019. Struktur perekonomian cenderung tidak mengalami perubahan, dalam arti tiga sektor terbesarnya adalah sektor industri pengolahan, Sektor pertanian, sektor perdagangan dan jasa. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keleluasaan daerah melakukan perencanaan pembangunan sesuai karakter dan potensi wilayah. Desentralisasi bukan satu-fatunya faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap perekonomian (Bambang Saputra, 2012; Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra, 2016; Sasana, 2016; Alisman Alisman, 2020).

Mengaitkan tren pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan bahwa selama periode yang diamati yakni 2005 – 2019 saat telah diberlakukan desentralisasi fiskal indikator kemiskinan menunjukkan taraf hidup masyarakat yang semakin tinggi dan tingkat kemiskinan yang semakin menurun. Kondisi tersebut tercermin pada garis kemiskinan cenderung meningkat serta angka kemiskinan secara absolut maupun secara relatif terhadap total penduduk menurun. Pada sisi ketimpangan menunjukkan adanya ketimpangan yang semakin tinggi kelompok pendapatan. Kondisi demikian mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kurang

berkualitas. Namun demikian, indikator ketimpangan antar wilayah yang tercermin pada indeks willianson menunjukkan disparitas antar wialay semakin rendah. Artinya, pertumbuhan ekonomi semakin tidak terkonsentrasi pada suatu wilayah tertentu. Perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) mencerminkan adanya peningkatan kualitas SDM.

Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keleluasaan daerah melakukan perencanaan pembangunan sesuai karakter dan potensi wilayah. Dalam desentralisasi terkandung beberapa hal mendasar, yakni kebebasan, partisipasi, efektifitas, dan efisiensi. Kebebasan berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan dan merencanakan pembangunannya. Partisipasi berarti masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian permasalahan. Efektivitas dan efisiensi, dengan keleluasaan yang dimiliki dan partisipasi masyarakat diharapkan pemerintahan akan lebih efektif dan efisien.

Pada sisi yang lain, terdapat konsekwensi dari pemberlakuan desentralisasi fiskal tersebut. Daerah dituntut memiliki kemandirian, tidak hanya dalam hal perencanaan pembangunan namun juga dalam hal keuangan. Daerah juga memiliki kewenangan pengelolaan keuangan, meskipun pemerintah pusat terdapat dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yakni dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Mengenai beberapa hal terkait dengan keuangan daerah Kapasitas, provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari empat Provinsi dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tertinggi.

Sementara itu, beberapa hal mengenai rasio keuangan daerah diperoleh hasil bahwa: (1) Rasio pendapatan daerah terhadap PDRB yang merupakan pendekatan untuk mengukur optimalisasi kapasitas pemerintah daerah dalam rangka menghimpun penerimaan pajak dan retribusi daerah, menunjukkan semakin optimal dalam penghimpunan pajak namun dalam menghimpun retribusi retribusi daerah cenderung semakin kurang optimal. (2) Rasio kemandirian tercermin pada rasio PAD terhadap total pendapatan Daerah dan Belanja Daerah menunjukkan arah pergerakan kemandirian keuangan daerah yang semakin rendah, atau ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi. (3) Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan fluktuasi yang relatif teratur setiap tahunnya namun dengan kecenderungan angka rasio

yang semakin tinggi. Hal tersebut mencerminkan perkembangan ke arah inefisien. Penjelasan atas fluktuasi yang nampak teratur dapat diduga karena faktor jeda waktu atau adanya *time lag* antara kebijakan alokasi belanja dengan dampak yang ditimbulkan. (4) Rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah perkapita) yang mencerminkan seberapa besar belanja yang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat dan rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah perkapita) menunjukkan arah alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki porsi yang semakin besar. (5) Rasio belanja terhadap Produk Domesti Regional Broto (PDRB yang mencerminkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah naik

Beberapa rasio keuangan daerah yang lain menunjukkan bahwa produktivitas dan efektifitas yang semakin tinggi. Demikian juga, alokasi belanja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (misalnya membangun infrastruktur) semakin besar. Kapasitas fiskal daerah semakin besar yang berarti ruang gerak daerah untuk menyelenggarakan pembangunan dengan belanja modal semakin besar. Nampaknya, beberapa hal ini lah yang berdampak positif terhadap perekonomian daerah secara agregat maupun per kapita. Sehingga, meskipun dari sisi kemandirian daerah justru semakin rendah, namun kapasitas fiskal, produktivitas, serta efektivitas keuangan daerah meningkat. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan melalui pengaruhnya terhadap kapasitas fiskal daerah dengan pengelolaan yang semakin produktif dan efektif. Beberapa informan dalam wawancara mendalam juga menyampaikan bahwa sifat dampak desentralisasi fiskal terhadap efisiensi dan kesejahteraan sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam berinovasi dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah. Lebih jauh, inovasi dan kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi sangat tergantung pada komitmen pimpinan daerah. Eforia otonomi daerah dengan penerbitan regulasi atau perda-perda yang tumpang tindih, perda yang mendorong pada ekonomi biaya tinggi (misalnya semakin banyaknya pungutan) sering berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah karena berdampak pada kurang kondusifnya iklim investasi.

Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya semacam anomali. Dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai implementasi desentralisasi fiskal, daerah dengan keleluasaan yang lebih besar dalam mengelola rumah tangganya sendiri

dituntut untuk lebih mandiri, termasuk mandiri dalam hal keuangan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa seiring dengan penerapan desentralisasi fiskal sejak tahun 2000, serta desentralisasi fiskal seutuhnya tahun 2014, justru kemandirian keuangan daerah yang tercermin pada rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah justru menurun. Penelusuran secara lebih mendalam, hal tersebut terjadi karena pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen kemandirian keuangan daerah yang dibagi dengan Pendapatan Daerah memiliki laju pertumbuhan yang lebih rendah dibanding pertumbuhan Dana Perimbangan. Secara rata-rata, pertumbuhan PAD selama periode pengamatan hanya sebesar 15,82%, sementara itu pertumbuhan Dana Perimbangan mencapai 29,47% dalam periode yang sama. Oleh karena itu, meskipun semenjak berlakunya desentralisasi fiskal terdapat kecenderungan rasio kemandirian keuangan daerah menurun, namun tetap tidak dapat dihipotesiskan bahwa desentralisasi fiskal menurunkan kemandirian daerah. Sebab, secara aktual PAD tumbuh. Hal demikian juga yang menyebabkan meskipun rasio kemandirian menurun namun kapasitas fiskal meningkat sehingga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, penelitian ini mengembangkan hipotesis bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat mula-mula dari respon daerah terhadap upaya kemandirian keuangannya. Karena desentralisasi fiskal, maka daerah berupaya untuk mendorong bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu tolok ukur kemampuan daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, hal tersebut akan memperbesar kapasitas fiskal. Semakin besarnya kapasitas fiskal inilah yang selanjutnya berpengaruh terhadap kesejahteraan yang tercermin pada perkembangan pendapatan perkapita. Oleh karena itu, maka hipotesis yang dikembangkan adalah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kapasitas fiskal daerah sebagai variabel mediasi. Pengujian kapasitas fiskal sebagai variabel mediasi mengacu pada pola pikir jika A berpengaruh signifikan terhadap B, B berpengaruh signifikan terhadap C, maka B adalah variabel mediasi. Untuk melihat apakah kapasitas fiskal merupakan variabel mediasi pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan atau tidak digunakan Sobel test. Hasil menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal daerah (KF) merupakan variabel antara (mediasi). (KF) yang merupakan variabel antara (mediasi) juga tercermin pada hasil uji Sobel p-

value sebesar 0,0000, lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ pada Sobel-test. Desentralisasi fiskal juga dipersepsikan berdampak positif terhadap kinerja perekonomian daerah yang tercermin pada variabel kinerja perekonomian daerah dan HKPD.

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Dengan memperhatikan temuan-temuan dalam kajian ini, baik yang didasarkan pada data-data sekunder maupun data primer dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator-indikator agregat ekonomi yang tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan berbagi elemennya, kemiskinan, maupun ketimpangan menunjukkan bahwa semua indikator agregat ekonomi mengalami peningkatan selama penerapan desentralisasi fiskal. Baik di Provinsi Jawa Tengah maupun pada Kabupaten/Kota dengan struktur ekonomi yang berbeda memiliki pola yang sama (Kota Semarang dan Surakarta dengan struktur yang cenderung perdagangan dan jasa, Kabupaten Kudus dan Cilacap yang cenderung memiliki struktur Industri Pengolahan, serta Kabupaten Pati dan Brebes dengan struktur ekonomi Pertanian).
2. Pada semua indikator yang dikaji (yang merupakan modifikasi dari indikator kinerja daerah) yakni Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat – Daerah (HKPD), Disipin Prioritas Renja, Efisiensi ekonomi/Produktivitas, Kesejahteraan, perekonomian, dan iklim investasi dipersepsikan terdampak positif dari penerapan desentralisasi fiskal. HKPD merupakan indikator yang paling terdampak karena dikaitkan dengan pertanggungjawaban dana transfer dari pemerintah pusat.
3. Indikator-indikator keuangan daerah secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Namun, jika dikaitkan dengan kemandirian keuangan daerah atau derajat desentralisasi fiskal yang tercermin pada rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah, justru kemandirian keuangan daerah memiliki tren yang semakin rendah. Artinya, ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat semakin tinggi.
4. Pendekatan analisis AHP menunjukkan bahwa:
 - a. Pada variabel HKPD efektifitas HKPD merupakan indikator yang paling terdampak, disusul indikator transparansi, akuntabilitas dan kemandirian.

- b. Pada variabel disiplin prioritas, ketepatan waktu merupakan indikator yang paling terdampak diikuti indikator ketepatan alokasi dan prioritas
 - c. Pada Variabel produktivitas, indikator yang paling terdampak adalah kemudahan memperoleh SDM. Terkait dengan SDM, narasumber dari pengusaha/asosiasi pengusaha memberi catatan pada kualitas SDM. Dari sisi jumlah mudah, namun jika dikaitkan dengan kompetensi yang terverifikasi masih menjadi hambatan.
 - d. Ketersediaan fasilitas sosial dipersepsikan sebagai indikator yang paling terdampak oleh desentralisasi fiskal dengan tanggapan positif, yakni semakin banyak tersedia
 - e. Pendapatan Masyarakat dan Ketimpangan Pendapatan merupakan dua indikator yang dinilai paling terdampak desentralisasi Fiskal. Dari sisi pendapatan dipersiapkan semakin baik, namun data sekunder menunjukkan bahwa ketimpangan antar kelompok pendapatan semakin lebar.
 - f. Iklim investasi secara keseluruhan merupakan indikator yang dinilai paling terdampak oleh desentralisasi fiskal dibandingkan dengan indikator perijinan dan pungutan liar.
5. Jika tujuan desentralisasi fiskal adalah kemandirian keuangan daerah yang tercermin pada rasio PAD terhadap Pendapatan daerah saja, maka desentralisasi fiskal dapat dikatakan “gagal”. Namun jika dikaitkan dengan tujuan utama meningkatkan efektifitas, efisiensi, serta akuntabilitas yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berarti tujuan desentralisasi fiskal berhasil. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan adalah melalui pengaruhnya terhadap kapasitas fiskal.
6. Sifat dampak desentralisasi fiskal terhadap efisiensi dan kesejahteraan sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam berinovasi dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah. Lebih jauh, inovasi dan kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi sangat tergantung pada komitmen pimpinan daerah.
7. Dengan desentralisasi fiskal daerah diharapkan semakin mandiri termasuk dalam hal keuangan yang tercermin pada PAD. Namun demikian, jika PAD dihimpun dengan melakukan berbagai pungutan serta penerbitan berda yang tumpang tindih berpotensi mendorong pada ekonomi biaya tinggi sehingga iklim investasi kurang kondusif.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa temuan dalam kajian ini dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan antara lain:

1. Desentralisasi fiskal menuntut daerah dipersepsikan dan terbukti berdampak positif terhadap kinerja ekonomi daerah. Dalam hal HKPD, desentralisasi fiskal dipersepsikan meningkatkan efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Namun demikian, yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan adalah kapasitas fiskal. Maka, daerah harus mencari- sumber sumber keuangan yang memadai untuk memperbesar kapasitas fiskalnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan aktivitas ekonomi berbasis potensi, khususnya komoditi unggulan daerah
2. Sebagai salah satu komponen kapasitas fiskal, PAD perlu diupayakan peningkatnya. Upaya meningkatkan PAD dapat dilakukan secara intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertimbangkan jangan sampai mengarah pada semakin besarnya pungutan yang mendorong pada ekonomi biaya tinggi
3. Karena pemerintah memiliki keterbatasan fiskal, maka pemerintah diharapkan “tidak terlalu produktif” dengan perda-perda yang berpotensi menghambat investasi swasta.
4. Daerah perlu berupaya untuk menjadi lebih inovatif dalam menggali, mengelola, dan memanfaatkan potensi daerah.
5. Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, yakni pertumbuhan yang diikuti dengan pemerataan pendapatan, selain mendorong mendorong terciptanya peluang usaha, pemerintah daerah dapat memberi mengadopsi beberapa strategi yang merupakan hasil penelitian bank dunia, yakni:
 - a. Pengembangan anak usia dini dan gizi.
 - b. Perlindungan kesehatan untuk semua terutama kepada masyarakat tidak mampu.
 - c. Akses pendidikan bermutu untuk semua
 - d. Bantuan tunai kepada keluarga miskin yang tepat sasaran
 - e. Infrastruktur pedesaan – terutama jalan dan penyediaan listrik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bashir. (2011). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Kajian Ekonomi*, 10(2), 1–35.
- Alisman Alisman, D. S. (2020). Pengaruh Desentralisasi Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. *Jurnal EMT Kita*, 4(2).
- Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(2).
- Bambang Saputra. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *JAAI*, 16(2), 185–199.
- Bahl, R.W. dan J.F. Linn, (1992), *Urban Public Finance in Developing Countries*, Oxford University Press, New York.
- Bahl, R.W. dan J.F. Linn, (1994), “Fiscal Decentralization and Intergovernmental Transfers in Less Developed Countries”, *Publius, The Journal of Federalism*,
- Delima, N. A., & Yulianita, T. M. dan A. (2016). Kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 69–78.
- Hafidh, A. A. (2013). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(2), 109–120.
- Hardijanto (2000), Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance, www.kbw.go.id
- Litvack, J., J. Ahmad, dan R.M. Bird, (1998), “Rethinking Decentralization”, The World Bank Discussion Paper, Washington, DC.
- Loehr, William, Manasan, Rosario, Briefing Note For Consulting Assistance on Economic Reform II Discussion Paper No. 38 Fiscal Decentralization and Economic Efficiency: Measurement and Evaluation, www.hiid.harvard.edu
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

- Majidi, N., (1997), “Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antardaerah”, *Prisma*, 3, Maret: 3-16.
- Musgrave, R.A. dan P.B. Musgrave, (1989), *Public Finance in Theory and Practice*, edisi kelima, McGraw-Hill Book Co. Inc., Singapore.
- Neisbitt, J., (1994), *Global Paradox*, Simon & Schuster, New York.
- Sasana, H. (2016). Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Stabilitas Harga Di Provinsi Di Indonesia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 30(1).
- Siti Fatimah dan Yusuf Hasbullah. (2020). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2019. *Jurnal Ekonobis*, 6(2), 1–27.
- _____ (2008), *Kajian Ekonomi Regional*, Bank Indonesia.
- _____, *Public Private Partnership*, www.marh.gov.bc.ca , didownload tanggal 19-07-2001 24(1): 1-19.